

# Pendidikan Setengah Hati



Abdurrahmansyah



# **PENDIDIKAN SETENGAH HATI**

**Penulis:**

**Abdurrahmansyah**



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

**PENERBIT BUKU INDONESIA**

# **PENDIDIKAN SETENGAH HATI**

**Penulis:**  
**Abdurrahmansyah**

**ISBN:**  
**IKAPI: 643/DKI/2024**  
**Editor: Tita Yunia Zalmi, S.Pd., M.Pd**  
**Penyunting: Eka Yeyen Nuraini, S.S**  
**Desain Sampul dan Tata Letak: Septia Fakhira Risti, S.Ds**

**Diterbitkan oleh: PENERBIT BUKU INDONESIA**  
Jl. Kelapa Gading Kirana Timur A. 11/15, Kel. Kelapa Gading,  
Jakarta Utara, 14240.  
Website: [www.penerbitbukuindonesia.com](http://www.penerbitbukuindonesia.com)  
Email: [penerbitbukuindonesia01@gmail.com](mailto:penerbitbukuindonesia01@gmail.com)

Cetakan pertama, Maret 2025  
© Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya kumpulan tulisan ini dapat diterbitkan dalam bentuk buku. Hanya dengan izin dan pertolongan-Nya, karya ini dapat tersusun hingga dapat tersampaikan kepada para pembaca sekalian. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, teladan sepanjang zaman yang telah membawa cahaya ilmu dan kebenaran kepada umat manusia.

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, saya mempersembahkan buku ini kepada para pembaca yang budiman. Karya ini merupakan kumpulan tulisan yang sebagian besar telah diterbitkan dalam berbagai media, khususnya harian Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Berita Pagi dalam kurun waktu 2016 hingga 2024. Tulisan-tulisan ini hadir sebagai refleksi dari berbagai peristiwa penting yang berkembang pada masanya, yang diangkat berdasarkan momentum tertentu atau kejadian yang ramai diperbincangkan dalam ruang publik.

Berbagai peristiwa yang menjadi latar belakang tulisan dalam buku ini meliputi hari-hari besar keagamaan dan nasional, serta isu-isu sosial, politik, dan pendidikan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, baik di media massa maupun media sosial. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kasus pelecehan di institusi pendidikan, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta berbagai bentuk tindak kriminal dan kekerasan yang melibatkan figur publik. Isu-isu tersebut bukan hanya menjadi bahan diskusi hangat di masyarakat, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sebagian besar tulisan dalam buku ini sebelumnya diterbitkan di harian Sriwijaya Post atas permintaan seorang sahabat saya, H. Syaradin Chaniago, seorang wartawan senior yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu aktual. Beliau

sering kali meminta saya menanggapi berbagai peristiwa penting yang sedang menjadi sorotan publik. Bahkan, beberapa judul artikel dalam buku ini lahir dari diskusi serta saran yang beliau berikan. Saya merasa sangat beruntung dapat menjalin pertemanan dengan beliau, yang hingga kini masih menjadi rekan diskusi saya dalam membahas berbagai permasalahan sosial, pendidikan, serta isu-isu kemanusiaan di negeri ini.

Secara tematik, tulisan-tulisan dalam buku ini lebih banyak berfokus pada dunia pendidikan, sistem kurikulum, pembentukan karakter, nilai-nilai kewarganegaraan (civic values), serta berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai seorang akademisi yang berkecimpung di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, bidang pendidikan menjadi perhatian utama dalam berbagai tulisan saya. Oleh karena itu, banyak dari artikel dalam buku ini yang menyoroti relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman, efektivitas metode pembelajaran, serta integrasi nilai-nilai keislaman dalam dunia pendidikan.

Namun, saya juga menyadari bahwa pembahasan dalam buku ini bersifat opini singkat, yang mungkin belum mampu mengelaborasi suatu topik secara mendalam dari segi metodologi dan teori akademik. Tulisan-tulisan ini lebih merupakan bentuk kegelisahan intelektual yang muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang mendesak untuk ditanggapi. Meski tidak memiliki ruang yang cukup untuk membahas setiap isu secara komprehensif, saya berharap artikel-artikel dalam buku ini dapat memberikan wawasan dan perspektif yang bermanfaat bagi para pembaca.

Saya juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan buku ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa setiap artikel dalam buku ini berdiri sendiri dengan tema dan judul yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada beberapa tulisan yang dapat dikaitkan satu sama lain sehingga membentuk suatu rangkaian pemikiran yang lebih luas dan saling melengkapi. Kekurangan ini semoga tidak mengurangi nilai dan manfaat yang bisa diperoleh dari buku ini.

Dengan penuh kerendahan hati, saya mempersembahkan buku ini kepada para pembaca, akademisi, mahasiswa, guru, praktisi pendidikan, serta siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan dunia pendidikan. Saya berharap bahwa buku ini dapat menjadi bahan renungan, inspirasi, serta pemantik diskusi yang lebih luas mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa kita.

Tidak lupa, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa, kepada sahabat dan kolega yang telah memberikan masukan dan dorongan moral, serta kepada para pembaca yang senantiasa memberikan apresiasi terhadap karya-karya saya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menjadi bagian dari amal jariah, serta membuka wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Jika terdapat kekurangan dalam isi dan penyajian, saya mohon maaf dan menerima segala kritik serta saran yang membangun. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan bagi sesama.

Macan Kumbang Raya, Maret 2025

PENERBITAN BUKU INDONESIA

Abdurrahmansyah

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
<b>ISU-ISU PENDIDIKAN: PROBLEM, KEBIJAKAN, DAN SOLUSI .....</b>	<b>1</b>
1. <i>Deep Learning</i> : Arah Baru Implementasi Kurikulum Indonesia .....	1
2. Indonesia Membutuhkan Pendidikan Adab atau Pendidikan Karakter?.....	7
3. Stop Tipu-Tipu Seleksi Masuk Sekolah !.....	13
4. Tantangan Kepemimpinan Universitas Islam Menuju Rekognisi Global.....	19
5. <i>Quality Cum Character</i> (Arah Pengembangan Pendidikan Islam) .....	25
6. Politik dan Gaji Guru.....	29
7. Kurikulum Pendidikan Seksual, Perlukah?.....	33
8. Potret Buram Pendidikan Indonesia 2022 (Refleksi Memasuki Tahun Baru 2023) .....	37
9. Hilangnya Madrasah Kami (Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional) .....	41
10. Pemuda Indonesia, Mana Sumpahmu! (Refleksi Peran Pemuda dalam Sejarah) .....	45
11. Idealisme Omong Kosong .....	49
12. Ganti Kurikulum: Solusi atau <i>Problem</i> ? .....	53
13. Mendidik Moral Pancasila untuk Meneguhkan Karakter Islami .....	56

14. Pendidikan Salah Arah (Respon Terhadap Fenomena Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan) .....	59
15. Membangun Harmoni Melalui Pendidikan Moderasi ..	63
16. Perundungan dan Tradisi Pendidikan Islam .....	67
17. Membebaskan Pendidikan dari Belenggu Kebudayaan Asing (Refleksi Menyambut HUT RI Ke-76).....	73
18. <i>Learning Loss</i> dan Gagalnya Fungsi Sekolah di Masa Pandemi.....	77
19. Urgensi Pendidikan Agama di Nusantara (Respon Terhadap Gagasan Penghapusan Frasa Agama dalam Kurikulum) .....	81
20. Keculasan Yahudi Israel dan Kegagalan Penguatan Karakter Global .....	85
21. Komunisme dan Kurikulum di Indonesia .....	89
22. Mendidik Karakter Melalui Kecintaan (Pesan Maulid kepada Pemuda) .....	93
23. Guru: Dulu, Kini, dan Akan Datang .....	97
24. Muhasabah Kurikulum 2013 (Refleksi Tahun Baru 1435 H).....	101
25. Stop Ujian Nasional? .....	105
26. Salah Kaprah dalam Kurikulum? .....	109
27. Haji dan Pembelajaran Kedewasaan Ala Ibrahim .....	113
28. Pendidikan Setengah Hati.....	117
29. Dualisme Kurikulum (Ambiguitas Kebijakan Pendidikan) .....	121
30. “Kurikulum Darurat” di Masa Corona.....	125
31. Tantangan Perguruan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di Era Disruptif.....	129
32. Mengintip Jantung Universitas di Nderland.....	133

33. Sepenggal Catatan dari Negeri Belanda .....	135
34. Pilkada dan Pendidikan Politik Nilai .....	139
35. Pendidikan Keadaban (Menanggapi Kekerasan dalam Pendidikan Kedinasan) .....	143
36. <i>Learn From Home</i> : Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19.....	147

**BAGIAN KEDUA**

**ISU-ISU KEAGAMAAN: NORMATIVITAS DAN REALITAS SOSIAL ..... 151**

1. Kisah Sulaiman dan Makan Gratis.....	151
2. Membaca Gagasan Moderasi Hamka.....	155
3. Hati yang Selalu Selesai.....	161
4. Al-Quds dan Tali Ruhani Umat Islam Dunia.....	165
5. Masjid dan Politisasi Agama .....	169
6. Menjadi Hamba Sejati.....	173
7. Teologi Keadilan: Membebaskan Masyarakat dari Belenggu Kecurangan.....	177
8. Membentuk Manusia Spiritual Melalui Perilaku Puasa .....	181
9. Mendidik Perilaku Religius Melalui Budaya.....	185
10. Guru Ngaji Tikar (Tradisi Pembelajaran al-Qur'an Masyarakat Melayu yang Dilupakan).....	189
11. Kontekstualisasi Makna Jihad (Respon Terhadap Kebijakan Kurikulum Moderasi).....	193
12. Paradigma Tauhidik: Cara Pandang Multidisiplin dalam Memahami Islam.....	197

13. Efektivitas Puasa Menuju Produktivitas Kemanusiaan .....	201
14. Hikmah Perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW .....	205
15. Penguatan Keluarga Sebagai Benteng Radikalisme ...	209
16. Kontribusi Ulama Sumatera Selatan dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.....	213
17. Menjadi Muslim Indonesia Seutuhnya .....	217
18. Makna Teologis Kebijakan PSBB di Masa Covid-19...	220
19. Spiritualitas dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia .....	225
20. Hakikat Idul Fitri: Membangun Silaturahmi dan Rekonsiliasi .....	229
21. Ramadhan Bulan Pendidikan Ruhani.....	233
22. Penguatan Pendidikan Aqidah di Tengah Maraknya Penistaan Terhadap Ulama .....	237
23. Aqidah Yang Melahirkan Spirit Hubbul Wathan (Refleksi Memperingati Hari Pahlawan) .....	241
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>245</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>247</b>



# BAGIAN PERTAMA

## ISU-ISU PENDIDIKAN: PROBLEM, KEBIJAKAN, DAN SOLUSI

### 1

#### ***Deep Learning: Arah Baru Implementasi Kurikulum Indonesia***

Pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan sering kali membawa perubahan kebijakan, termasuk dalam dunia pendidikan. Tidak terkecuali pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana kebijakan pendidikan nasional mengalami reformulasi yang cukup signifikan. Salah satu perubahan yang mencolok adalah arah baru dalam implementasi kurikulum, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Prof. Mu'thi, telah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia. Salah satu fokus utama yang beliau usung adalah penguatan pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kurikulum. Konsep yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini adalah “*deep learning*” atau pembelajaran mendalam, yang dinilai sebagai solusi atas lemahnya proses pembelajaran di sekolah selama ini.

Secara konseptual, *deep learning* adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam

terhadap suatu pengetahuan, sehingga peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu menginternalisasi, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam berbagai konteks.

Jika ditinjau lebih dalam, gagasan *deep learning* lebih berfokus pada penguatan aspek implementasi kurikulum dibandingkan dengan sekadar revisi dokumen kurikulum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter F. Oliva dalam *Developing the Curriculum* (1992), yang menyatakan bahwa kurikulum terdiri dari dua dimensi utama, yaitu kurikulum tertulis (*written curriculum*) dan kurikulum yang diimplementasikan (*implemented curriculum*). Sayangnya, di Indonesia, kebijakan kurikulum sering kali hanya berorientasi pada perubahan dokumen tertulis, tanpa diimbangi dengan penguatan proses implementasinya di lapangan.

Sebagai contoh, beberapa negara seperti Finlandia telah membuktikan bahwa efektivitas pendidikan tidak selalu bergantung pada perubahan kurikulum secara formal. Sebaliknya, negara tersebut lebih berfokus pada peningkatan kompetensi guru, penguatan fasilitas pembelajaran, serta optimalisasi manajemen sekolah. Dengan demikian, penguatan *deep learning* dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

### ***Deep learning: Harapan atau Problem Baru?***

Pendekatan pembelajaran berbasis *deep learning* sebenarnya bukan konsep baru. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah menerapkan pendekatan ini dalam sistem pendidikan mereka selama bertahun-tahun. Secara umum, *deep learning* berakar pada teori kognitivisme dan konstruktivisme, yang menekankan bahwa proses belajar harus melibatkan pemahaman yang mendalam dan bukan sekadar hafalan.

Di dunia teknologi, istilah *deep learning* juga dikenal sebagai bagian dari kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Dalam konteks ini, *deep learning* mengacu pada pemrosesan

data menggunakan jaringan saraf tiruan (*artificial neural networks*), yang memungkinkan sistem untuk mengenali pola kompleks dan membuat prediksi berbasis analisis data.

Jika dikaitkan dengan konsep *multiple intelligences* (kecerdasan majemuk) yang dikembangkan oleh Howard Gardner, pendekatan *deep learning* memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai jenis kecerdasan peserta didik, seperti kecerdasan linguistik, logis-matematis, visual-spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Oleh karena itu, penerapan *deep learning* dalam sistem pendidikan Indonesia sebenarnya memiliki landasan teoritis yang kuat.

Namun, implementasi *deep learning* dalam sistem pendidikan Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, di antaranya:

### 1. Kebutuhan akan *Big Data* dan Teknologi

Penerapan *deep learning* memerlukan akses terhadap data dalam jumlah besar (*big data*), karena pendekatan ini menuntut guru dan siswa untuk mengakses berbagai sumber informasi yang kredibel. Teknologi komunikasi dan informasi harus dikembangkan secara masif untuk mendukung proses pembelajaran berbasis *deep learning*.

### 2. Ketergantungan pada Infrastruktur Digital

Sekolah-sekolah di Indonesia harus memiliki jaringan internet yang stabil dan infrastruktur teknologi yang memadai agar pendekatan *deep learning* dapat diterapkan secara optimal. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi digital, seperti *virtual reality* dan *metaverse*, menjadi kebutuhan mendesak.

### 3. Kesiapan Guru dan Tenaga Pendidik

Apakah para guru di Indonesia sudah siap untuk menerapkan *deep learning* dalam pembelajaran di kelas? Apakah sistem pelatihan guru saat ini sudah cukup untuk membekali mereka

dengan keterampilan metodologis yang relevan dengan pendekatan ini?

#### 4. Dukungan Manajemen Sekolah dan Kebijakan Pemerintah

*Deep learning* tidak akan berhasil jika hanya diterapkan di tingkat kelas. Diperlukan manajemen sekolah yang efektif serta kebijakan pendidikan yang berpihak pada inovasi pembelajaran. Supervisi dan pendampingan oleh otoritas pendidikan di daerah harus dilakukan secara serius agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Jika konsep *deep learning* benar-benar akan dijadikan sebagai paradigma baru dalam pembelajaran di Indonesia, maka kebijakan ini harus didukung dan dikawal dengan baik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tantangan utama pendidikan di Indonesia bukan terletak pada dokumen kurikulum, tetapi pada lemahnya implementasi di lapangan.

Masalah yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia, seperti rendahnya kualitas guru, kurangnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan, supervisi yang tidak efektif, serta minimnya koordinasi antara pusat dan daerah, harus segera diselesaikan sebelum konsep *deep learning* dapat diterapkan secara maksimal. Untuk itu, beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah:

##### 1. Meningkatkan Kompetensi Guru

Guru harus diberikan pelatihan intensif mengenai strategi dan metode pembelajaran berbasis *deep learning*. Pemerintah perlu mengembangkan sistem sertifikasi bagi guru yang mampu menerapkan pendekatan ini dengan baik.

##### 2. Memperkuat Infrastruktur Teknologi Pendidikan

Pemerintah harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai. Kurikulum berbasis teknologi harus dikembangkan agar siswa terbiasa dengan pembelajaran digital sejak dini.

### 3. Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan

Otoritas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus lebih aktif dalam melakukan pendampingan kepada sekolah. Supervisi terhadap kepala sekolah dan guru harus diperkuat agar kebijakan *deep learning* benar-benar diterapkan di lapangan.

Jika pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik, maka *deep learning* dapat menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, jika konsep ini hanya diterapkan secara serampangan tanpa persiapan yang matang, maka kita hanya akan mengulang kesalahan lama di mana kebijakan yang dibuat tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan sistem pendidikan nasional.

Wallahu a'lam bish-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

**2****Indonesia Membutuhkan Pendidikan Adab atau Pendidikan Karakter?**

Perdebatan mengenai konsep pendidikan moral di Indonesia sering kali berkisar pada dua istilah utama, yakni pendidikan adab dan pendidikan karakter. Kedua istilah ini, meskipun sering digunakan secara bergantian, sebenarnya memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, tujuan, serta pendekatan metodologisnya.

Pendidikan adab berakar kuat dalam tradisi Islam dan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pendidikan karakter. Konsep ini tidak hanya mencakup pembentukan moral dan etika dalam interaksi sosial, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan kesadaran terhadap hakikat kehidupan. Sebaliknya, pendidikan karakter merupakan konsep yang lebih banyak berkembang dalam sistem pendidikan sekuler, yang menekankan aspek moral dan etika tanpa keterkaitan yang mendalam dengan aspek ketuhanan.

Persoalan ini menjadi semakin relevan di tengah maraknya fenomena degradasi moral di kalangan generasi muda. Kasus-kasus seperti kekerasan di sekolah, penyalahgunaan narkoba, perilaku tidak sopan terhadap guru dan orang tua, serta lemahnya etos kerja di kalangan anak muda menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali konsep pendidikan moral yang paling sesuai bagi Indonesia, apakah pendidikan adab atau pendidikan karakter?

## **Pendidikan Adab dalam Tradisi Islam**

Dalam Islam, pendidikan adab memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah dikembangkan oleh para ulama besar sepanjang sejarah.

Secara ontologis, pendidikan adab bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan (ilahiyah) dan kesopanan sosial yang tinggi. Adab bukan sekadar perilaku baik, tetapi juga mencerminkan sikap batin yang selaras dengan nilai-nilai tauhid. Dalam Islam, ilmu dan adab tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ungkapan yang populer di kalangan ulama:

“Al-Adab Fauqa Al-Ilm” (Adab lebih tinggi dari ilmu).

Ungkapan ini menegaskan bahwa tanpa adab, ilmu yang dimiliki seseorang tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat.

Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang pemikir Muslim kontemporer, mengusulkan istilah ta'dib sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan konsep pendidikan Islam dibandingkan istilah tarbiyah yang selama ini lebih sering digunakan. Menurut al-Attas, ta'dib mencakup keseluruhan aspek pendidikan, mulai dari aspek kognitif, afektif, hingga spiritual.

Dalam praktiknya, pendidikan adab menekankan tiga aspek utama:

1. Adab terhadap diri sendiri  
Membangun kesadaran diri, integritas, dan disiplin pribadi.
2. Adab terhadap sesama manusia  
Mengajarkan nilai-nilai kesopanan, kepedulian sosial, dan keadilan dalam bermuamalah.
3. Adab terhadap Tuhan  
Menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta melalui ibadah dan ketaatan.

Pendidikan adab tidak hanya menanamkan nilai-nilai moral, tetapi juga mengajarkan bagaimana nilai-nilai tersebut harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Pendidikan Karakter: Perspektif Pendidikan Sekuler**

Berbeda dengan pendidikan adab yang berbasis pada nilai-nilai Islam, pendidikan karakter lebih berorientasi pada pendekatan sekuler yang berkembang di dunia Barat. Konsep ini menekankan pentingnya membangun kepribadian yang berlandaskan pada nilai-nilai etika universal, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Salah satu tokoh utama dalam pengembangan pendidikan karakter adalah Thomas Lickona, yang dalam bukunya *Educating for Character* (1993) menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk membantu seseorang memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai etika dalam kehidupannya.

Pendekatan pendidikan karakter cenderung menggunakan metode yang bersifat empiris dan berbasis pengalaman. Nilai-nilai karakter dibangun melalui:

1. Penguatan lingkungan social  
Menanamkan nilai-nilai moral melalui interaksi dalam lingkungan sekolah dan keluarga.
2. Pembiasaan dan keteladanan  
Memberikan contoh konkret melalui perilaku guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.
3. Refleksi dan diskusi moral  
Mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan moral yang mereka lakukan.

Pendidikan karakter lebih berfokus pada aspek moralitas dalam konteks sosial, tanpa memberikan dimensi spiritual yang mendalam seperti dalam pendidikan adab.

## **Pendidikan Adab vs. Pendidikan Karakter: Mana yang Lebih Relevan untuk Indonesia?**

Jika dibandingkan, pendidikan adab dan pendidikan karakter memiliki kesamaan dalam tujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak baik. Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan dan landasan filosofisnya:

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adab memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendidikan karakter. Pendidikan adab tidak hanya berfokus pada aspek moral, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang memberikan landasan lebih kuat dalam membentuk kepribadian seseorang.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki akar budaya yang kuat dalam nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, pendidikan adab sebenarnya lebih sesuai untuk diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Namun, hal ini bukan berarti pendidikan karakter tidak memiliki manfaat. Justru, konsep pendidikan karakter dapat diperkaya dengan nilai-nilai pendidikan adab agar lebih komprehensif.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, diperlukan integrasi antara pendidikan adab dan pendidikan karakter agar tercipta sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek moral sosial, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kesadaran ketuhanan dan keadaban yang tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengintegrasikan Pendidikan Adab dalam Kurikulum Nasional.

Nilai-nilai adab harus diajarkan secara eksplisit dalam kurikulum, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah.

2. Mengembangkan Metode Pembelajaran Berbasis Keteladanan

Guru dan tenaga pendidik harus menjadi teladan utama dalam menerapkan nilai-nilai adab dan karakter.

### 3. Meningkatkan Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat

Pendidikan adab tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus diperkuat melalui peran orang tua dan lingkungan sosial.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya akan menghasilkan individu yang berkarakter, tetapi juga memiliki adab yang tinggi dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Wallahu a'lam bish-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

### 3

## Stop Tipu-Tipu Seleksi Masuk Sekolah !

Sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah sistem zonasi, yang diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit.

Namun, dalam praktiknya, sistem zonasi sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk dugaan kecurangan dalam seleksi masuk sekolah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebijakan ini masih rentan terhadap manipulasi, baik oleh pihak sekolah, orang tua, maupun oknum di lingkungan dinas pendidikan. Akibatnya, keadilan dalam seleksi penerimaan siswa menjadi terganggu, dan semangat pemerataan pendidikan justru tidak tercapai.

Sistem pendidikan seharusnya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial yang adil, bukan sebagai ajang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyoroti berbagai bentuk kecurangan dalam seleksi masuk sekolah dan mencari solusi untuk mengatasinya.

### **Sistem Zonasi: Konsep dan Realitas Implementasi**

Sistem zonasi pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan ini mengatur bahwa penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah negeri dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal, dengan tujuan utama untuk:

1. Mendekatkan akses pendidikan bagi siswa, sehingga mereka dapat bersekolah di wilayah tempat tinggalnya.
2. Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, dengan mendistribusikan siswa secara merata ke semua sekolah negeri.
3. Menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit, sehingga semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Secara teori, sistem zonasi memang bertujuan baik. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

1. Ketimpangan kualitas sekolah: Tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang sama baiknya. Akibatnya, banyak orang tua yang tetap berusaha menyekolahkan anak mereka ke sekolah tertentu, meskipun berada di luar zona mereka.
2. Dokumen kependudukan yang dimanipulasi: Beberapa orang tua sengaja memalsukan alamat domisili agar anak mereka bisa diterima di sekolah yang diinginkan.
3. Kuota jalur prestasi yang tidak transparan: Banyak kasus di mana siswa dengan nilai tinggi justru tidak diterima, sementara siswa dengan nilai lebih rendah dinyatakan lolos seleksi.

### **Kasus Kecurangan dalam PPDB: Sebuah Potret Buram**

Pada PPDB tahun 2024, ditemukan indikasi kecurangan besar-besaran di beberapa sekolah negeri di Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, sekitar 911 siswa yang seharusnya tidak lolos seleksi justru diterima di sekolah negeri favorit. Sementara itu, banyak siswa yang memenuhi syarat malah gagal masuk akibat manipulasi skor jalur prestasi.

Lebih mencengangkan lagi, dugaan kecurangan ini melibatkan pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Selatan, yang diduga melakukan maladministrasi dengan mengintervensi hasil seleksi. Bahkan, beberapa kepala sekolah mengaku mendapat tekanan untuk meluluskan siswa tertentu di luar prosedur yang seharusnya.

Kasus ini tidak hanya mencoreng dunia pendidikan, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang buruk bagi para siswa. Bayangkan bagaimana perasaan seorang anak yang telah belajar dengan giat, mendapatkan nilai tinggi, tetapi justru tersingkir karena praktik yang tidak jujur. Situasi ini berpotensi menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita.

### **Dampak Kecurangan dalam PPDB**

Jika praktik kecurangan dalam seleksi masuk sekolah terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa konsekuensi negatif yang dapat timbul antara lain:

#### **1. Menurunnya Kepercayaan terhadap Dunia Pendidikan**

Jika masyarakat melihat bahwa sistem seleksi tidak adil dan mudah dimanipulasi, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan.

Orang tua yang merasa dirugikan akan semakin skeptis terhadap kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan.

#### **2. Melemahkan Semangat Belajar Siswa**

Siswa yang telah berusaha keras tetapi gagal masuk sekolah pilihan mereka karena praktik kecurangan bisa mengalami demotivasi dan kehilangan semangat belajar.

Sebaliknya, siswa yang diterima melalui jalur tidak sah mungkin akan mengembangkan mentalitas instan dan tidak menghargai proses belajar yang seharusnya.

#### **3. Ketidakadilan dalam Pendidikan**

Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang. Namun, jika sistem seleksi diwarnai oleh nepotisme dan manipulasi, maka yang

terjadi justru adalah pembatasan akses bagi siswa yang benar-benar berhak mendapatkan tempat di sekolah terbaik.

#### 4. Terciptanya Generasi dengan Etika yang Lemah

Jika sejak usia dini siswa melihat bahwa sistem dapat dimanipulasi dan ketidakjujuran bisa membawa keuntungan, maka mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai yang menyimpang.

Praktik ini bisa menjadi cikal bakal budaya korupsi di masa depan.

### **Mencari Solusi: Mewujudkan Seleksi Masuk Sekolah yang Adil dan Transparan**

Agar seleksi masuk sekolah berjalan lebih transparan dan bebas dari kecurangan, beberapa langkah yang perlu diambil adalah:

#### 1. Penguatan Sistem Verifikasi Data

Pemerintah perlu memastikan bahwa data kependudukan yang digunakan dalam PPDB benar-benar valid, dengan melakukan *cross-check* antara Kartu Keluarga, KTP, dan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pembuatan sistem berbasis digital yang lebih canggih untuk mendeteksi indikasi manipulasi alamat.

#### 2. Penegakan Sanksi bagi Pelaku Kecurangan

Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan harus dikenai sanksi tegas, termasuk pencopotan kepala sekolah yang terlibat.

Pejabat dinas pendidikan yang terlibat dalam manipulasi data harus ditindak secara hukum untuk memberikan efek jera.

#### 3. Transparansi dalam Jalur Prestasi dan Afirmasi

Mekanisme seleksi jalur prestasi harus lebih transparan, dengan sistem skor yang bisa diakses publik untuk menghindari intervensi pihak luar.

Jika perlu, pihak ketiga independen seperti Ombudsman atau LSM pendidikan bisa dilibatkan dalam proses audit PPDB.

#### 4. Pemerataan Kualitas Sekolah

Sistem zonasi hanya akan efektif jika seluruh sekolah memiliki kualitas yang setara, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun metode pembelajaran.

Pemerintah harus berinvestasi lebih banyak untuk meningkatkan mutu sekolah-sekolah di daerah yang selama ini kurang diperhatikan.

Seleksi masuk sekolah seharusnya menjadi ajang yang adil bagi semua peserta didik. Namun, jika praktik manipulasi dan kecurangan terus terjadi, maka sistem pendidikan kita akan semakin kehilangan kredibilitasnya.

Pendidikan bukan sekadar tentang memperoleh ijazah atau masuk ke sekolah favorit, tetapi tentang membangun nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Jika dunia pendidikan justru diwarnai oleh praktik tidak jujur, maka kita harus bertanya: nilai apa yang sebenarnya sedang kita ajarkan kepada generasi muda?

Maka, sudah saatnya kita berkata “STOP KECURANGAN DALAM PPDB!” dan memastikan bahwa seleksi masuk sekolah benar-benar dilakukan dengan adil dan transparan.

Wallahu a'lam bish-shawwab.

PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 4

## Tantangan Kepemimpinan Universitas Islam Menuju Rekognisi Global

Perguruan tinggi, khususnya universitas Islam, memiliki peran strategis dalam membangun peradaban melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan, universitas Islam dituntut untuk tidak hanya menjadi lembaga akademik yang berkualitas, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional dan mendapatkan rekognisi global.

Dalam bukunya *The Idea of University* (1996), John Henry Newman menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi tempat berkembangnya pemikiran kritis, riset inovatif, serta penguatan nilai-nilai akademik yang berbasis pada integritas dan kebebasan akademik. Dalam konteks universitas Islam, tantangan ini semakin kompleks karena harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek keilmuan dan manajemen pendidikan tinggi.

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perguruan tinggi Islam dapat mencapai rekognisi global serta tantangan yang harus dihadapi dalam proses tersebut.

### **Islam sebagai Fondasi dalam Pengembangan Universitas**

Sejarah mencatat bahwa universitas Islam telah memainkan peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan sejak berabad-abad yang lalu. Lembaga seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko (didirikan tahun 859 M) dan Universitas Al-Azhar di Mesir (didirikan tahun 970 M) menjadi pusat keilmuan yang melahirkan banyak pemikir besar dalam

berbagai bidang, termasuk filsafat, sains, kedokteran, dan teologi.

Menurut penelitian Sintayehu Kasseye Alemu (2023) dalam tulisannya *The Meaning, Idea, and History of University/Higher Education*, perkembangan universitas Islam didorong oleh semangat keilmuan dalam Islam yang tidak membatasi diri pada ilmu agama semata, tetapi juga ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Di Indonesia, perkembangan Universitas Islam Negeri (UIN) dan berbagai universitas berbasis Islam lainnya mencerminkan semangat ini. Kampus-kampus ini tidak hanya fokus pada studi Islam, tetapi juga telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu umum seperti sains, teknologi, ekonomi, dan sosial humaniora.

Namun, agar universitas Islam di Indonesia dapat mencapai rekognisi global, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam meningkatkan mutu akademik, penelitian, dan daya saing internasional.

### **Universitas Islam dan Standar Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional**

Dalam dunia pendidikan tinggi, ada beberapa standar yang digunakan untuk menentukan peringkat dan rekognisi internasional universitas, salah satunya adalah *Quality Standards of World Class University (QS WCU) Ranking*.

Menurut standar QS WCU, ada tujuh indikator utama yang menentukan apakah sebuah perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai universitas bertaraf internasional:

#### **1. Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Jumlah publikasi dalam jurnal bereputasi internasional menjadi faktor penting dalam menilai mutu akademik sebuah universitas.

Universitas Islam harus mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset yang berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan umat manusia.

## 2. Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Proses pembelajaran harus menggunakan metode modern berbasis teknologi agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan inovatif.

## 3. Daya Serap Lulusan di Dunia Kerja

Keberhasilan sebuah universitas juga diukur dari sejauh mana lulusannya dapat terserap di dunia kerja dengan kompetensi yang unggul.

## 4. Internasionalisasi

Universitas Islam perlu meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri, baik dalam bentuk pertukaran mahasiswa maupun kolaborasi penelitian.

## 5. Fasilitas dan Infrastruktur Kampus

Ketersediaan laboratorium, perpustakaan digital, dan akses teknologi menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas akademik.

## 6. Sistem Pembelajaran Berbasis *Online*

Perguruan tinggi yang ingin mendapatkan rekognisi global harus mampu menyediakan pembelajaran berbasis digital yang dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai negara.

## 7. Inovasi dan Pengembangan Teknologi

Universitas Islam harus aktif dalam menciptakan inovasi, baik dalam bidang sains maupun dalam pengembangan studi Islam yang lebih kontekstual dengan tantangan zaman.

Dengan memenuhi tujuh indikator ini, universitas Islam di Indonesia dapat semakin dikenal di tingkat global dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas dari dunia akademik internasional.

## **Tantangan dalam Mewujudkan Universitas Islam Bertaraf Internasional**

Untuk mencapai rekognisi global, universitas Islam harus menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

### 1. Kurangnya Publikasi Internasional

Salah satu kelemahan terbesar universitas Islam di Indonesia adalah minimnya jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi. Perlu ada kebijakan yang lebih serius untuk mendorong dosen dan peneliti agar aktif menulis dalam jurnal bereputasi.

### 2. Kurangnya Dosen dengan Kualifikasi Internasional

Banyak perguruan tinggi Islam masih memiliki jumlah dosen yang terbatas dalam hal publikasi internasional dan pengalaman akademik di luar negeri. Universitas Islam perlu memberikan beasiswa dan program pelatihan bagi dosen agar mereka dapat meningkatkan kapasitas akademiknya di tingkat global.

### 3. Kurangnya Kemampuan Berbahasa Inggris dalam Akademik

Bahasa Inggris menjadi hambatan bagi banyak akademisi Muslim dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah mereka di jurnal internasional. Universitas harus menyediakan program pelatihan bahasa Inggris yang lebih intensif bagi mahasiswa dan dosen.

### 4. Kesenjangan Teknologi dan Infrastruktur

Banyak universitas Islam di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas laboratorium dan teknologi digital. Perlu ada investasi besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur akademik.

### 5. Kurangnya Kolaborasi Internasional

Universitas Islam masih kurang dalam menjalin kerja sama dengan universitas top dunia. Kolaborasi akademik, program

pertukaran mahasiswa, dan joint research harus diperkuat agar universitas Islam lebih dikenal di tingkat internasional.

### **Strategi Meningkatkan Rekognisi Global Universitas Islam**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat dilakukan oleh universitas Islam agar dapat mencapai standar internasional, di antaranya:

#### 1. Meningkatkan Kualitas Riset dan Publikasi

Dosen dan mahasiswa harus didorong untuk lebih aktif dalam melakukan penelitian dan menulis di jurnal bereputasi.

#### 2. Meningkatkan Kompetensi Dosen dan Tenaga Pendidik

Memberikan beasiswa bagi dosen untuk melanjutkan studi di luar negeri serta mengikuti program pelatihan akademik tingkat internasional.

#### 3. Memperkuat Kurikulum Berbasis Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus lebih dimaksimalkan agar mahasiswa siap menghadapi dunia yang semakin digital.

#### 4. Membangun Kerja Sama dengan Universitas Internasional

Program pertukaran mahasiswa dan kolaborasi penelitian dengan universitas luar negeri harus menjadi prioritas.

#### 5. Meningkatkan Sistem Pembelajaran Berbasis Digital

Pembelajaran *Online* harus dikembangkan agar mahasiswa dari berbagai negara dapat mengakses pendidikan Islam berkualitas.

Universitas Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendapatkan rekognisi global. Namun, untuk mencapai standar internasional, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan kualitas riset, publikasi ilmiah, kurikulum, serta kerja sama akademik dengan dunia internasional.

Tantangan yang ada harus dijawab dengan inovasi dan kepemimpinan yang visioner agar universitas Islam tidak hanya menjadi pusat pendidikan di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi bagi dunia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.

Wallahu a'lam bish-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 5

### ***Quality Cum Character***

### **(Arah Pengembangan Pendidikan Islam)**

Pendidikan modern saat ini berkembang dengan pendekatan yang tidak lagi bersifat satu arah dalam memahami konsep filosofis pendidikan. Model pendidikan kontemporer lebih menekankan pendekatan multidisiplin dalam filsafat pendidikan, menciptakan sintesis dari berbagai ide yang dikombinasikan menjadi perspektif baru yang lebih integratif. Hal ini terlihat dalam kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang menggabungkan berbagai aliran filsafat seperti rasionalisme, pragmatisme, humanisme, hingga idealisme, dengan tujuan membentuk pendidikan yang lebih menyeluruh.

Pendidikan bertujuan membentuk individu secara holistik, mencakup aspek perilaku, intelektual, dan keterampilan. Teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan Howard Gardner menegaskan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan kecerdasan yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan harus disesuaikan dengan potensi mereka. Oleh karena itu, model pendidikan yang berbasis diferensiasi menjadi lebih relevan di era saat ini.

Tulisan ini bertujuan menyoroti pentingnya pendidikan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga membentuk moral dan karakter peserta didik. Ketidakseimbangan dalam dua aspek ini berpotensi menimbulkan kegagalan dalam sistem pendidikan dan lemahnya kualitas lulusan yang dihasilkan.

## **Pendidikan yang Mengintegrasikan Kualitas dan Karakter**

Baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, pendidikan harus mampu mengembangkan tiga dimensi utama: nalar intelektual, keterampilan, dan afeksi. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menerapkan kurikulum yang mendukung pengembangan ketiga aspek ini secara seimbang. Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung lebih menekankan aspek kognitif, sementara nilai-nilai moral dan karakter sering terabaikan.

Praktik di dunia pendidikan saat ini lebih menitikberatkan pada hasil akademik yang diukur melalui angka, tanpa mempertimbangkan aspek karakter seperti etika, empati, dan integritas. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti korupsi dalam dunia pendidikan, jual beli nilai, pelecehan moral, hingga kasus bullying masih sering terjadi. Lebih parahnya lagi, banyak individu yang mengutamakan ijazah sebagai simbol keberhasilan tanpa benar-benar menguasai ilmu yang dipelajari.

Kesenjangan dalam pendidikan tidak hanya menciptakan perbedaan sosial yang semakin tajam, tetapi juga menimbulkan krisis moral dan kehancuran ekologi. Arnold Toynbee menyoroti bahwa krisis kemanusiaan global berakar dari ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kurangnya perhatian terhadap aspek moral dan nilai-nilai kearifan. Sistem pendidikan yang lebih menekankan kompetisi dibandingkan kerja sama turut memperburuk situasi ini.

Paradigma *Cartesian-Newtonian* yang mengedepankan logika dan materialisme telah mendominasi pendidikan, menghasilkan sistem yang lebih berorientasi pada pencapaian akademik tanpa memperhatikan pembentukan karakter. Berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia, mulai dari sistem instruksional hingga kurikulum MBKM, masih banyak dipengaruhi oleh paradigma ini, sehingga lebih fokus pada proses pengajaran dibandingkan pembelajaran yang holistik.

## **Pendidikan Holistik sebagai Solusi**

Konsep pendidikan masa kini dan masa depan seharusnya tidak lagi bergantung pada paradigma yang hanya berfokus pada aspek materialistik dan saintifik, tetapi harus mengarah pada pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai upaya membentuk individu secara utuh, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, budaya, dan emosional. Menurut Jeremy Henzell-Thomas, pendidikan holistik bertujuan untuk mengembangkan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan, yang merupakan tujuan utama dalam kehidupan.

Amin Abdullah dan Azyumardi Azra mengembangkan konsep Paradigma Tauhidik, yang menekankan integrasi antara cara berpikir, bertindak, dan menjalani kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti membangun keselarasan antara aspek lahiriah dan batiniah, serta menyatukan dimensi intelektual dan spiritual dalam satu kesatuan yang harmonis.

Konsep *Academic Quality cum Character* menegaskan bahwa pencapaian akademik tidak boleh dipisahkan dari pembentukan karakter. Ilmu pengetahuan dan keterampilan harus sejalan dengan nilai moral agar menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam, termasuk di perguruan tinggi Islam, guna menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kepribadian yang berintegritas.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 6

# Politik dan Gaji Guru

Pembahasan mengenai kesejahteraan guru selalu menjadi isu yang menarik dan relevan. Gaji yang diterima guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena kesejahteraan mereka sangat berkaitan dengan motivasi dan kinerja mengajar. Negara-negara maju telah menerapkan kebijakan penggajian guru yang sesuai dengan standar hidup layak. Misalnya, di Swiss, seorang guru bisa mendapatkan penghasilan tahunan mencapai USD 110.000, sementara di Kanada, gaji guru bisa mencapai USD 74.000 per tahun. Di beberapa negara lain seperti Jerman, Australia, dan Malaysia, gaji guru juga jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan gaji guru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Besaran gaji untuk guru PNS bervariasi tergantung pada golongan dan pangkat, dengan kisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 5,6 juta per bulan. Sayangnya, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei, gaji guru di Indonesia masih tergolong rendah. UNESCO bahkan mencatat bahwa gaji guru di Indonesia adalah yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara.

### **Politik dan Kesejahteraan Guru di Indonesia**

Dalam perspektif politik pendidikan, kebijakan terkait gaji guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab politik untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan mutu pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 45,9% kinerja guru berkaitan erat dengan pendapatan yang mereka terima. Dengan kata lain, semakin baik kesejahteraan guru,

semakin baik pula kualitas pengajaran yang diberikan kepada siswa.

Selain peningkatan gaji, pemerintah juga perlu memperhatikan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional guru. Sayangnya, laporan dari *Research in Improving System of Education (RISE)* menunjukkan bahwa hanya sedikit kebijakan daerah yang benar-benar berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Bahkan, kurang dari 1% pemerintah daerah memiliki program konkret untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Masalah lain yang masih menjadi tantangan besar adalah kesejahteraan guru honorer. Saat ini, terdapat sekitar 704.503 guru honorer di Indonesia, yang jumlahnya hampir setara dengan guru berstatus PNS. Sayangnya, banyak dari mereka hanya menerima gaji antara Rp 500.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan, jumlah yang sangat jauh dari kata layak. Minimnya kesejahteraan ini berpengaruh terhadap semangat mengajar dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya.

Persoalan kesejahteraan guru juga sering kali dijadikan alat kampanye politik dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun presiden. Setiap lima tahun sekali, janji-janji politik terkait peningkatan kesejahteraan guru kerap digaungkan, namun implementasinya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan, di beberapa daerah, afiliasi politik guru sering menjadi faktor yang menentukan apakah mereka tetap dipekerjakan atau diberhentikan setelah pemilu berakhir.

### **Solusi Kebijakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru**

Untuk mengatasi permasalahan ini, kebijakan terkait kesejahteraan guru harus dirancang dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara menyeluruh, mencakup jumlah guru yang dibutuhkan, institusi pendidikan yang ada, serta kekuatan anggaran yang tersedia.

2. Kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi ASN yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional guru guna meningkatkan kompetensi mereka.
4. Penghapusan praktik politisasi dalam pengangkatan dan pemberhentian guru, sehingga tenaga pendidik dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan politik.
5. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kesejahteraan guru.
6. Edukasi politik bagi masyarakat, agar mereka dapat memilih pemimpin yang memiliki visi jelas terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa, dan guru adalah aktor utama dalam menciptakan generasi unggul di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan politik yang menyangkut kesejahteraan guru harus benar-benar dijalankan dengan serius, bukan sekadar alat politik untuk meraih suara. Dengan langkah yang tepat, kesejahteraan guru dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 7

## Kurikulum Pendidikan Seksual, Perluakah?

Perdebatan mengenai perlunya pendidikan seksual kembali mencuat setelah meningkatnya kasus pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Di beberapa daerah seperti Malang dan Probolinggo, angka pengajuan dispensasi nikah sangat tinggi, dengan mayoritas kasus disebabkan oleh kehamilan remaja. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 15.212 permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur, dengan 80% di antaranya karena faktor hamil sebelum menikah.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam sistem pendidikan, baik di keluarga maupun sekolah, dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai seksualitas dan konsekuensinya. Faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku seksual berisiko pada remaja antara lain kurangnya pengawasan orang tua, pudarnya nilai-nilai budaya dan agama, serta mudahnya akses ke konten seksual di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penguatan pendidikan seksual dalam kurikulum sekolah guna memberikan wawasan yang lebih baik bagi generasi muda.

### **Urgensi Pendidikan Seksual dalam Kurikulum**

Penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai perilaku seksual yang bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Dalam banyak masyarakat, hubungan seksual yang sah hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan. Namun, semakin banyak kasus remaja yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah, yang sering

kali berujung pada kehamilan tidak diinginkan dan berbagai konsekuensi sosial lainnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak remaja yang sudah aktif secara seksual sebelum mencapai usia tersebut. Akibatnya, mereka mengajukan dispensasi nikah agar dapat menikah secara legal. Keadaan ini memperlihatkan pentingnya intervensi pendidikan untuk membekali remaja dengan pemahaman yang benar tentang seksualitas dan dampaknya.

Meningkatnya angka kehamilan remaja menunjukkan bahwa sistem pendidikan agama dan adat yang selama ini diterapkan belum cukup efektif dalam membentuk pemahaman dan karakter remaja. Banyak komunitas adat di Indonesia yang secara tegas melarang hubungan seksual di luar pernikahan. Di masa lalu, nilai-nilai adat ini dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan zaman, banyak dari sistem nilai tersebut mulai ditinggalkan, sementara pendidikan agama di sekolah juga sering kali bersifat normatif dan kurang kontekstual.

### **Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seksual**

Di beberapa pondok pesantren, telah lama diajarkan kitab-kitab yang membahas pendidikan seksual dalam konteks Islam, seperti *Qurrotul Uyun*, *Uqudul Lujain*, dan *Irsyadu Zaujain*. Kitab-kitab ini membahas hubungan seksual dalam pernikahan serta etika yang harus dijunjung tinggi. Namun, materi ini belum diintegrasikan secara luas dalam sistem pendidikan formal.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikulum dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai budaya dan agama. Pendidikan seksual yang baik bukan sekadar memberikan informasi tentang anatomi tubuh, tetapi juga membekali remaja dengan pemahaman tentang tanggung jawab, etika, dan

dampak psikologis serta sosial dari aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa manfaat dari pendidikan seksual yang terstruktur antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko kehamilan di luar nikah dan penyakit menular seksual.
2. Membantu remaja memahami batasan dan konsep persetujuan dalam hubungan interpersonal.
3. Menanamkan nilai-nilai moral dan agama dalam memahami seksualitas sebagai bagian dari kehidupan manusia.
4. Mengajarkan cara menghadapi tekanan sosial dan media yang sering kali menggiring remaja ke dalam perilaku seksual berisiko.

Pendidikan seksual bukan sekadar isu kontroversial, tetapi sebuah kebutuhan yang harus dipertimbangkan secara serius dalam dunia pendidikan. Fenomena tingginya angka kehamilan remaja menunjukkan bahwa pendekatan yang ada saat ini belum cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu memberikan ruang bagi pendidikan seksual yang komprehensif, berbasis nilai budaya dan agama, agar dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah sosial yang semakin kompleks.

Mengabaikan pendidikan seksual justru dapat memperparah masalah yang ada, sehingga sudah saatnya kita mengembangkan pendekatan yang lebih jujur dan berbasis solusi nyata.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 8

**Potret Buram Pendidikan Indonesia 2022  
(Refleksi Memasuki Tahun Baru 2023)**

Sepanjang tahun 2022, dunia pendidikan Indonesia menunjukkan sejumlah kemajuan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan serius. Upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan langkah yang menegaskan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. Program percepatan sertifikasi guru dan pembangunan infrastruktur sekolah juga menjadi bagian dari upaya ini. Namun, di balik progres tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang harus segera diatasi agar pendidikan Indonesia benar-benar dapat berkembang secara optimal.

**Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia**

1. Dampak Pandemi Covid-19  
Pandemi yang berlangsung sejak 2019 hingga 2022 telah mengguncang sistem pendidikan nasional. Ketidaksiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran daring menyebabkan banyak siswa mengalami penurunan pemahaman dan minimnya penguatan karakter. Meskipun teknologi informasi membantu proses pembelajaran, aspek moral dan disiplin siswa cenderung terabaikan dalam sistem ini.
2. Penilaian yang Tidak Akurat  
Sistem evaluasi di banyak sekolah masih cenderung memberikan nilai yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa. Untuk menghindari angka kelulusan rendah, guru sering kali memberikan nilai secara subjektif.

Akibatnya, siswa menjadi kurang termotivasi untuk benar-benar memahami materi pelajaran.

3. Maraknya Kekerasan di Lingkungan Sekolah  
Kasus perundungan (bullying), kekerasan seksual, dan tawuran antar pelajar terus terjadi. Minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan lemahnya regulasi perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.
4. Penyalahgunaan Dana Pendidikan  
Kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri menjadi potret buruk tata kelola pendidikan di Indonesia. Fenomena jual beli kursi di sekolah favorit dan universitas ternama juga masih terjadi, mencerminkan ketimpangan dalam akses pendidikan yang seharusnya adil dan merata.
5. Ancaman Radikalisme di Lembaga Pendidikan  
Beberapa sekolah dan pesantren terindikasi mengajarkan ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah terus melakukan penguatan moderasi beragama untuk mencegah penyebaran paham radikal di dunia pendidikan.
6. Rendahnya Tingkat Literasi Siswa  
Survei internasional menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan berpikir kritis siswa Indonesia masih berada di level rendah. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran serta minimnya kebiasaan membaca di kalangan pelajar menjadi faktor utama permasalahan ini.
7. Problem Guru Honorer dan Sertifikasi  
Masalah kesejahteraan guru honorer masih menjadi isu klasik yang belum terselesaikan. Di sisi lain, program sertifikasi guru yang seharusnya meningkatkan kualitas pengajaran belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

8. Ketidakefektifan Peran Pengawas Sekolah

Fungsi pengawas sekolah sering kali kurang optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Rekrutmen dan sistem kerja pengawas yang kurang transparan menyebabkan lemahnya manajemen sekolah dalam menerapkan inovasi pendidikan.

9. Kurangnya Sosialisasi Kurikulum Baru

Implementasi Kurikulum Merdeka belum berjalan secara merata di seluruh daerah. Banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil, belum siap menerapkannya akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

10. Gagalnya Penerapan Pembelajaran Hybrid

Selama pandemi, model pembelajaran daring diterapkan sebagai solusi, namun setelah pandemi mereda, konsep blended learning gagal diadopsi secara luas. Sebagian besar sekolah kembali ke metode konvensional tanpa mengoptimalkan teknologi yang telah diperkenalkan sebelumnya.

Memasuki tahun 2023, berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia harus segera mendapatkan solusi yang lebih efektif. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat regulasi perlindungan siswa, serta memastikan akses pendidikan yang lebih merata. Anggaran pendidikan juga harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa.

Dengan perbaikan kebijakan yang tepat, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat lebih maju dan mampu mencetak generasi yang berkualitas.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 9

# **Hilangnya Madrasah Kami (Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional)**

Madrasah, pesantren, dan pendidikan agama telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru, pengakuan terhadap eksistensi madrasah semakin meningkat. Pada era awal kemerdekaan, pemerintah mulai memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah negeri. Bahkan, pada tahun 1958-1959, Kementerian Agama memperkenalkan program Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang bertujuan memberikan pendidikan berbasis agama dan ilmu pengetahuan umum.

Seiring berjalannya waktu, regulasi semakin memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1960, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Kebijakan ini semakin dipertegas pada tahun 1975 dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menetapkan bahwa madrasah memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah umum. Hal ini memungkinkan lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum maupun perguruan tinggi negeri. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah penyesuaian kurikulum madrasah agar mencakup 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama.

Posisi madrasah semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. UU ini kemudian diperkuat dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang secara eksplisit mencantumkan madrasah dan pesantren dalam

batang tubuh regulasi pendidikan nasional. Pengakuan ini memberikan jaminan legal bagi madrasah untuk berkembang dalam sistem pendidikan formal di Indonesia.

### **RUU Sisdiknas 2022 dan Ancaman bagi Madrasah**

Namun, munculnya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2022 menimbulkan kekhawatiran karena madrasah tidak lagi disebut secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Dalam draft awal RUU ini, satuan pendidikan hanya dikategorikan berdasarkan jenjangnya tanpa mencantumkan madrasah secara khusus. Nama-nama seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi ini.

RUU ini menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan tetap diakomodasi, tetapi posisinya lebih disamarkan dibandingkan dengan UU Sisdiknas sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa madrasah akan kehilangan statusnya dalam sistem pendidikan nasional dan dapat berdampak pada kebijakan anggaran, pengelolaan tenaga pendidik, serta standar kurikulum yang selama ini telah berjalan.

### **Mengapa Madrasah Harus Tetap Diakui dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Menghapus nama madrasah dari regulasi utama pendidikan nasional dapat dianggap sebagai langkah mundur dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem pendidikan nasional seharusnya tetap memberikan pengakuan yang jelas terhadap madrasah sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Beberapa alasan mengapa madrasah harus tetap dipertahankan dalam sistem pendidikan nasional antara lain:

1. Menjaga Keberlanjutan Pendidikan Islam  
Madrasah telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan di Indonesia dan memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak.
2. Memastikan Kesetaraan dalam Akses Pendidikan  
Dengan pengakuan resmi, madrasah dapat terus mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan yang setara dengan sekolah umum.
3. Menjamin Kualitas Pendidikan Berbasis Keagamaan  
Jika posisi madrasah dalam regulasi pendidikan dilemahkan, ada kemungkinan standar pendidikan berbasis Islam di Indonesia akan terpinggirkan.
4. Menghindari Pengaruh Sekularisasi Pendidikan  
Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai agama dalam pendidikan semakin terancam. Oleh karena itu, penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk menjaga karakter bangsa.

Rencana perubahan dalam RUU Sisdiknas 2022 yang menghilangkan penyebutan madrasah secara eksplisit harus dikaji ulang dengan lebih cermat. Pemerintah sebaiknya tidak mengabaikan sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Regulasi pendidikan harus tetap mempertahankan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional guna menjamin keberlanjutan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.

Menghapus nama madrasah dari regulasi pendidikan bukan hanya akan melemahkan lembaga pendidikan Islam, tetapi juga berpotensi mengikis identitas dan karakter bangsa. Semoga kebijakan pendidikan nasional tetap berlandaskan pada semangat kebangsaan dan keislaman yang seimbang.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 10

## **Pemuda Indonesia, Mana Sumpahmu! (Refleksi Peran Pemuda dalam Sejarah)**

Sejarah telah mencatat bahwa pemuda selalu menjadi motor perubahan dalam perjalanan sebuah bangsa. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia dari berbagai suku dan latar belakang berkumpul untuk merumuskan Sumpah Pemuda, sebuah deklarasi yang menegaskan persatuan dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Gerakan ini menjadi tonggak utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan.

Di berbagai negara, peran pemuda juga terbukti menentukan arah sejarah. Revolusi Prancis, Reformasi di Korea Selatan, hingga gerakan mahasiswa di Amerika Serikat merupakan contoh bagaimana kaum muda berperan sebagai agen perubahan sosial dan politik. Namun, pertanyaannya, bagaimana peran pemuda Indonesia saat ini? Apakah masih sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, atau justru semakin luntur?

### **Tantangan Pemuda Indonesia di Era Modern**

Dalam era digital dan globalisasi, pemuda Indonesia menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Krisis Identitas  
Banyak pemuda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Pengaruh media sosial dan budaya populer global membuat sebagian besar anak muda lebih bangga dengan tren luar negeri daripada warisan budaya bangsa.
2. Minimnya Rasa Nasionalisme  
Nasionalisme bukan lagi menjadi prioritas utama di tengah

gaya hidup yang semakin individualistik. Sikap apatis terhadap isu kebangsaan semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda perkotaan.

3. Maraknya Sikap Konsumtif

Kemajuan teknologi dan era digitalisasi menciptakan generasi yang lebih fokus pada gaya hidup konsumtif dibandingkan produktif. Banyak pemuda lebih tertarik pada tren fesyen, hiburan, dan popularitas media sosial daripada kontribusi nyata terhadap bangsa.

4. Kurangnya Kesadaran Politik

Meskipun pemuda memiliki hak politik yang sama dengan generasi sebelumnya, banyak dari mereka yang kurang peduli terhadap dinamika politik dan kebijakan negara. Partisipasi dalam pemilu dan diskusi kebangsaan masih tergolong rendah dibandingkan jumlah pemilih muda yang cukup besar.

5. Pengaruh Negatif Teknologi

Kemajuan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas justru sering disalahgunakan. Penyebaran berita hoaks, adiksi terhadap gim daring, serta kecanduan media sosial menjadi tantangan serius bagi generasi muda.

### **Menghidupkan Kembali Semangat Sumpah Pemuda**

Untuk menjawab tantangan zaman, pemuda Indonesia harus kembali kepada semangat Sumpah Pemuda yang menitikberatkan pada persatuan, integritas, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air

Nasionalisme dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui simbol-simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan, tetapi juga dengan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

2. Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas  
Pemuda harus menjadi pelopor inovasi di berbagai bidang, baik dalam teknologi, ekonomi kreatif, maupun industri digital yang mampu bersaing secara global.
3. Aktif dalam Kegiatan Sosial dan Politik  
Kesadaran politik harus ditingkatkan agar pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan.
4. Mengedepankan Nilai Gotong Royong  
Budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus terus diperkuat di tengah era yang semakin individualistik.
5. Memanfaatkan Teknologi Secara Positif  
Pemuda harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti edukasi, kewirausahaan, dan advokasi sosial.

Pemuda bukan sekadar kelompok usia dalam statistik penduduk, tetapi adalah harapan bagi masa depan bangsa. Jika Sumpah Pemuda 1928 mampu menjadi titik balik bagi perjuangan kemerdekaan, maka di era modern ini, pemuda harus mampu menjawab tantangan zaman dengan semangat yang sama.

Jadi, wahai pemuda Indonesia, di mana sumpahmu? Sudahkah semangat itu tetap menyala dalam dirimu?

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 11

**Idealisme Omong Kosong**

Idealisme adalah pemikiran yang menempatkan gagasan sebagai esensi tertinggi dalam kehidupan. Dalam dunia ide, kebebasan berpikir memungkinkan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan konsep-konsep tanpa batasan. Ide-ide ini diyakini memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum pragmatis, aturan agama yang mengikat, maupun norma sosial yang kaku. Para penganut idealisme beranggapan bahwa konsep-konsep murni lebih bernilai daripada dogma atau aturan yang membatasi eksplorasi akal.

Dalam perjalanannya, ide-ide murni lahir dari proses berpikir yang panjang dan reflektif, senantiasa dikonfirmasi oleh nurani yang bersih. Semakin luas pemahaman seseorang terhadap suatu konsep, semakin dekat ia dengan esensi ide murni yang bersumber dari akal budi yang tercerahkan. Konsep tentang keadilan, kebenaran, pengabdian, hingga Pancasila sebagai filosofi bangsa, pada dasarnya merupakan hasil dari pemaknaan intelektual yang dalam. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, konsep-konsep ini sering mengalami distorsi, menjauh dari makna awal yang dikehendaki para perumusan awalnya. Akibatnya, muncul fenomena hipokrisi di kalangan pejabat negara, di mana slogan dan prinsip idealisme hanya menjadi sekadar retorika tanpa makna sejati. Inilah yang dikecam oleh para idealis sejati.

**Idealisme Sejati vs. Idealisme Palsu**

Menjadi seorang idealis sejati berarti memiliki komitmen kuat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, meskipun menghadapi konsekuensi berat. Mereka yang tetap mengatakan kebenaran meskipun berisiko tersingkir, adalah representasi idealisme sejati. Di Indonesia, beberapa tokoh seperti Hakim

Artidjo, Polisi Hoegeng, Ulama Hamka, dan Proklamator Mohamad Hatta dikenal sebagai sosok yang mempertahankan prinsip dan tidak tergoda oleh kompromi yang melanggar hati nurani.

Sebaliknya, idealisme palsu semakin marak di tengah sistem yang korup. Banyak orang mengumbar kata-kata bijak dan tampak seolah memiliki integritas, namun pada kenyataannya mereka hanya menjadikan retorika sebagai alat pencitraan. Para pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan memanipulasi sistem sering kali mengatasnamakan idealisme, tetapi perilaku mereka justru bertentangan dengan prinsip yang mereka ucapkan. Di berbagai institusi negara, baik kepolisian, pengadilan, kejaksaan, hingga universitas, banyak individu yang berbicara tentang etika dan moralitas tetapi sejatinya mengkhianati prinsip-prinsip tersebut.

Fenomena ini sangat merugikan negara, karena masyarakat kehilangan panutan dan kepercayaan terhadap sistem hukum serta pemerintahan. Ketidakadilan semakin terasa ketika para pejabat korup mendapatkan perlakuan istimewa, sementara rakyat kecil harus menerima sanksi berat atas pelanggaran yang jauh lebih ringan. Sistem hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan justru diperalat demi kepentingan kelompok tertentu.

### **Dampak dan Solusi Mengatasi Idealisme Palsu**

Dampak dari idealisme palsu ini sangat luas, terutama dalam pembentukan karakter masyarakat sebagai warga negara yang baik. Ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pemegang kekuasaan menciptakan ketidakpercayaan dan sikap skeptis terhadap aturan. Bahkan, sering kali hukum dipermainkan demi menyelamatkan pelanggar yang memiliki kekuasaan. Kasus-kasus korupsi yang berakhir dengan remisi atau vonis ringan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa negeri ini mengalami krisis moral dalam birokrasi dan pemerintahan. Hampir setiap

lembaga terseret dalam praktik pelanggaran hukum, dan upaya serius untuk memberantasnya masih minim. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup." Oleh karena itu, fokus utama bukanlah memperkuat lembaga atau institusi, tetapi justru memberdayakan rakyat agar dapat mengawasi kekuasaan dengan lebih efektif.

Penguatan peran masyarakat sipil menjadi kunci untuk menekan perilaku koruptif para pejabat negara. Program-program edukasi dan pemberdayaan berbasis nilai-nilai agama dan moral harus lebih digalakkan. Dalam ajaran Islam, misalnya, konsep makanan halal dan thayyib diyakini berperan dalam membentuk karakter seseorang. Seseorang yang tumbuh dengan harta yang diperoleh secara tidak halal cenderung memiliki kecenderungan koruptif yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Untuk itu, masyarakat harus lebih selektif dalam memilih pemimpin, baik dalam pemilu daerah maupun nasional. Memilih pemimpin yang berasal dari lingkaran keluarga koruptor tanpa mempertimbangkan rekam jejak moralnya hanya akan memperpanjang siklus korupsi di negeri ini. DNA koruptif yang telah tertanam sejak kecil akan terus berulang jika tidak dihentikan dengan pendidikan karakter dan kesadaran moral yang kuat.

Sistem yang baik tidak akan mampu berjalan dengan optimal jika individu di dalamnya masih memiliki mentalitas korup. Oleh karena itu, solusi utama adalah menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, memastikan bahwa pemimpin di semua level memiliki moralitas yang tinggi, serta membangun sistem yang benar-benar transparan dan akuntabel. Dengan demikian, idealisme sejati dapat kembali mendapatkan tempat dalam birokrasi, dan para pemimpin yang berintegritas bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 12

**Ganti Kurikulum: Solusi atau *Problem*?**

Belakangan ini, muncul berbagai pemberitaan mengenai rencana pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan perubahan kurikulum nasional pada tahun 2022. Perubahan kurikulum merupakan bagian dari kebijakan politik pendidikan yang bertujuan untuk memastikan arah pendidikan nasional tetap relevan dengan dinamika zaman, baik dalam skala nasional maupun global.

Meskipun perubahan kurikulum adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan ketika sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, proses pergantian ini sering kali memicu pro dan kontra di masyarakat. Guru, orang tua, dan pelaku pendidikan sering kali merasa resah karena adanya perubahan yang dinilai terlalu cepat dan belum melalui kajian mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah perubahan kurikulum yang dilakukan benar-benar menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru.

**Perubahan Kurikulum dalam Perspektif Teoretis**

Dalam kajian kurikulum, Peter F. Oliva dalam bukunya *Developing the Curriculum* (2013) menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan hal yang tak terelakkan. Kurikulum selalu mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum tidak hanya merefleksikan keadaan suatu masa tetapi juga menjadi produk dari perubahan sosial dan kebijakan pendidikan yang terjadi.

Namun, perubahan kurikulum yang terlalu sering dan tanpa evaluasi komprehensif justru dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa. Idealnya, suatu kurikulum perlu dievaluasi dalam rentang waktu minimal 10

tahun sebelum diputuskan untuk diganti atau diperbarui. Sayangnya, di Indonesia, pergantian kurikulum sering kali dianggap sebagai kebijakan yang mengikuti perubahan kepemimpinan di kementerian terkait. Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa setiap menteri memiliki kebijakan sendiri tanpa memperhatikan kesinambungan pendidikan nasional.

### **Tantangan dalam Penggantian Kurikulum**

Beberapa tantangan utama dalam pergantian kurikulum yang kerap terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya Evaluasi Menyeluruh  
Pergantian kurikulum sering kali dilakukan tanpa kajian mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum sebelumnya. Padahal, evaluasi yang matang sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar membawa dampak positif bagi dunia pendidikan.
2. Minimnya Kesiapan Guru dan Sekolah  
Guru merupakan ujung tombak dalam implementasi kurikulum. Tanpa pelatihan yang memadai, kurikulum baru hanya akan menjadi beban tambahan bagi tenaga pendidik. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung penerapan kurikulum yang baru.
3. Biaya Implementasi yang Tinggi  
Pergantian kurikulum tidak hanya berdampak pada metode pengajaran, tetapi juga memerlukan perubahan pada buku pelajaran, sistem evaluasi, serta infrastruktur pendidikan. Hal ini membutuhkan anggaran besar yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat membebani keuangan negara maupun masyarakat.
4. Kebingungan di Kalangan Peserta Didik  
Seringnya perubahan kurikulum membuat siswa harus beradaptasi kembali dengan sistem pembelajaran yang baru. Hal ini dapat mengganggu proses belajar dan mengakibatkan kesenjangan pemahaman antar generasi siswa.

## **Solusi untuk Pergantian Kurikulum yang Lebih Efektif**

Agar pergantian kurikulum tidak menimbulkan polemik dan dampak negatif, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. **Evaluasi Berbasis Data dan Penelitian**  
Sebelum mengganti kurikulum, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam dan berbasis data mengenai efektivitas kurikulum yang ada. Kajian ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat.
2. **Pelatihan Intensif bagi Guru**  
Guru harus diberikan pelatihan yang cukup sebelum kurikulum baru diterapkan. Hal ini memastikan bahwa mereka benar-benar memahami konsep dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebijakan baru.
3. **Penerapan Secara Bertahap**  
Alih-alih menerapkan kurikulum baru secara langsung di semua jenjang pendidikan, sebaiknya dilakukan uji coba di beberapa sekolah terlebih dahulu. Jika hasilnya positif, barulah diterapkan secara lebih luas.
4. **Melibatkan Masyarakat dalam Keputusan Pendidikan**  
Kebijakan pendidikan harus dibuat secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Dengan demikian, perubahan kurikulum dapat lebih diterima dan dipahami oleh semua pihak.

Perubahan kurikulum memang diperlukan agar pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Namun, jika dilakukan tanpa persiapan matang dan kajian menyeluruh, perubahan tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kualitas serta keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

## 13

# Mendidik Moral Pancasila untuk Meneguhkan Karakter Islami

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman moral yang membentuk karakter masyarakat. Dalam konteks keislaman, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Islam, seperti ketuhanan, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, mendidik moral Pancasila dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat karakter Islami di tengah masyarakat yang beragam.

Namun, di era modern ini, tantangan dalam menanamkan nilai-nilai moral semakin besar. Globalisasi dan arus informasi yang tak terbendung sering kali membawa pengaruh negatif yang dapat mengikis karakter generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan moral berbasis Pancasila dan Islam menjadi sangat penting untuk menjaga identitas dan integritas bangsa.

### Relevansi Pancasila dengan Nilai-nilai Islam

Setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam, di antaranya:

1. Ketuhanan yang Maha Esa  
Konsep ini sesuai dengan ajaran tauhid dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah dan kewajiban manusia untuk bertakwa kepada-Nya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  
Islam mengajarkan pentingnya menghormati sesama manusia tanpa memandang perbedaan status sosial, ras, atau agama.

3. Persatuan Indonesia  
Prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam) menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun masyarakat yang harmonis.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  
Islam menganjurkan konsep musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan untuk kemaslahatan bersama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
Ajaran Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Dengan melihat keselarasan ini, jelas bahwa mendidik moral berdasarkan Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru, pendekatan ini dapat menjadi jembatan untuk memperkuat karakter Islami dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Strategi Pendidikan Moral Berbasis Pancasila dan Islam**

Agar nilai-nilai Pancasila dapat tertanam kuat dalam karakter Islami, diperlukan pendekatan pendidikan yang efektif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan  
Mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam harus diajarkan secara seimbang dan saling melengkapi.
2. Keteladanan dari Pemimpin dan Tokoh Masyarakat  
Para pemimpin, guru, dan orang tua harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penerapan dalam Kehidupan Sosial  
Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan keadilan harus ditanamkan melalui kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.

4. **Memanfaatkan Teknologi secara Positif**  
Media sosial dan platform digital harus dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten edukatif yang menanamkan nilai-nilai moral.
5. **Pendekatan Kultural dan Kearifan Lokal**  
Pendidikan karakter harus disesuaikan dengan budaya setempat agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

### **Tantangan dalam Mendidik Moral Pancasila**

Meskipun pendidikan moral berbasis Pancasila memiliki banyak manfaat, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. **Krisis Moral di Kalangan Generasi Muda**  
Perilaku seperti hedonisme, individualisme, dan sikap apatis terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin meningkat.
2. **Minimnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Karakter**  
Banyak institusi pendidikan yang lebih fokus pada pencapaian akademik daripada pembentukan karakter.
3. **Pengaruh Budaya Asing yang Tidak Sesuai dengan Nilai Pancasila**  
Arus globalisasi membawa berbagai budaya yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.
4. **Kurangnya Keteladanan dari Tokoh Publik**  
Banyak figur publik yang justru menunjukkan perilaku tidak etis dan jauh dari nilai-nilai Pancasila dan Islam.

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menguatkan pendidikan moral berbasis Pancasila dan Islam. Dengan pendekatan yang tepat, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan moralitas yang kuat.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

## 14

# **Pendidikan Salah Arah (Respon Terhadap Fenomena Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan)**

Belakangan ini, kasus-kasus yang mencoreng dunia pendidikan kembali mencuat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu jenjang pendidikan, tetapi mencakup tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2003-2020, terdapat laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya dalam rentang waktu 2015-2020. Selama lima tahun tersebut, tercatat sekitar 51 kasus, di mana pelecehan seksual mendominasi dengan angka mencapai 88 persen atau sebanyak 45 kasus, yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan.

Para pelaku berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari guru, kepala sekolah, ustadz, pejabat kampus, hingga dosen. Kasus ini menjadi topik diskusi nasional yang dikaji dari berbagai perspektif. Dari sisi hukum, diperlukan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dari aspek manajemen pendidikan, pengawasan dan pembinaan lembaga pendidikan harus diperketat. Sementara itu, dari sisi kebijakan pendidikan, kasus ini mengindikasikan perlunya perombakan sistem dan paradigma pendidikan agar lebih sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.

Terkait paradigma pendidikan, banyak pakar menyoroti kemungkinan adanya kesalahan arah dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan saat ini lebih berorientasi pada pencapaian materi dan mulai mengabaikan nilai-nilai moral. Model pendidikan yang menitikberatkan pada teknologi dan persaingan di dunia kerja sering kali mengesampingkan aspek afektif dan etika. Teori neurosains yang menekankan

pendidikan berbasis otak (*brain-based education*) semakin mendominasi dunia pendidikan modern, sementara pendidikan berbasis moral dan karakter hanya sebatas teori tanpa implementasi nyata di lembaga pendidikan.

### **Paradigma Mendidik Hati atau Mendidik Otak**

Perdebatan mengenai aspek mana yang lebih penting dalam pendidikan hati atau otak sudah berlangsung sejak lama. Para filsuf pendidikan memiliki pandangan yang beragam mengenai tujuan utama pendidikan. Kaum intelektualisme menekankan pentingnya daya nalar dan rasionalitas. Pendukung pragmatisme menganggap bahwa pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan tantangan kehidupan. Sementara itu, penganut humanisme lebih mengutamakan penghargaan terhadap harkat hidup manusia sebagai tujuan utama pendidikan.

Ketiga aspek tersebut rasionalitas, keterampilan, dan nilai kemanusiaan pada dasarnya memiliki peran yang sama pentingnya dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, hal ini dikenal dengan teori taksonomi Bloom yang membagi tujuan pendidikan ke dalam tiga ranah: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap moral), dan psikomotorik (keterampilan). Para pendidik memahami bahwa ketiga aspek ini harus dikembangkan secara seimbang. Namun, dalam praktiknya, pendidikan lebih menitikberatkan pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan moral masih sering terabaikan. Ketimpangan inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya berbagai kasus pelanggaran moral di lembaga pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan hati dan akhlak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar penguasaan ilmu pengetahuan. Kesucian hati dan adab yang baik mencerminkan tingkat keilmuan seseorang. Sebaliknya, seseorang yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak yang baik dianggap belum mencapai derajat keilmuan yang hakiki. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa tujuan utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia (*innama buitstu li utammima makarim al-akhlaq*).

Pendidikan Islam menekankan pentingnya membentuk karakter yang baik, bukan hanya mentransfer pengetahuan semata.

Pendidikan berbasis akhlak tidak bisa hanya diajarkan dalam bentuk teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam tradisional, seperti yang diterapkan di pesantren dan madrasah berasrama, memberikan pelatihan kepada santri untuk mengendalikan diri dan memperkuat karakter melalui bimbingan langsung dari para ulama, kyai, dan ustadz yang menjadi teladan.

### **Reorientasi Pendidikan Nasional Berbasis Nilai**

Secara regulatif, sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya telah memberikan porsi yang cukup bagi pendidikan karakter. Penguatan nilai-nilai moral di sekolah serta penegasan Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional telah tercantum dalam berbagai kebijakan. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi pendidikan nilai di sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan kompetensi guru dalam mendidik siswa mengenai nilai-nilai moral.

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Sayangnya, aspek ini sulit diukur secara objektif saat proses seleksi guru. Akibatnya, masih banyak pendidik yang kurang memiliki kecerdasan emosional dan moral yang baik, namun tetap diterima sebagai tenaga pengajar.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap etika pendidik juga memperburuk kondisi ini. Tanpa adanya sanksi yang tegas, perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan dapat terus terjadi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi kepribadian dan sosial guru harus menjadi prioritas dengan mekanisme pembinaan yang lebih jelas dan terukur. Saat ini, sistem pengawasan lebih menitikberatkan pada aspek akademik dan pedagogik, sementara aspek kepribadian dan etika belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan juga tidak boleh diabaikan. Orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Lingkungan keluarga yang kuat dalam nilai-nilai agama dan moral akan berkontribusi pada pembentukan karakter anak di sekolah. Meningkatnya kasus pelanggaran moral di lembaga pendidikan juga menjadi indikator bahwa nilai-nilai agama dalam keluarga mulai melemah.

Diperlukan sinergi antara tiga pusat pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pendidikan berbasis nilai dan karakter. Dengan pendekatan yang lebih efektif, pendidikan di Indonesia tidak hanya akan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Wallahu a'lam bi al-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 15

**Membangun Harmoni Melalui Pendidikan Moderasi**

Konsep harmoni memiliki makna yang sepadan dengan kerukunan, kedamaian, serta sikap saling menghargai di tengah perbedaan. Perbedaan dalam agama, bahasa, suku, dan golongan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi terciptanya hubungan yang harmonis di antara sesama warga negara. Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia dihuni oleh masyarakat yang memiliki keberagaman budaya sejak awal berdirinya. Slogan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa untuk tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan.

Keragaman budaya yang berkembang di Nusantara harus disikapi sebagai anugerah. Keanekaragaman ini perlu dijaga dan dilestarikan, bukan justru dihilangkan atau diabaikan. Upaya untuk menyingkirkan unsur budaya yang telah lama ada dalam suatu komunitas merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai kebhinnekaan. Bahkan, dalam perspektif agama, sikap menolak keberagaman budaya bertentangan dengan konsep rahmatan lil 'alamin.

Mengelola perbedaan dalam masyarakat membutuhkan kebijaksanaan yang dapat diperoleh melalui pendidikan. Mendidik seseorang agar memiliki sikap menghormati perbedaan memerlukan strategi dan pendekatan yang tepat. Kesalahan dalam menyampaikan nilai-nilai kebersamaan dalam konteks multikulturalisme dapat menghasilkan harmoni yang bersifat semu. *Pseudo harmony* atau harmoni semu sering kali muncul akibat pendekatan yang hanya bersifat formal dan politis. Sebaliknya, harmoni yang sejati harus dibangun melalui pendekatan budaya serta kearifan lokal yang tumbuh dalam

masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai kehidupan yang berkembang secara alami.

### **Pemahaman Moderat sebagai Kunci Harmoni**

Moderasi beragama atau sikap keberagamaan yang seimbang semakin sering disosialisasikan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama. Namun, pada dasarnya, konsep ini bukanlah hal baru. Dalam ajaran Islam, terminologi *ummatan wasathan* atau umat yang berada di jalan tengah telah lama dikenal dalam tradisi Nabi Muhammad SAW. Konsep ini mengajarkan keseimbangan dalam beragama agar tidak terjebak dalam sikap ekstrem.

Menurut narasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama bertujuan untuk mencari titik temu (*kalimatun sawaa*) antara dua kutub ekstrem dalam beragama. Kutub pertama adalah kelompok yang menganggap bahwa hanya ada satu cara pandang atau satu metode dalam memahami ajaran agama, sehingga mereka cenderung menyalahkan pandangan lain. Kutub kedua adalah kelompok yang terlalu longgar dalam memahami ajaran agama, sehingga nilai-nilai spiritualitasnya tergerus demi alasan toleransi. Kedua kutub ekstrem ini perlu dijembatani oleh pemahaman agama yang moderat.

Secara bahasa, kata moderasi berasal dari *moderation*, yang berarti tidak berlebihan atau berada di tengah-tengah. Dalam konteks beragama, moderasi merujuk pada sikap menghindari ekstremisme dalam pemikiran, sikap, dan praktik keagamaan. Sikap ini seharusnya dimiliki oleh semua penganut agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lainnya. Semua umat beragama memiliki potensi untuk terjebak dalam sikap ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme, sehingga membangun pemahaman yang seimbang adalah tanggung jawab bersama.

Merebaknya radikalisme yang menyebabkan konflik sosial dan kehancuran infrastruktur menjadi bukti bahwa pemahaman moderasi masih lemah. Padahal, secara substantif,

moderasi beragama merupakan prinsip yang sangat relevan dalam kehidupan bangsa yang multikultural. Sejarah politik Indonesia telah mencatat tarik-menarik kepentingan antara kelompok yang mengusung ideologi berbasis agama dan kelompok yang menolak peran agama dalam politik. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa sikap moderat dalam beragama dan bernegara adalah pilihan yang paling bijak.

Memilih jalan tengah dalam beragama bukan sekadar strategi, tetapi merupakan bagian dari jati diri sebagai warga negara Indonesia. Moderasi beragama dapat menjadi penghubung antara nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan. Bagi masyarakat Indonesia, beragama sejatinya merupakan bagian dari identitas kebangsaan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, moderasi harus menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang damai, toleran, dan harmonis.

### **Pendidikan Moderasi dalam Membangun Harmoni**

Untuk menanamkan sikap moderat dalam diri seseorang, diperlukan sistem pendidikan agama yang mengajarkan konsep moderasi dengan benar. Pendidikan memainkan peran krusial dalam membentuk cara berpikir individu. Jika sistem pendidikan tidak diarahkan dengan baik, maka upaya membangun pemahaman agama yang moderat akan sulit tercapai.

Dalam hal ini, peran guru sangat menentukan. Guru yang kompeten tidak hanya mengajarkan teks agama, tetapi juga mampu menjelaskan konteksnya dengan benar. Sebaliknya, guru yang hanya berfokus pada teks tanpa memahami konteks cenderung melahirkan pemahaman yang sempit. Cara pandang yang kaku terhadap teks suci dapat mengarah pada sikap eksklusif dan berpotensi menumbuhkan radikalisme. Kelompok ekstremis cenderung melihat teks suci sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan tertutup, tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang.

Idealnya, teks agama yang bersumber dari wahyu harus bisa diinterpretasikan sesuai dengan berbagai konteks kehidupan. Literatur keagamaan yang ditulis oleh para ulama terdahulu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan psikologis mereka. Oleh karena itu, jika teks-teks klasik dibaca dalam konteks modern, diperlukan pemaknaan ulang yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Tradisi membaca literatur agama secara luas dan sistematis sangat penting untuk menghindari pemahaman yang sempit.

Kurikulum pendidikan berbasis multikulturalisme juga perlu dikembangkan untuk mempercepat penguatan pemahaman moderasi beragama. Pendidikan multikultural harus diterapkan sejak tingkat dasar dengan berbagai metode yang efektif. Bahkan, pembiasaan sikap saling menghargai sebaiknya sudah mulai diajarkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga. Proses internalisasi nilai-nilai multikulturalisme tidak cukup hanya melalui pendekatan kognitif, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam interaksi sosial yang beragam.

Pesan-pesan mengenai pentingnya moderasi dan multikulturalisme perlu disampaikan di berbagai ruang publik, termasuk di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan forum-forum keagamaan. Masjid, madrasah, majelis taklim, serta institusi keagamaan lainnya harus aktif menyebarkan pemahaman agama yang inklusif dan toleran. Pendidikan tetap menjadi sektor utama dalam membangun harmoni sosial, meskipun peran keluarga dan masyarakat tetap tidak boleh diabaikan.

Saat ini, munculnya kelompok yang memiliki cara pandang sempit dan intoleran terhadap perbedaan merupakan tantangan besar bagi pendidikan multikultural di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan desain program yang lebih strategis dan efektif untuk menanamkan pemahaman tentang keberagaman budaya, hak asasi manusia, serta penghapusan prasangka sosial. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat hidup dalam suasana yang lebih adil, beradab, dan sejahtera, baik lahir maupun batin.

## 16

# Perundungan dan Tradisi Pendidikan Islam

Masyarakat pendidikan di Sumatera Selatan dikejutkan oleh berita mengenai kasus perundungan santri di salah satu pesantren di Prabumulih (Tribune Sumsel, 9/9/2021). Kasus ini menjadi perbincangan luas karena tersebar melalui media daring dan bahkan dibahas dalam sebuah diskusi langsung di platform media massa *Online* di Sumatera Selatan. Terlepas dari simpang siur penyebab kematian santri tersebut, kejadian ini menyoroti realitas pola pendidikan yang masih mengandung unsur kekerasan fisik dan psikologis, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak di dunia pendidikan.

Kasus kekerasan di pesantren bukanlah hal baru di Indonesia. Belum lama ini, kejadian serupa terjadi di salah satu pesantren di Sumatera Utara (Kompas, 10/6/2021). Di Demak, seorang pengasuh pesantren melakukan tindak kekerasan terhadap santrinya akibat pelanggaran aturan pondok (Kompas, 5/9/2021). Kasus lain terjadi di Mojokerto, di mana santri senior menganiaya santri junior karena melanggar tata tertib dengan keluar pesantren tanpa izin (detik.com, 25/07/2019). Sementara itu, di Pondok Pesantren Urwatul Qutso Jombang, hukuman cambuk diterapkan kepada santri yang melakukan pelanggaran berat, seperti mengonsumsi minuman keras dan perbuatan zina, berdasarkan aturan syariat Islam (sindonews.com, 8/12/2014).

Kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan cukup sering terjadi di Indonesia, baik di pesantren maupun di lembaga pendidikan lainnya. Fenomena ini patut dikaji lebih dalam karena melibatkan institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai pendidikan yang ideal. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

melaporkan bahwa pada periode 2017-2019, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di pesantren cukup tinggi, meskipun tidak semua kasus dilaporkan ke KPAI (Republika.co.id, 14/1/2020). Jika lembaga pendidikan Islam justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, perlu ditelaah lebih jauh bagaimana seharusnya konsep pendidikan pesantren dijalankan sesuai regulasi dan tradisi pendidikan Islam yang sesungguhnya.

### **Pendidikan Islam: Regulasi, Konsep, dan Tradisi**

Dalam regulasi pendidikan nasional, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan bahwa pesantren memiliki fungsi utama sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap proses pembelajaran di pesantren harus mencerminkan prinsip pendidikan yang ramah anak. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan juga menggarisbawahi bahwa segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan berpotensi menyebabkan trauma psikologis bagi peserta didik.

Dalam konsep pendidikan Islam, proses belajar tidak hanya bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk adab (*ta'dib*). Lingkungan pendidikan Islam menekankan pentingnya rasa hormat, kepedulian, serta penghormatan terhadap ilmu dan para pengajarnya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan agar orang muda menghormati yang lebih tua dan orang tua menyayangi yang muda telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan Islam sejak lama.

Dalam teori pendidikan, konsep penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) merupakan hal yang lumrah. Santri yang menunjukkan prestasi harus diberikan apresiasi, sementara mereka yang melanggar aturan perlu dikenai sanksi. Namun, bentuk hukuman dalam pendidikan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip humanisme dan tidak boleh mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikologis.

Pendekatan modern dalam pendidikan, seperti teori *neuroscience approach*, menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Oleh karena itu, kondisi belajar yang kondusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peserta didik dapat menyerap ilmu dengan optimal. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung, termasuk dalam pola komunikasi yang baik.

Dalam kitab *Ta'lim al-Muta'alim Thariqat Ta'alum* karya Imam Az-Zarnuji, adab dalam pembelajaran sangat ditekankan. Sikap hormat dan penghormatan terhadap ilmu serta guru menjadi nilai utama dalam tradisi pendidikan Islam. Bahkan, seorang murid tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat tanpa menghormati ilmu dan pengajarnya. Adab ini berlaku dua arah: murid harus menghormati guru, dan guru pun harus menunjukkan keteladanan dengan karakter yang baik.

Kitab *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* yang ditulis oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan Imam Nawawi juga menegaskan bahwa adab memiliki kedudukan lebih tinggi daripada ilmu. Kitab ini mengajarkan prinsip bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai-nilai (*transfer of values*). Dalam tradisi pendidikan Islam, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter santri, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Kasus perundungan yang terjadi di pesantren mencerminkan bahwa masih ada pengelola dan santri yang belum memahami pentingnya nilai-nilai moral dalam pendidikan.

### **Reorientasi Pendidikan Pesantren**

Pada awalnya, pesantren didirikan sebagai lembaga untuk mencetak kader ulama dan penyebar ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam (*tafaquh fi al-din*). Para santri diharapkan menjadi calon ulama yang memiliki integritas akademik dan moral yang tinggi. Namun, orientasi ini mulai

bergeser. Saat ini, banyak orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren bukan untuk mendalami agama, tetapi sebagai solusi bagi anak-anak yang dianggap memiliki masalah kedisiplinan. Sayangnya, pola pendidikan yang dahulu berhasil membimbing anak-anak dengan pendekatan moral kini justru tergantikan oleh pola pendidikan yang lebih keras, bahkan disertai unsur kekerasan.

Selain itu, konsep keberkahan yang dahulu sangat melekat dalam pesantren kini mulai tersisih oleh motivasi bisnis pendidikan. Modernisasi pesantren yang digalakkan saat ini justru membawa dampak negatif yang tidak disadari. Banyak pesantren yang mulai bergeser menjadi institusi pendidikan yang lebih berorientasi pada persiapan dunia kerja, sehingga aspek moralitas tidak lagi menjadi prioritas utama.

Pendidikan berbasis kecakapan hidup (*life skill*) memang penting dalam sistem pendidikan pesantren. Namun, jika orientasi moral religius mulai terabaikan, maka pesantren kehilangan esensinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Dulu, karakter santri terbentuk melalui keteladanan para kyai dan pengasuh pesantren yang menjadi panutan dalam adab dan akhlak. Hubungan antara santri dan kyai yang penuh penghormatan menjadi bagian dari proses pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter santri secara menyeluruh.

Meskipun masih banyak pesantren di Indonesia yang tetap mempertahankan nilai-nilai pendidikan Islam yang autentik, modernisasi pesantren juga membawa tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya untuk menjaga keseimbangan antara inovasi pendidikan dan pelestarian nilai-nilai moralitas. Konsep keberkahan, penghormatan terhadap guru, serta nilai-nilai etika dalam pendidikan harus tetap dipertahankan agar pesantren tetap menjadi lembaga yang dapat membentuk individu yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus integritas moral yang tinggi.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi, pesantren perlu melakukan reorientasi peran agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual Islam, tanpa mengabaikan perkembangan teknologi. Mengombinasikan teori pendidikan modern dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam berbasis nilai-nilai humanisme dapat menjadi solusi untuk membentuk santri yang unggul secara akademik dan moral.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 17

## **Membebaskan Pendidikan dari Belenggu Kebudayaan Asing (Refleksi Menyambut HUT RI Ke-76)**

Dalam kajian politik pendidikan, kebijakan pendidikan di suatu negara tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh ideologi tertentu. Ideologi-ideologi besar dunia seperti kapitalisme, sekularisme, liberalisme, dan komunisme selalu mencari cara untuk memperluas pengaruhnya. Pendidikan menjadi pintu masuk yang strategis dalam penyebaran ideologi-ideologi tersebut. Sejak masa kemerdekaan, kebijakan pendidikan nasional Indonesia berakar pada ideologi Pancasila. Sebagai dasar pembangunan pendidikan, Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh konsep dan praktik pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila secara utuh dalam kehidupan akademik.

Setelah 76 tahun merdeka, perlu dikaji apakah sistem pendidikan Indonesia telah sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya. Bung Karno pernah menyatakan bahwa *Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang selama berabad-abad terpendam akibat pengaruh kebudayaan Barat*. Pancasila bukan hanya sekadar falsafah negara, tetapi juga merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Konsep pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak sejalan dengan sistem pendidikan yang berkembang di Barat. Oleh karena itu, jika unsur-unsur kebudayaan Barat telah meresap dalam konsep dan praktik pendidikan nasional, maka langkah-langkah pembebasan pendidikan dari dominasi kebudayaan dan ideologi Barat perlu segera dilakukan.

## **Membebaskan Pendidikan dari Dominasi Ideologi Asing**

Salah satu bentuk ideologi asing yang mempengaruhi pendidikan Indonesia adalah sekularisme, komunisme, dan kapitalisme pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekularisme adalah ideologi Barat yang mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dalam sistem pendidikan. Pendidikan sekuler tidak berorientasi pada penguatan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Sementara itu, kapitalisme dalam pendidikan mendorong persaingan bebas tanpa kontrol, yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Sistem kapitalisme memungkinkan hanya individu dengan modal besar yang bisa mengakses pendidikan berkualitas, sementara kelompok masyarakat kurang mampu semakin sulit mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Secara kultural, bangsa Indonesia tidak memiliki akar ideologis pada sekularisme, komunisme, maupun kapitalisme. Masyarakat Indonesia secara turun-temurun menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menjadikannya sebagai bagian integral dalam pendidikan. Mata pelajaran agama tetap menjadi bagian utama dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran yang mengesampingkan pendidikan agama di sekolah merupakan gagasan yang tidak sesuai dengan karakter dan nilai-nilai yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ajaran agama yang murni tidak akan pernah bertentangan dengan prinsip kemajuan dan kesejahteraan peradaban mana pun. Di Indonesia, nilai-nilai agama yang bersifat universal justru menjadi inspirasi dalam pembentukan Pancasila serta membangun konsep negara bangsa (*nation state*) tanpa perlu dipertentangkan dengan ajaran agama.

Sejumlah analisis menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia telah banyak terpengaruh oleh kebudayaan Barat yang berakar pada ideologi sekularisme, kapitalisme, dan komunisme. Salah satu indikasinya adalah munculnya kebijakan pendidikan yang tidak lagi menempatkan agama dan nilai-nilai moral sebagai inti pendidikan. Penelitian

Irwan Abdullah (2021) mengungkap bahwa kebijakan pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja, pengembangan keterampilan motorik, dan *life skills* memiliki potensi untuk menyebabkan degradasi moral dalam dunia pendidikan. Beberapa dampak dari degradasi moral ini adalah semakin maraknya perilaku tidak sopan, rendahnya rasa saling menghargai, meningkatnya intoleransi, serta menurunnya kepedulian sosial. Ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan nilai-nilai karakter dapat dilihat dari kebijakan evaluasi pendidikan melalui konsep EBTANAS, UAN, dan UN yang hanya mengukur capaian akademik berbasis pengetahuan.

Beberapa kebijakan kontroversial yang muncul dalam sistem pendidikan, seperti isu penghapusan frasa agama dalam dokumen *road map* Kemendikbud 2021-2035 dan penghilangan materi tentang jihad serta khilafah dalam kurikulum pendidikan agama Islam, menunjukkan adanya pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ideologi sekuler dan komunisme pada dasarnya menolak keterlibatan agama dalam pengelolaan negara. Sementara itu, ideologi Pancasila justru memberikan ruang bagi agama untuk berkembang dalam sistem pendidikan nasional. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pendidikan masih memerlukan kajian lebih mendalam agar tidak menyimpang dari filosofi dasarnya.

### **Reorientasi Pendidikan Nasional**

Sejak awal kemerdekaan, Ki Hadjar Dewantara telah merancang konsep pendidikan nasional melalui tiga prinsip utama: *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi teladan), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah membangun semangat), dan *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan). Ketiga konsep ini selaras dengan teori besar dalam pembelajaran, yakni behaviorisme (pembentukan karakter), kognitivisme (pengembangan pemikiran), dan konstruktivisme (pembangunan pemahaman), yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mendidik peserta didik.

Gagasan pendidikan Ki Hadjar Dewantara telah dibukukan dalam dua bagian utama, yakni konsep pendidikan dan konsep kebudayaan. Karya ini pertama kali diterbitkan oleh percetakan Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 1962 dan menjadi inspirasi dalam penamaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep yang dikembangkan oleh Ki Hadjar seharusnya menjadi acuan dalam membentuk kebijakan pendidikan nasional di era modern.

Dalam bukunya, Ki Hadjar menekankan pentingnya ilmu adab, sistem pendidikan berbasis asrama (boarding school), pendidikan seni, pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, dan ilmu psikologi. Gagasannya sangat futuristik dan berorientasi pada masa depan. Konsep pendidikan berbasis asrama yang kini banyak diterapkan dalam sekolah-sekolah terpadu modern sebenarnya telah lama dirumuskan oleh Ki Hadjar. Bahkan, konsep pembelajaran *learning is fun* yang sukses diterapkan di Finlandia sejatinya telah diwujudkan oleh Ki Hadjar melalui sistem pendidikan Taman Siswa. Ia berpendapat bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan, bukan sekadar institusi yang membebani siswa dengan teori tanpa makna.

Sistem pendidikan di Indonesia harus dibebaskan dari dominasi ideologi dan kebudayaan asing yang hanya berfokus pada materialisme, tetapi mengabaikan aspek spiritual dan moral. Paradigma pendidikan yang hanya menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan keterampilan dunia kerja tanpa memperhatikan aspek religiusitas serta karakter bangsa merupakan bentuk penyimpangan dari ideologi Pancasila.

Momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap sistem pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai asli Indonesia. Dengan kembali mengacu pada khazanah pendidikan yang autentik dan berakar pada budaya bangsa, Indonesia dapat menciptakan generasi penerus yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Semoga!

## 18

***Learning Loss* dan Gagalnya Fungsi Sekolah di Masa Pandemi**

Istilah *learning loss* saat ini sangat populer dan digunakan untuk menggambarkan hilangnya pengalaman belajar di sekolah akibat absennya pembelajaran tatap muka. Sejak pandemi COVID-19 melanda dua tahun lalu, sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Pemerintah kemudian mengadopsi kebijakan pembelajaran dari rumah melalui sistem daring sebagai solusi. Sepintas, kebijakan ini tampak sejalan dengan konsep *Merdeka Belajar* yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, konsep ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memperoleh ilmu dari berbagai sumber di luar kelas dengan memanfaatkan internet dan teknologi digital, sehingga peran guru sebagai satu-satunya sumber belajar mulai bergeser. *Merdeka Belajar* tidak lagi terpaku pada kurikulum formal, melainkan menuntut kreativitas baik dari guru maupun peserta didik dalam mencari dan menyerap ilmu.

Seandainya konsep *Merdeka Belajar* telah berjalan dengan baik, maka pembelajaran daring selama pandemi seharusnya tidak menimbulkan banyak kendala. Namun, kenyataannya, banyak pihak seperti sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua yang mengeluhkan ketidakefektifan serta ketidakteraturan sistem pembelajaran daring. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC, sebanyak 92 persen peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring (Katadata.co.id, 2020). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran daring menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik.

## Gagalnya Fungsi Sekolah di Masa Pandemi

Menurut Peter F. Oliva dalam *Developing Curriculum* (1992), salah satu fungsi utama penerapan kurikulum di sekolah adalah menciptakan interaksi kemanusiaan (*human activity*) di lingkungan pendidikan. Sekolah berperan sebagai wadah bagi peserta didik dan guru untuk berinteraksi secara mendidik. Namun, selama pembelajaran daring, interaksi ini menjadi minim, sehingga peserta didik merasa terasing dari lingkungan pendidikannya. Sebuah survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa dari 60 juta peserta didik di 34 provinsi, 66 persen merasa tidak nyaman belajar dari rumah selama pandemi. Lebih lanjut, 87 persen dari mereka ingin segera kembali ke sekolah untuk belajar secara langsung (Kompas.com). Kondisi belajar yang tidak nyaman seperti ini tentu tidak mendukung efektivitas pembelajaran. Selain itu, dampaknya terhadap psikologi peserta didik juga cukup besar, terutama dalam hal motivasi dan minat belajar yang semakin menurun.

Merujuk pada pemikiran John Dewey dalam *Democracy and Education* (1916), pendidikan bukan hanya sekadar mengembangkan aspek intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan mereka. Sekolah harus menjadi tempat yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka tetap diperlukan, karena banyak aspek non-akademik yang hanya dapat dibentuk melalui interaksi langsung di sekolah. Dengan demikian, kebijakan *Merdeka Belajar* harus mempertimbangkan aspek non-akademik ini, karena pendidikan tidak hanya berorientasi pada pemahaman kognitif semata, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kepribadian.

Salah satu aspek krusial yang terpinggirkan selama pandemi adalah pendidikan karakter. Peserta didik kehilangan kesempatan untuk melihat dan meniru perilaku positif, seperti sopan santun, kerja sama, dan tanggung jawab dalam tugas-tugas sekolah. Keteladanan guru tidak dapat sepenuhnya disampaikan melalui pembelajaran daring. Begitu pula dengan

pengembangan keterampilan praktis yang sulit dilakukan secara *virtual*. Ironisnya, meskipun nilai akademik peserta didik cenderung meningkat selama pembelajaran daring, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap materi pelajaran justru menurun. Fenomena ini dikenal sebagai *pseudo evaluation* atau evaluasi semu, di mana skor hasil belajar meningkat, tetapi kompetensi peserta didik sebenarnya tidak berkembang secara signifikan.

Sebagai respons terhadap situasi darurat pandemi, kebijakan *learn from home* (LFH) yang diterapkan pemerintah dapat dimaklumi. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mengorganisasikan sekolah, guru, tenaga pendidik, serta kurikulum agar tetap efektif dalam kondisi ini. Meskipun tidak semua tujuan pembelajaran dapat dicapai secara sempurna, seharusnya ada upaya untuk meminimalkan masalah yang muncul selama pembelajaran daring. Sayangnya, banyak guru yang tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola kelas daring secara efektif. Kebijakan penggunaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) singkat pun kurang dipahami oleh sebagian besar guru, sehingga mereka tetap mengajarkan kurikulum normal di masa yang tidak normal.

Kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran daring semakin memperburuk efektivitas kurikulum di masa pandemi. Banyak guru yang masih terpaku pada struktur kurikulum lama tanpa melakukan adaptasi yang sesuai dengan kondisi darurat. Sikap ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap perubahan kurikulum, bahkan berpotensi menimbulkan praktik pendidikan yang tidak sesuai (*malpractice*). Sebagai perbandingan, di beberapa negara Eropa yang sering mengalami bencana alam atau cuaca ekstrem, diterapkan sistem *curriculum packages*, yaitu kurikulum darurat yang dirancang lebih fleksibel agar peserta didik tetap dapat belajar dengan nyaman sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Sistem ini juga menerapkan konsep *automatic promotion*, di mana semua peserta didik dinaikkan kelas tanpa tekanan akademik yang berlebihan. Tujuannya adalah menjaga

kesehatan mental peserta didik agar tetap termotivasi untuk belajar.

Di Indonesia, penerapan kurikulum di masa pandemi justru sering menimbulkan tekanan psikologis pada peserta didik. Di beberapa kasus, terutama di Indonesia dan Malaysia, terdapat laporan mengenai peserta didik yang mengalami depresi hingga melakukan tindakan bunuh diri akibat kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring dengan segala keterbatasannya dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Sayangnya, kebijakan pendidikan di masa pandemi terkesan kurang matang dan kurang menyeluruh. Sekolah, guru, dan tenaga pendidik tampak kewalahan dalam menyelenggarakan pembelajaran daring secara efektif. Banyak orang tua dan peserta didik merasa terbebani dengan sistem ini.

Berbagai permasalahan pendidikan selama pandemi menjadi tantangan besar bagi para pembuat kebijakan di negeri ini. Proses rekrutmen guru, serta program pelatihan dan penguatan kompetensi guru harus dievaluasi agar sekolah dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Sekolah dianggap berhasil apabila mampu mengembangkan intelektualitas, moralitas, keterampilan, dan spiritualitas peserta didik secara seimbang. Mengabaikan salah satu aspek ini akan menciptakan potret buruk dalam sistem pendidikan kita. Semoga pandemi segera berlalu agar sekolah dapat kembali menjalankan perannya dalam mendidik generasi bangsa dengan cara yang benar (*logic*), baik (*ethic*), dan indah (*art*).

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

## 19

**Urgensi Pendidikan Agama di Nusantara  
(Respon Terhadap Gagasan Penghapusan  
Frasa Agama dalam Kurikulum)**

Belakangan ini, muncul perdebatan mengenai gagasan menghapus frasa agama dalam kurikulum sekolah dan menggantinya dengan pendidikan akhlak dan budaya. Kontroversi ini bermula dari dokumen Roadmap Pendidikan Nasional 2020-2035 yang tidak lagi mencantumkan frasa "agama" dalam mata pelajaran, melainkan menggantinya dengan "akhlak dan budaya". Jika diterapkan, perubahan ini akan menggeser Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi Pendidikan Akhlak dan Budaya (PAB).

Usulan ini menimbulkan berbagai pertanyaan filosofis, sosiologis, psikologis, dan historis. Apakah ada kajian akademik yang mendalam yang mendukung perubahan ini? Mengacu pada regulasi yang ada, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, frasa agama telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, agama memiliki peran sentral yang tidak dapat direduksi hanya menjadi akhlak dan budaya.

**Posisi dan Tantangan Pendidikan Agama dalam Kurikulum Indonesia**

Dalam teori pengembangan kurikulum, Robert S. Zais (1976) menyatakan bahwa kurikulum harus mempertimbangkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan psikologis yang berkembang dalam masyarakat. Sejak lama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi nilai

ketuhanan. Hal ini tercermin dalam Pancasila, yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional.

Sejarah mencatat bahwa pendidikan agama telah menjadi bagian dari kurikulum sejak era Orde Lama dan semakin diperkuat pada masa Orde Baru hingga saat ini. Secara regulatif, posisi pendidikan agama terus didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Tantangan utama yang dihadapi bukanlah relevansi pendidikan agama itu sendiri, melainkan bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Faktor seperti kualifikasi tenaga pengajar, ketersediaan bahan ajar yang sesuai, serta metode pembelajaran yang inovatif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah.

Pendidikan agama di sekolah juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pendidikan keluarga. Dalam Islam, kurikulum pendidikan agama mencakup aspek Aqidah, Akhlak, Al-Qur'an, Hadits, Tarikh, dan Fikih. Jika PAI digantikan dengan Pendidikan Akhlak dan Budaya, maka cakupan materi agama akan mengalami penyempitan yang signifikan. Padahal, sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahwa kajian agama tidak hanya berfokus pada akhlak, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu yang telah berkembang selama berabad-abad.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum PAI adalah metode pembelajaran yang masih perlu inovasi. Banyak guru masih menerapkan pendekatan konvensional yang kurang menarik bagi peserta didik. Akibatnya, efektivitas pendidikan agama menjadi berkurang. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada peningkatan metode pembelajaran dan kompetensi guru, bukan dengan mengganti frasa agama dalam kurikulum. Pendidikan agama tetap memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral generasi muda Indonesia. Gagasan menghapus frasa agama dalam kurikulum harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek filosofis,

historis, dan sosiologis yang telah mengakar dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah sebaiknya lebih menitikberatkan pada peningkatan efektivitas pembelajaran agama, alih-alih menggantinya dengan konsep yang lebih sempit. Kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat, bukan sekadar pertimbangan politis. Dengan demikian, pendidikan agama dapat tetap menjadi pilar utama dalam membangun bangsa yang berakhlak dan berbudaya.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 20

## Keculusan Yahudi Israel dan Kegagalan Penguatan Karakter Global

Realitas saat ini menunjukkan semakin memburuknya konflik kemanusiaan di Palestina. Agresi militer dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil terus berlangsung tanpa adanya respons konkret dari komunitas internasional, selain kecaman verbal tanpa tindakan nyata. Keberhasilan lobi internasional yang dilakukan oleh Israel untuk memperoleh dukungan atas agresi militernya di wilayah Palestina menjadi gambaran jelas mengenai lemahnya karakter dan prinsip kemanusiaan di tingkat global.

Dalam sejarah konflik kemanusiaan, pertikaian antara Zionis Yahudi dan Muslim Palestina telah berlangsung lama dan seolah menjadi perselisihan berkepanjangan. Bahkan, perkembangan konflik ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda zaman. Berbagai kalangan dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam telah mencoba menganalisis akar permasalahan antara Israel dan Palestina dari aspek politik, sejarah, ekonomi, pertahanan, budaya, hingga keagamaan.

Jika dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi, dan pertahanan, banyak pihak yang menilai kebijakan Israel memiliki posisi yang kuat. Bahkan, terdapat tokoh penting Indonesia yang pernah menerima penghargaan dari Israel dan memiliki pandangan tersendiri mengenai prospek serta kemajuan negara tersebut dalam aspek politik dan ekonomi. Hal ini mendorong gagasan mengenai pentingnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, jika ditinjau dari perspektif moral, etika, dan hak asasi manusia, konflik antara Israel dan Palestina menunjukkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hak

untuk menjalankan ibadah serta kebebasan beragama di Palestina sering kali dihambat oleh kebijakan represif Israel. Ketika kebebasan beribadah di tempat suci dihalangi, kecaman internasional terhadap Israel menjadi konsekuensi yang wajar sebagai respons atas kebijakan yang dinilai arogan dan tidak berperikemanusiaan.

### **Karakter Yahudi, Sentimen Umat Islam, dan Pelemahan Karakter Global**

Dalam literatur Islam, banyak ayat dan riwayat yang menguraikan sifat-sifat tertentu yang disematkan kepada kaum Yahudi, mencakup sifat keras hati, kezaliman, kebiasaan memutarbalikkan fakta, serta sikap tamak dan sombong. Sifat-sifat ini dikaitkan dengan berbagai tindakan yang dilakukan dalam sejarah, termasuk dalam konteks konflik Israel-Palestina saat ini.

Karakteristik yang telah lama dikaitkan dengan bangsa Yahudi ini menjadi salah satu faktor yang membuat konflik mereka dengan Palestina terus berlanjut. Bukti dari sifat-sifat ini dapat ditemukan dalam sejarah panjang pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Israel terhadap berbagai kesepakatan internasional yang dikeluarkan oleh PBB.

Keberhasilan Israel dalam mendeklarasikan diri sebagai negara pada tahun 1948 dan memperluas wilayahnya melalui proses aneksasi yang tidak sah menunjukkan bagaimana diplomasi internasional dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Aneksasi dan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri terus berlangsung, menunjukkan kuatnya pengaruh lobi internasional yang mendukung kolonialisme di wilayah tersebut.

Kaum Muslim di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, telah lama menolak segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap ini didasarkan pada solidaritas keagamaan serta penolakan terhadap penjajahan, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam konstitusi Indonesia. Hubungan

emosional antara masyarakat Indonesia dan Palestina juga memiliki akar sejarah, di mana Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hal ini semakin mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah antara kedua bangsa.

Dari sudut pandang pendidikan karakter, penting bagi umat Islam di Indonesia untuk mempelajari dan menginternalisasi keteguhan serta kesabaran rakyat Palestina dalam menghadapi ketidakadilan. Sebaliknya, perlu juga memahami sifat-sifat yang dianggap negatif dalam berbagai literatur agar dapat menghindari perilaku yang merugikan individu maupun bangsa secara keseluruhan.

Jika mengacu pada teori pendidikan karakter Thomas Lickona dalam *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (1992), karakter seperti mengingkari janji, bersikap keras kepala, dan meremehkan orang lain bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan karakter yang mengajarkan sikap hormat dan tanggung jawab (*respect and responsibility*). Pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral akan menjadi kontradiktif jika melihat ketidakadilan yang terus terjadi di Palestina akibat supremasi diplomasi Israel yang membungkam idealisme internasional terhadap kolonialisme di wilayah tersebut.

Ketidakmampuan negara-negara Arab dan komunitas global dalam mengambil sikap tegas serta tindakan konkret untuk membela Palestina merupakan bukti lemahnya supremasi moral dalam tatanan global. Keberlanjutan dominasi Israel terhadap Palestina bukan hanya menunjukkan kuatnya pengaruh politik dan militer mereka, tetapi juga mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

### **Sikap dan Langkah yang Harus Ditempuh**

Sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia terutama umat Islam perlu menyikapi konflik Israel-Palestina dengan cara yang lebih konstruktif. Salah satu langkah yang

dapat diambil adalah mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, empati, serta kepedulian sosial. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas agar generasi mendatang tidak terjebak dalam praktik korupsi, penindasan, dan ketidakadilan yang dapat merusak tatanan sosial.

Menolak segala bentuk perilaku tidak etis seperti korupsi, penindasan, egoisme, serta ketidakadilan merupakan langkah strategis untuk membentuk bangsa yang bermartabat. Dengan menghindari sifat-sifat negatif yang dikaitkan dengan tindakan yang tidak adil, Indonesia dapat memperkuat identitas nasionalnya serta berperan lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan di tingkat global.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

**21****Komunisme dan Kurikulum di Indonesia**

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan ideologi komunisme, yang beberapa kali menimbulkan konflik dan kekerasan di tanah air. Salah satu peristiwa yang paling dikenang adalah insiden tahun 1965, yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (Gestapu), di mana beberapa jenderal TNI menjadi korban. Setelah peristiwa tersebut, ideologi komunis dilarang dan dibubarkan melalui TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966, yang secara resmi melarang penyebaran serta pengembangan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme di seluruh Indonesia.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 1966, ideologi komunis cukup berpengaruh dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan pendidikan. Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana pengaruh komunisme dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam perumusan kurikulum yang diterapkan pada masa lalu.

**Komunisme dan Kurikulum di Indonesia**

Sebagai bagian dari kebijakan publik, kurikulum pendidikan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk alokasi anggaran pendidikan serta arah pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait kurikulum tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik (Appel, 1979; Waring, 1981). Kurikulum yang berlaku tidak hanya mencerminkan kebijakan pendidikan, tetapi juga mencerminkan kekuatan politik yang mendominasi suatu periode tertentu.

Menurut Said Hamid Hasan (2008), perubahan politik yang terjadi pada tahun 1966 membawa dampak besar terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang berlaku saat

itu, yakni Kurikulum 1965, dianggap sebagai kurikulum sementara yang kemudian direvisi untuk menghilangkan unsur-unsur komunisme. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, terdapat ketentuan mengenai kurikulum pendidikan, meskipun konsepnya masih bersifat ideal dan belum dituangkan dalam bentuk kurikulum tertulis.

Salah satu keputusan awal mengenai kurikulum dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Mr. Soewandi, pada tahun 1946. Keputusan ini dimuat dalam *Pewarta PPK* Nomor 2 Tahun 1951 dan menetapkan prinsip-prinsip dasar pengajaran, seperti cinta terhadap alam, bangsa, negara, serta kepatuhan terhadap tata tertib masyarakat. Mata pelajaran pendidikan jasmani dan sejarah ditetapkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, pendidikan agama hanya bersifat opsional, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, yang menyatakan bahwa pelajaran agama hanya diberikan kepada siswa jika mendapat persetujuan dari orang tua mereka.

Dalam pembahasan mengenai undang-undang ini, terjadi perdebatan terkait status pendidikan agama. Beberapa anggota BP-KNIP mengusulkan agar mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, sejarah, dan pendidikan jasmani mendapatkan perhatian lebih besar. Menteri PPK S. Mangunsarkoro menegaskan pentingnya pendidikan agama, sejarah, dan pendidikan jasmani dalam sistem pendidikan nasional. Namun, beberapa tokoh seperti Mr. Kasman Singodimedjo dan Sugondo lebih menekankan pentingnya mata pelajaran sejarah dan kesenian, tanpa menyebutkan pendidikan agama secara khusus.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kurikulum pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya *Manipol Usdek* (Manifesto Politik: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Kebijakan ini berdampak pada revisi kurikulum, sehingga materi ajar harus

disesuaikan dengan prinsip-prinsip *Manipol Usdek*. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 1961, yang menetapkan mata pelajaran baru bernama *Civics*. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia sesuai dengan ajaran *Manipol Usdek* dan menjadi mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan. Konsep ini dinilai banyak mengandung nilai-nilai sosialisme dan komunisme.

Pada masa itu, pemerintah juga mengusung ideologi *Nasakom* (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), di mana komunisme mendapat tempat dalam kebijakan pemerintahan. Namun, setelah *Manipol Usdek* dilarang dan Kurikulum Sementara 1966 diberlakukan, ajaran-ajaran yang mengandung unsur komunisme dihapus. Seiring dengan perubahan politik, kurikulum pendidikan agama semakin diperkuat.

Pemerintahan Orde Baru kemudian menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk menangkal ideologi komunisme. Pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983, yang menetapkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bagian wajib dalam kurikulum.

### **Pengaruh Ideologi dalam Kurikulum Saat Ini**

Seiring berjalannya waktu, kebijakan kurikulum di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pendidikan agama tetap menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun, hilangnya narasi tentang peristiwa pemberontakan PKI dalam kurikulum sejarah yang diajarkan di sekolah menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ideologi komunis masih memiliki pengaruh dalam sistem pendidikan nasional.

Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang mencerminkan arah kebijakan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, perumusan kurikulum harus mempertimbangkan

keseimbangan antara pendidikan nilai, wawasan kebangsaan, dan kebutuhan perkembangan zaman, agar dapat mencetak generasi yang memiliki pemahaman sejarah yang komprehensif serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 22

**Mendidik Karakter Melalui Kecintaan  
(Pesan Maulid kepada Pemuda)**

Tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Umat Islam di Indonesia menyambut hari kelahiran Nabi dengan antusias melalui berbagai ekspresi budaya. Meskipun ada perdebatan mengenai perayaan Maulid yang tidak secara langsung bersumber dari tradisi Nabi, tetapi secara hukum Islam tidak ada larangan eksplisit yang mengharamkannya. Oleh karena itu, perspektif yang lebih bijak adalah melihat tradisi ini dari segi manfaat dan dampak positifnya dalam membentuk karakter serta kecintaan kepada Nabi Muhammad.

Motivasi utama dalam peringatan Maulid adalah sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada Rasulullah. Hal yang dicintai cenderung lebih sering diingat dan dibicarakan. Dalam konteks pendidikan karakter, peringatan Maulid berperan dalam membentuk rasa cinta terhadap sosok Nabi, yang pada akhirnya mendorong umat untuk meneladani akhlaknya. Thomas Lickona (1992) menekankan bahwa rasa hormat (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) adalah dua karakter utama yang dibutuhkan untuk membangun harmoni sosial. Kedua karakter ini dapat tumbuh melalui dorongan emosional yang kuat, salah satunya adalah kecintaan.

**Cinta Nabi dan Pembentukan Karakter**

Para ahli menyatakan bahwa cinta kepada Allah dan kebenaran (*love Allah, trust, reverence, loyalty*) merupakan karakter penting yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kepribadian luhur dan berakhlak baik. Salah satu metode yang efektif dalam membangun karakter adalah dengan pendekatan

berbasis komunitas. Selain lembaga pendidikan formal, keluarga, masyarakat, serta komunitas keagamaan seperti majelis taklim juga berperan dalam membentuk moralitas dan karakter seseorang.

Dalam peringatan Maulid, salah satu bentuk aktualisasinya adalah pembacaan sejarah kehidupan Nabi, mulai dari kelahiran hingga masa kenabiannya. Kegiatan ini secara tidak langsung menjadi sarana pendidikan sejarah yang memberikan wawasan tentang perjalanan hidup Rasulullah serta keteladanannya. Pendidikan sejarah memiliki nilai strategis dalam membangun karakter, sehingga peringatan Maulid dapat menjadi ajang pembelajaran moral dan nilai-nilai luhur yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyajian sejarah kehidupan Nabi, khususnya pada masa remajanya, terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat dijadikan inspirasi bagi pemuda Indonesia dalam mempersiapkan masa depan. Sejarah bangsa Indonesia juga menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam perjuangan nasional, seperti dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak persatuan bangsa. Deklarasi tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa mencerminkan semangat kebersamaan dan penghapusan sekat-sekat primordialisme.

Peringatan Maulid Nabi dan Sumpah Pemuda yang sering berdekatan dalam peringatannya memberikan kesempatan untuk merenungkan makna perjuangan Rasulullah dalam membebaskan masyarakat dari kesukuan yang eksklusif (ashabiyah), yang mirip dengan perjuangan pemuda Indonesia dalam membangun kesatuan bangsa. Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan universal harus diinternalisasi oleh generasi muda agar mereka dapat menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang lebih inklusif dan humanis.

Tantangan bangsa Indonesia saat ini juga merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia. Komitmen kebangsaan

yang telah diwariskan oleh para pendahulu harus terus dipertahankan dan diperkuat melalui berbagai bentuk pendidikan, baik formal maupun non-formal. Komunitas keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya persatuan dan toleransi.

Semangat peringatan Maulid Nabi seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan dan keumatan yang lebih luas. Nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasulullah selalu menekankan kasih sayang dan kedamaian sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamin). Oleh karena itu, peringatan Maulid harus menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih positif dan inklusif.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 23

**Guru: Dulu, Kini, dan Akan Datang**

“Idealnya, hanya guru sejati yang memiliki semangat kebangkitan yang mampu membawa anak didik menuju masa depan yang lebih cerah.” (Ir. Soekarno)

Kutipan di atas berasal dari tulisan Bung Karno dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* yang diterbitkan pada tahun 1959. Dalam pernyataannya, Bung Karno mengungkapkan betapa besar harapan terhadap peran guru dalam membangun bangsa. Guru, sebagai pribadi yang memiliki ilmu dan wawasan luas, berperan sebagai pengantar kemajuan. Negara-negara maju yang kita lihat saat ini adalah negara yang sangat menghargai para pendidik mereka. Sebaliknya, negara yang tertinggal sering kali menyepelekan peran guru dan pendidikan di negaranya.

Secara filosofis, prinsip dasar dalam dunia keguruan tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Guru tetap dituntut untuk bersikap santun, cerdas, sederhana, mengayomi, dan memiliki jiwa pendidik yang sejati. Dalam perspektif teologis, umat Islam telah lama meyakini bahwa guru memiliki peran penting dalam meneruskan tugas kenabian. Ungkapan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi mengisyaratkan bahwa profesi guru memiliki tanggung jawab besar yang harus diemban dengan profesionalisme tinggi. Karakter kenabian yang mencakup kecerdasan (*fathonah*), kemampuan menyampaikan pesan dengan baik (*tabligh*), kejujuran (*shiddiq*), serta amanah, dalam konteks modern tercermin dalam kompetensi guru sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015. Undang-undang ini menegaskan empat kompetensi utama guru, yaitu akademik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan demikian, dari segi esensi,

nilai-nilai keguruan tidak mengalami perubahan dari masa lalu hingga masa depan.

### **Tantangan dan Permasalahan dalam Dunia Keguruan**

Sistem pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar, seperti kualitas input siswa yang belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana, serta persoalan kuantitas dan kualitas guru yang belum tertangani secara sistematis. Komitmen politik dan keseriusan dalam membangun profesi guru secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan masih terkesan lamban dan kurang memiliki arah yang jelas.

Pemberlakuan Kurikulum 2013 (K-13) menjadi salah satu contoh tantangan dalam dunia pendidikan. Implementasinya masih menemui kendala karena adaptasi guru terhadap paradigma baru dalam metode pembelajaran masih berjalan lambat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perekrutan hingga pembinaan dalam jabatan. Program pendidikan guru di LPTK (FKIP, Fakultas Tarbiyah) perlu dikembangkan agar menghasilkan calon guru yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Selain itu, proses seleksi guru harus dilakukan dengan mengutamakan kompetensi dan transparansi, tanpa praktik nepotisme atau suap.

Pembinaan guru dalam jabatan juga harus dirancang secara efektif melalui program pelatihan berbasis *Pedagogical Content Knowledge* (PCK). Berdasarkan penelitian Linda Darling-Hammond, tingkat penguasaan PCK di kalangan guru di Asia Tenggara masih tergolong rendah. Data Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 menunjukkan bahwa dengan standar SKM 55, sebagian besar guru di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, NTB, Sulawesi, dan Papua, masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini perlu segera diperbaiki karena rendahnya kompetensi guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh Kevin Carey dalam *The Education Trust* (2004) menunjukkan bahwa ketika siswa diajar oleh guru yang kurang

kompeten, nilai akademik mereka bisa turun hingga 42 poin dalam mata pelajaran Matematika.

### **Profesionalisme Guru dan Kesejahteraan**

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan mereka. Gaji yang rendah sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan kinerja guru. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia masih jauh tertinggal.

Menurut laporan *The Guardian* (2014), dari 30 negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Swiss merupakan negara dengan gaji guru tertinggi, yaitu sekitar USD 68.820 per tahun atau sekitar Rp 837 juta. Sementara itu, negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Belgia juga memberikan gaji tinggi kepada guru mereka. Di sisi lain, Indonesia berada di posisi paling bawah dengan rata-rata gaji guru hanya sekitar USD 2.830 per tahun atau sekitar Rp 34,4 juta. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat guru honorer di Indonesia yang hanya menerima gaji sebesar Rp 150.000 per bulan. Dengan sistem penggajian yang rendah, sulit mengharapkan profesionalisme guru yang optimal.

Namun demikian, seberapapun kecilnya gaji yang diterima, semangat seorang guru dalam mendidik generasi penerus tidak boleh pudar. Guru tetap harus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Di tangan para pendidiklah nasib bangsa ditentukan. Kinerja guru hari ini akan sangat mempengaruhi wajah bangsa dalam satu atau dua dekade mendatang.

### **Membangun Kualitas Guru di Masa Depan**

Di era modern dan masa yang akan datang, guru harus mampu menampilkan diri sebagai sosok yang memiliki kompetensi paripurna. Hal ini selaras dengan harapan regulasi pendidikan nasional yang menghendaki guru memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan mengajar, kepribadian yang baik,

serta kepedulian sosial yang tinggi. Mewujudkan profesionalisme guru bukanlah perkara mudah, namun peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Regulasi yang dibuat tidak hanya sebatas dokumen, tetapi harus diimplementasikan dengan serius dan terencana.

Desentralisasi pendidikan semestinya menjadikan pemerintah daerah lebih sadar akan pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Tidak boleh ada kompromi dalam peningkatan kualitas guru, mulai dari tahap seleksi, pembinaan, hingga evaluasi kinerja. Guru yang tidak memenuhi standar atau melanggar kode etik harus diberi sanksi tegas, bahkan hingga tahap pemecatan jika diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dikelola oleh tenaga pendidik yang benar-benar kompeten.

Keluhan masyarakat terhadap kinerja guru, pelaksanaan ujian nasional yang tidak efektif, praktik tawar-menawar kursi sekolah, serta sistem rekrutmen kepala sekolah yang sarat dengan kepentingan harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan nasional. Dewan pendidikan perlu berperan lebih aktif dalam mengawasi dan mendorong peningkatan mutu pendidikan di berbagai daerah.

Peringatan Hari Guru Nasional hendaknya menjadi momentum bagi seluruh tenaga pendidik untuk berbenah diri dan meningkatkan profesionalisme mereka. Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, guru harus memiliki orientasi pada kualitas agar dapat mempersiapkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Perbaikan sistem pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Sebab, keberhasilan suatu bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

Selamat Hari Guru, semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

## 24

**Muhasabah Kurikulum 2013  
(Refleksi Tahun Baru 1435 H)**

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membangun tradisi pendidikan jauh sebelum masa kemerdekaan. Sejumlah istilah yang berkembang dalam sistem pendidikan Nusantara, seperti "*cantric*" dalam tradisi belajar masyarakat Hindu yang kemudian bertransformasi menjadi "santri" dalam sistem pesantren, mencerminkan bahwa budaya belajar telah berkembang sejak lama. Dalam hal kurikulum, Indonesia telah menerapkan berbagai konsep dengan fokus yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan dan pengembangan kurikulum (*curriculum development*) merupakan sebuah keniscayaan. Robert S. Zais (1976) dalam *Curriculum Principles and Foundations* menegaskan bahwa kurikulum perlu dikaji secara mendalam dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosial, psikologis, serta organisatoris agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan perspektif ini, tulisan ini berupaya mengkaji kebijakan perubahan kurikulum nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan bangsa Indonesia dalam konteks global sekaligus mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan yang harus dijaga melalui sistem pendidikan.

**Meninjau Kurikulum Holistik 2013**

Secara konseptual (*written curriculum*), Kurikulum 2013 berlandaskan berbagai aliran filsafat pendidikan dan teori psikologi belajar yang kuat. Dari sisi filosofis, kurikulum ini mengadopsi prinsip Humanisme, Perennialisme, Esensialisme, dan Eksistensialisme. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai pendekatan filsafat tersebut memiliki relevansi dalam

kurikulum ini. Dari perspektif psikologi belajar, Kurikulum 2013 merangkul teori Behaviorisme, Kognitivisme, dan Konstruktivisme, yang bertujuan membangun kompetensi siswa dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, kurikulum ini bersifat eklektik, menggabungkan berbagai prinsip dari teori pendidikan yang berkembang.

Kurikulum 2013 memiliki sejumlah ciri khas dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Dari aspek kompetensi lulusan, kurikulum ini bertujuan menghasilkan individu yang memiliki keseimbangan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sisi isi, kurikulum dirancang dengan prinsip relevansi dan kecukupan, serta memuat berbagai materi yang terintegrasi secara holistik. Dalam proses pembelajarannya, pendekatan ilmiah (*scientific approach*) diterapkan, mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran mereka. Sementara itu, dalam hal evaluasi, sistem *authentic assessment* digunakan dengan pendekatan penilaian berbasis tes dan non-tes.

Namun, keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya bergantung pada kekuatan konsepnya, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Para ahli kurikulum menegaskan bahwa kurikulum harus dipandang sebagai satu kesatuan yang mencakup dokumen dan penerapannya. Kurikulum 2013 yang secara konseptual kuat, tetap berpotensi menghadapi tantangan dalam penerapannya, sebagaimana yang telah terjadi dalam kebijakan kurikulum sebelumnya di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pendidikan nasional adalah keterbatasan fasilitas belajar dan masih rendahnya profesionalisme tenaga pendidik. Berdasarkan data, dari 2,7 juta guru di Indonesia, hampir separuhnya belum memenuhi standar kelayakan mengajar. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh pendidik memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti Fakultas Tarbiyah dan FKIP, perlu melakukan evaluasi

kurikulum pendidikan guru agar para calon pendidik dapat menguasai materi dan metode pembelajaran (*pedagogical content knowledge*) dengan lebih baik.

## Refleksi Pendidikan

Salah satu aspek menarik dalam Kurikulum 2013 adalah penekanan pada ranah sikap (*affective domain*), terutama di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Fokus pada pembentukan karakter ini memberikan harapan bagi lahirnya generasi Indonesia yang memiliki kepribadian kuat dan matang. Sejumlah penelitian internasional mengungkapkan bahwa dalam era modern, kecerdasan emosional (EQ) lebih berperan dalam menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ). Diketahui bahwa 80 persen kesuksesan individu dalam karir dan kehidupan ditentukan oleh sikap dan karakter mereka, sedangkan kecerdasan akademik hanya menyumbang sekitar 20 persen.

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di sekolah harus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai moral dan etika dalam diri siswa. Oleh karena itu, keteladanan dari para pendidik menjadi kunci utama dalam membentuk karakter peserta didik. Perilaku tidak terpuji di lingkungan pendidikan harus diminimalisir agar tidak menjadi contoh buruk bagi siswa. Kasus kekerasan oleh guru, kecurangan dalam ujian nasional, serta fenomena buku ajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral harus segera diatasi. Begitu pula dengan praktik jual beli kursi sekolah, pungutan liar, manipulasi anggaran pendidikan, dan tindakan tidak etis lainnya yang merusak integritas dunia pendidikan.

Jika Kurikulum 2013 benar-benar diimplementasikan sesuai dengan konsepnya, maka seharusnya mampu membawa perubahan positif bagi wajah pendidikan Indonesia. Pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Semoga!



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 25

### Stop Ujian Nasional?

Saat ini, perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dinilai masih memiliki banyak kendala dalam implementasinya. Setidaknya, di sebelas provinsi terjadi kegagalan dalam menyelenggarakan UN secara serentak. Masalah seperti kebocoran soal, kecurangan peserta, pertukaran paket soal, pengawas yang tidak menjalankan tugas dengan baik, serta kualitas dokumen ujian yang kurang memadai masih sering terjadi.

Kurangnya efektivitas pemerintah dalam mengelola UN yang menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah ini menimbulkan desakan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengundurkan diri atau agar presiden mencopotnya dari jabatan. Namun, permasalahan UN tidak akan terselesaikan hanya dengan pergantian seorang menteri. Masalah ini lebih berkaitan dengan paradigma pemerintah dalam memahami sistem pendidikan, proses pembelajaran, serta metode evaluasi hasil belajar.

Jika merujuk pada pandangan Benjamin S. Bloom dalam taksonomi pendidikan, evaluasi pendidikan seharusnya mencakup tiga ranah utama, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (moral), dan psikomotorik (keterampilan). Sayangnya, UN hanya menilai aspek kognitif, sementara aspek sikap dan keterampilan kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, meskipun ujian merupakan salah satu metode evaluasi, prinsip keadilan dalam pengujian (*fairness*) harus tetap dijaga. Prinsip ini menekankan bahwa setiap peserta ujian harus memiliki pengalaman belajar yang setara. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara siswa di kota besar yang memiliki fasilitas lebih baik dengan siswa di daerah terpencil yang

mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi guru, sarana, maupun lingkungan belajar.

### **Ujian Nasional: Perbandingan dengan Negara Lain**

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh *International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Internet Archive* dari Sharon O'Donnell (2002), hampir seluruh negara Eropa tidak menerapkan ujian nasional di tingkat sekolah dasar, kecuali Italia dan Spanyol. Di Singapura, meskipun terdapat ujian nasional di SD, hasil ujian tersebut tidak menjadi penentu kelulusan ke jenjang sekolah menengah. Di banyak negara Eropa, ujian nasional lebih berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum mereka menentukan jalur pendidikan selanjutnya, apakah akan melanjutkan ke sekolah umum atau sekolah kejuruan.

Di Swiss, tidak terdapat sistem ujian nasional kecuali ujian *Maturitat* yang diikuti oleh siswa berusia 18 tahun sebagai syarat masuk perguruan tinggi. Sementara itu, di Malaysia, ujian di tingkat SD bersifat opsional dan hanya diikuti oleh siswa dari sekolah tertentu untuk keperluan seleksi masuk ke sekolah menengah. Di Filipina, ujian dilakukan di tingkat akhir SMA sebagai bagian dari persiapan masuk perguruan tinggi. Di Tiongkok, sejak tahun 1996, pemerintah menerapkan kebijakan evaluasi hasil belajar bagi siswa yang akan melanjutkan ke SMA dan perguruan tinggi. Namun, ujian tersebut diselenggarakan oleh para guru dan lebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, model UN yang diterapkan di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan sistem evaluasi di negara-negara maju, karena pendekatan dan tujuan mereka dalam evaluasi pendidikan sangat berbeda. Negara-negara tersebut lebih berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui evaluasi yang bersifat formatif, bukan sekadar untuk menilai kecerdasan siswa dan menentukan kelulusan mereka. Jika UN hanya digunakan sebagai tolok ukur kepintaran siswa dan menentukan kelulusan, hal ini justru mengerdilkan makna sejati dari pendidikan, yang seharusnya bertujuan untuk

mendewasakan siswa secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kecerdasan (*multiple intelligences*).

### **Harapan untuk Evaluasi Pembelajaran di Masa Depan**

Secara konseptual, ketika Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau dalam konteks Australia dikenal dengan *School-Based Curriculum Development* (SBCD) diterapkan, seharusnya guru diberikan kewenangan penuh dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, merancang materi ajar, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah dalam mengembangkan sistem evaluasi berbasis desentralisasi. Di beberapa negara seperti Kanada dan negara-negara Eropa, sistem evaluasi dilakukan di tingkat distrik masing-masing.

Selain itu, dalam aspek moralitas, guru seharusnya diberi kepercayaan penuh dalam mengajar, mengevaluasi, serta mengawasi proses pembelajaran tanpa perlu keterlibatan aparat keamanan dan fasilitas militer yang berlebihan. Dari segi anggaran, pendekatan ini lebih efisien, sementara dari sisi pelaksanaan, sistem ini juga lebih efektif. Pemerintah sebaiknya lebih menghargai para guru sebagai tenaga profesional, bukan justru mencurigai mereka dalam pelaksanaan evaluasi. Memberikan kepercayaan penuh kepada guru akan meningkatkan profesionalisme mereka dalam mendidik, melatih, serta mengevaluasi siswa secara lebih objektif dan holistik.

Anggaran pendidikan yang besar seharusnya dialokasikan untuk pembinaan guru serta peningkatan kualitas sarana dan fasilitas belajar, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip *education for all* harus benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh warganya.

Dengan perbaikan dalam sistem evaluasi dan pendekatan pendidikan yang lebih holistik, diharapkan sistem pendidikan

Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencetak generasi yang unggul. Wallahu a'lam.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 26

**Salah Kaprah dalam Kurikulum?**

Setelah dilantik sebagai Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait tantangan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, permasalahan utama terletak pada kompetensi guru yang masih belum optimal secara persentase. Oleh karena itu, menurut Menteri yang memimpin dengan nomenklatur baru ini, fokus utama perlu diarahkan pada penguatan kompetensi guru dengan dukungan fasilitas serta infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Selain itu, posisi kepala sekolah juga dianggap strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini (Sumeks, 27/10/2014).

Anies tampaknya kurang setuju dengan pendekatan perubahan kurikulum yang lebih menitikberatkan pada dokumen tertulis seperti yang sering terjadi di Indonesia. Baginya, implementasi kurikulum yang melibatkan peran aktif guru dan tenaga pengajar di kelas justru harus lebih mendapat perhatian. PENERBITAN BUKU INDONESIA

**Kurikulum yang Keliru: Antara Dokumen dan Implementasi**

Tidak bisa disangkal bahwa pemahaman masyarakat pendidikan di Indonesia masih terpecah dalam melihat kurikulum sebagai sebuah konsep yang utuh. Sering kali, kurikulum dipandang secara terpisah sebagai dokumen tertulis atau sebagai praktik di lapangan. Padahal, kurikulum harus dilihat dalam satu kesatuan yang berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan oleh Peter F. Oliva (1996), di mana di satu sisi terdapat kurikulum sebagai dokumen yang dirancang, sementara di sisi lain ada implementasinya dalam proses

pembelajaran. Oleh sebab itu, tidak bijak jika hanya menyoroti satu aspek tanpa mempertimbangkan keseluruhannya.

Perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia sering kali terkesan kurang terstruktur dan tidak didasarkan pada evaluasi yang komprehensif. Memang, kurikulum perlu terus diperbarui dan dikembangkan agar tetap relevan dengan tuntutan zaman, namun perubahan tersebut harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang. Para ahli kurikulum menyarankan bahwa evaluasi kurikulum sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu minimal sepuluh tahun sebelum dilakukan revisi secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar perubahan kurikulum tidak hanya sekadar tambal sulam atau uji coba, apalagi jika sarat dengan kepentingan politik dan anggaran.

Kurikulum 2013 (K-13) sejatinya telah dirancang dan diujicobakan dalam jangka waktu yang panjang. Banyak guru telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait penerapannya. Oleh karena itu, para pendidik tidak seharusnya kembali dibuat bingung dengan perubahan yang tidak terencana. Secara konsep, K-13 telah dirancang dengan baik, mencakup aspek Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang holistik, konten yang disusun berdasarkan prinsip kesesuaian dan kecukupan, pendekatan pembelajaran berbasis scientific approach, serta sistem evaluasi yang menggunakan authentic assessment. Dengan berbagai keunggulan tersebut, K-13 sebenarnya layak untuk dipertahankan.

Namun, tantangan terbesar dari K-13 bukan pada dokumennya, melainkan pada implementasinya. Faktor utama yang masih menjadi kendala adalah kompetensi guru, ketersediaan fasilitas, serta sistem pengawasan yang belum optimal. Di sinilah relevansi pandangan Anies Baswedan perlu dipertimbangkan, bahwa profesionalisme guru harus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan yang dapat memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Dengan kata lain, peningkatan kualitas guru dan penyediaan sarana pendidikan merupakan bagian dari upaya perbaikan kurikulum.

Jika melihat pengalaman negara-negara maju dengan sistem pendidikan berkualitas tinggi, seperti Finlandia, perubahan kurikulum dalam bentuk dokumen tidak terlalu sering dilakukan. Sebaliknya, mereka lebih berfokus pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Guru di negara tersebut didorong untuk selalu mengacu pada hasil penelitian pendidikan terbaru dan menerapkan metode pembelajaran yang telah teruji. Selain itu, pengajaran di kelas juga berorientasi pada penelitian tindakan kelas (classroom action research) guna mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pembelajaran secara langsung.

### **Menata Ulang Pendidikan Guru**

Dalam konteks pendidikan guru di Indonesia, perlu ada reformasi dalam sistem pembinaan calon pendidik di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Kualifikasi guru dengan level keahlian yang tinggi, termasuk master teacher, harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, sinergi antara institusi pendidikan tinggi penyedia calon guru dan penelitian berbasis riset menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga pengajar yang kompeten.

Shulam Lee (1996) mengkritisi kurikulum pendidikan guru di Indonesia yang dianggap kurang mampu menghasilkan guru profesional karena pemisahan yang tajam antara penguasaan konten akademik (content knowledge) dan kompetensi pedagogik (pedagogical knowledge). Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua LPTK, termasuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, agar dapat merancang kurikulum yang lebih integratif.

Pada pemerintahan yang baru ini, diharapkan ada komitmen nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan yang bersifat holistik dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membenahi sistem pendidikan nasional. Selain itu, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan serta peningkatan kualitas infrastruktur juga harus menjadi prioritas. Semoga semangat perubahan

dapat benar-benar dirasakan hingga ke seluruh pelosok negeri.  
Semoga.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## Haji dan Pembelajaran Kedewasaan Ala Ibrahim

Ibadah haji merupakan salah satu bentuk ritual keagamaan yang unik, melibatkan jutaan umat manusia dalam satu rangkaian proses dan tujuan yang sama, tanpa membedakan strata sosial. Ini adalah pertemuan besar yang luar biasa. Ali Shari'ati mengemukakan bahwa haji memiliki berbagai implikasi, mencakup aspek teologis, psikologis, sosiologis, bahkan politik. Saat para jamaah melaksanakan wukuf di Arafah, situasi ini menyerupai gambaran Padang Mahsyar, di mana manusia kelak akan dikumpulkan untuk menghadapi pengadilan Ilahi.

Wukuf menjadi puncak ibadah haji (*al-hajju 'arafah*), momen di mana seseorang memperoleh kesadaran mendalam tentang jati dirinya dan mengakui posisinya sebagai hamba Allah. Kesadaran ini membentuk pemahaman ma'rifat yang membedakan antara mereka yang telah berhaji dan yang belum. Seorang hamba sejati tidak akan memiliki sifat angkuh, zalim, atau sombong, karena hakikat kehambaannya mengajarkan kepasrahan dan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Inilah salah satu pelajaran utama dari ibadah haji yang dapat diteladani oleh setiap individu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam menegakkan nilai tauhid dalam kehidupan.

### **Ibrahim, Kesalehan Sosial, dan Pembelajaran Kedewasaan**

Menurut Qurays Shihab, nama Ibrahim berasal dari akar kata *Abu Rahm*, yang berarti seorang ayah dengan sifat kasih sayang. Dalam sejarah kenabian, Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok dengan karakter unik, tulus, dan bebas. Salah satu

kebiasaannya adalah menjamu tamu dengan penuh keramahan. Ia bahkan menjemput tamu-tamunya di perbatasan kota dan mengantarkan mereka kembali setelah berkunjung. Keramahan ini mencerminkan kelapangan hati yang luar biasa, sehingga para jamaah haji yang datang ke Mekkah sering disebut sebagai memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Hanya mereka yang memiliki hati yang luas dan penuh kasih sayang yang mampu menyambut tamu dengan keikhlasan.

Secara spiritual, musim haji memberikan kesempatan bagi setiap muslim untuk meraih kemabruran, baik mereka yang berangkat ke tanah suci maupun yang tetap tinggal di tanah air. Semua memiliki peluang yang sama untuk memperoleh kebajikan yang terus dijaga sepanjang hidupnya. Kebaikan yang banyak (*al-mabruur*) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melalui interaksi sosial maupun amal perbuatan yang mendukung kesejahteraan sesama. Bahkan, ada kemungkinan seseorang yang telah menunaikan ibadah haji justru tertolak (*marduud*) jika ia tidak mampu meneruskan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari.

Rangkaian ibadah haji yang berpusat di Baitullah dan Arafah pada hakikatnya juga memiliki makna universal yang meliputi seluruh kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Bagi mereka yang tidak berhaji, disyariatkan ibadah kurban sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Tradisi ini berasal dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih putranya, Ismail, sebagai bukti kepatuhan total kepada Tuhan. Perintah ini tampaknya tidak masuk akal dari perspektif rasional biasa, namun hanya hati yang dipenuhi cahaya keimanan yang mampu menerimanya sebagai bentuk kepasrahan mutlak kepada Sang Pencipta.

Prosesi penyembelihan Ismail bukan hanya sekadar ujian ketaatan, tetapi juga simbol kemenangan Ibrahim dan Ismail dalam mengalahkan ego mereka. Mereka membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah lebih utama daripada kepentingan pribadi. Konteks ini relevan dengan kehidupan sosial saat ini, di mana seorang pemimpin seharusnya memiliki sikap rendah

hati, mampu mendengarkan aspirasi rakyat, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas ambisi pribadi. Sikap arogan, ingin menang sendiri, serta tidak menerima kekalahan yang sering ditunjukkan oleh sebagian elit politik dan pemerintahan kita bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah haji dan kurban.

Pelaksanaan haji dan ibadah kurban setiap tahun seharusnya membangun kesadaran bahwa tidak ada kerugian dalam kesediaan mendengarkan sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Nyatanya, Ibrahim dan Ismail justru memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan setelah melewati ujian besar tersebut. Melalui pengorbanan ini, kita diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai kepasrahan (*al-Islam*), kesalehan sosial (*amanah*), dan ketulusan dalam berbuat baik (*siddiq*). Nilai-nilai profetik ini merupakan inti dari ibadah kurban dan haji, yang seharusnya tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga membentuk karakter manusia yang lebih peduli terhadap sesama.

Jika ibadah haji dan kurban tidak menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, maka bisa jadi hanya euforia sesaat tanpa makna yang mendalam. Haji yang tidak membekas dalam sikap dan tindakan seseorang berisiko tidak menjadi *mabrur*, sementara kurban yang dilakukan hanya sebagai formalitas tidak lebih dari sekadar penyembelihan hewan tanpa esensi. Akibatnya, egoisme tetap merajalela, persoalan sosial semakin kompleks, dan kondisi masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti.

Semoga nilai-nilai haji dan kurban yang kita jalani tahun ini dapat menjadi momentum perbaikan bagi bangsa, sejalan dengan pergantian kepemimpinan negara dalam waktu dekat.

Wallahua'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 28

**Pendidikan Setengah Hati**

Permasalahan pendidikan yang terus dihadapi bangsa Indonesia seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses pendewasaan. Diskusi mengenai pendidikan dalam berbagai aspeknya harus terus dilakukan. Mengacu pada pandangan William N. Dunn dalam *Public Policy Analysis* (2004), isu pendidikan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, terutama terkait implementasi kurikulum, masuk dalam kategori masalah yang kompleks (*ill-structured*). Masalah ini melibatkan banyak pengambil keputusan yang sulit disusun secara konsisten, dengan adanya konflik di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing.

Kurikulum bukan hanya sekadar konsep ideal di atas kertas, tetapi juga harus dipastikan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan karena masyarakat di daerahlah yang menjadi objek langsung dari sistem pendidikan ini. Tanpa keterlibatan berbagai pihak dan hanya mengandalkan instruksi dari pemerintah pusat, sulit memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan secara nasional.

Berbagai permasalahan pendidikan yang disebutkan di atas memerlukan komitmen penuh dari semua pemangku kepentingan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus selaras dengan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah. Inilah yang disebut dengan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, bukan kebijakan yang setengah hati. Kebijakan yang utuh membutuhkan komitmen penuh dari seluruh tingkatan, baik pusat maupun daerah. Namun, yang sering

terjadi adalah kebijakan pendidikan yang terpecah, tidak terkoordinasi dengan baik, dan akhirnya tidak berjalan secara efektif.

### **Mengidentifikasi Akar Masalah Pendidikan**

Profesor Nanang Fattah (2012:30), pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengidentifikasi 13 permasalahan utama dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya kompetensi kepala sekolah, lemahnya organisasi dan komitmen guru, persepsi negatif dari masyarakat, kurikulum yang tidak relevan, konflik politik dan rasial, serta kurangnya fasilitas pendidikan. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara pusat dan daerah, rendahnya mutu guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai juga menjadi faktor yang menghambat kemajuan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbud telah menetapkan standar-standar ideal yang seharusnya dapat diterapkan hingga tingkat daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar fasilitas pendidikan. Banyak sekolah yang kekurangan sarana belajar, bahkan mengalami kerusakan parah akibat kurangnya perawatan. Kinerja birokrasi pendidikan di daerah yang lamban serta penempatan pejabat pendidikan yang tidak berdasarkan kompetensi semakin memperburuk situasi. Hal ini menyebabkan kurangnya pembinaan bagi guru dan kepala sekolah serta lemahnya pengawasan di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Komunikasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan setiap kebijakan pendidikan. Pemerintah pusat tidak boleh membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Daerah juga harus memiliki

data yang akurat mengenai peta permasalahan pendidikan dan memperbaruinya secara berkala agar proses perbaikan dapat dilakukan secara sistematis.

Salah satu contoh kegagalan komunikasi antara pusat dan daerah adalah dalam implementasi Kurikulum 2013 (K-13). Sejak diperkenalkan pada 2013, banyak pihak mempertanyakan kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum ini. Pemerintah pusat tampak begitu yakin bahwa seluruh sekolah telah siap dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Namun, realitasnya, banyak sekolah yang belum siap baik dari segi infrastruktur, tenaga pengajar, maupun materi ajar. Hal ini menyebabkan implementasi K-13 di banyak daerah berlangsung secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang.

Di banyak daerah, K-13 diterapkan di seluruh sekolah tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka. Akibatnya, guru-guru dipaksa mengajar dengan kurikulum yang belum sepenuhnya mereka pahami, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Siswa pun menjadi korban dari kebijakan yang tidak terencana dengan baik ini. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai terkait kurikulum baru, tetapi tetap diharuskan menerapkannya di kelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan.

### **Membangun Komitmen Pendidikan yang Nyata**

Permasalahan dalam sistem pendidikan dapat diselesaikan jika ada komitmen kuat di tingkat daerah. Sebagai contoh, Sumatera Selatan dapat mengambil langkah konkret dalam memastikan kesiapan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh infrastruktur sekolah dalam kondisi baik, fasilitas belajar memadai, guru memiliki kompetensi profesional, buku ajar tersedia dengan cukup, dan rekrutmen tenaga pengajar serta kepala sekolah dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi. Selain itu, anggaran pendidikan harus dialokasikan dengan efektif, serta perlu adanya komitmen kuat

dari seluruh elemen di daerah untuk memajukan pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan adanya komitmen yang kuat, upaya untuk membangun sektor pendidikan dapat berjalan secara nyata, bukan hanya sebatas wacana. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi sekadar rancangan besar di atas kertas yang pada akhirnya tidak dapat diterapkan karena lemahnya dukungan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 29

**Dualisme Kurikulum  
(Ambiguitas Kebijakan Pendidikan)**

Sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar, Menengah Nomor 179342/MPK/KR/2014 mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013, sekolah-sekolah di Indonesia kini menerapkan dua kurikulum secara bersamaan. Kebijakan ini tampak kontradiktif dan mencerminkan ketidakpastian pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan. Menteri Anies memutuskan untuk menghentikan Kurikulum 2013 (K-13) bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkannya selama satu semester dan mengembalikannya ke Kurikulum 2006 (KTSP). Sementara itu, sekolah yang telah menerapkan K-13 selama tiga semester diinstruksikan untuk melanjutkan kurikulum tersebut. Akibatnya, dua sistem kurikulum berjalan secara paralel di berbagai sekolah.

Keputusan ini tampaknya menjadi solusi sementara dalam menghadapi keterbatasan kesiapan sekolah dalam menerapkan K-13, termasuk dalam hal kesiapan tenaga pengajar, ketersediaan buku ajar, serta sarana pendukung lainnya. Jika dilihat dari arah kebijakan pemerintah, tampaknya implementasi K-13 secara menyeluruh di seluruh sekolah di Indonesia akan tetap menjadi tujuan utama setelah kesiapan seluruh sekolah terpenuhi.

Sejak awal penerapannya, sudah ditekankan bahwa K-13 hanya dapat dijalankan jika guru telah mendapatkan pelatihan yang memadai serta buku-buku ajar tersedia secara lengkap. Oleh karena itu, pada awal implementasinya pada tahun 2013, kurikulum ini hanya diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X, dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah dalam pelatihan guru serta ketersediaan sarana pendukung. Seiring berjalannya waktu, program pelatihan dan pengadaan buku ajar seharusnya

dilakukan secara bertahap hingga seluruh sekolah dapat menerapkan K-13 secara nasional. Namun, kenyataannya, setelah satu tahun berjalan, pelaksanaan pelatihan guru berlangsung lambat, dan distribusi buku ajar pun mengalami keterlambatan. Inilah yang memicu penolakan terhadap K-13, karena dalam implementasinya, kurikulum ini menuntut kesiapan yang optimal.

### **Idealisme Kebijakan Kurikulum dan Peran Pemerintah Daerah**

Dalam teori pengembangan kurikulum, sebuah sistem pendidikan harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh, baik dari segi konsep maupun implementasi. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya memiliki desain dan dokumen kurikulum yang baik jika dalam praktiknya mengalami banyak kendala. Evaluasi kurikulum yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa rancangan kurikulum baru dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan permasalahan di lapangan. Kajian kurikulum seharusnya mencakup berbagai dimensi, seperti gagasan, dokumen, proses, dan hasil. Namun, sejauh ini, evaluasi kurikulum di Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Hal ini menyebabkan kebijakan pendidikan sering kali menimbulkan masalah baru dan kegelisahan di masyarakat, termasuk perdebatan yang terus berlanjut terkait ujian nasional.

Dari segi konsep, Kurikulum 2013 sebenarnya memiliki landasan yang kuat dalam filsafat dan psikologi pendidikan. Dibandingkan dengan Kurikulum 2006, K-13 menawarkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek, seperti Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang lebih holistik, konten yang lebih relevan, proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah (scientific approach), serta evaluasi berbasis penilaian autentik (authentic assessment). Uji kelayakan pun telah dilakukan sebelum implementasi. Namun, tantangan utamanya adalah kesiapan sekolah dalam menjalankan kurikulum ini.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Pelatihan guru tidak boleh

hanya sekedar formalitas, tetapi harus benar-benar memastikan pemahaman mereka terhadap paradigma kurikulum serta keterampilan dalam mengajar di kelas. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan K-13 adalah mekanisme penilaian berbasis observasi, di mana guru harus menilai perkembangan sikap dan keterampilan siswa melalui pengamatan dan asesmen kinerja. Tantangan muncul ketika seorang guru harus menilai siswa satu per satu dalam kelas yang jumlahnya mencapai 40 orang. Solusi yang logis adalah memastikan jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 20 orang agar asesmen dapat dilakukan secara optimal. Di sinilah peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan jumlah ruang kelas mencukupi dan sesuai standar.

Dalam meningkatkan fasilitas belajar, pemerintah daerah harus memiliki data yang akurat mengenai kondisi sekolah di wilayahnya. Dengan data tersebut, program pengadaan fasilitas dan ruang belajar dapat dirancang secara sistematis sehingga dalam jangka waktu tertentu, seluruh sekolah dapat memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, delapan standar nasional pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, serta Standar Penilaian Pendidikan, dapat benar-benar diterapkan, bukan sekedar konsep dalam dokumen.

Hingga saat ini, jika kita ingin bersikap jujur, pencapaian terhadap delapan standar nasional pendidikan masih jauh dari ideal. Sebaik apa pun rancangan kurikulum yang diterapkan, akan sangat sulit untuk diimplementasikan jika delapan standar ini belum terpenuhi secara optimal.

Kisruh dalam implementasi K-13 ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk memahami bahwa masalah pendidikan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan pragmatis. Diperlukan perencanaan yang matang, keberlanjutan, serta komitmen yang kuat untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Sangat disayangkan jika kebijakan pendidikan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek atau bahkan sekadar proyek yang tidak memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan menempatkan pengelola pendidikan yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah, pemilihan kepala sekolah pun harus didasarkan pada profesionalisme dan kapabilitas mereka dalam mengelola institusi pendidikan. Semoga pendidikan di Indonesia terus mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya profesionalisme para pelaku pendidikan. Semoga.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 30

**“Kurikulum Darurat” di Masa Corona**

Secara hukum, banyak ahli menolak mengategorikan kondisi pendidikan di Indonesia dan dunia sebagai keadaan darurat. Meskipun proses pembelajaran tetap berlangsung, metode dan implementasinya jauh dari kebiasaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru dan orang tua menghadapi tantangan besar dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa hampir 60 persen anak merasa kesulitan dan tidak nyaman belajar dari rumah karena kurangnya interaksi dengan teman-teman mereka akibat pandemi COVID-19.

Para guru dan orang tua menghadapi kepanikan dalam menyesuaikan diri dengan situasi pembelajaran baru. Kurangnya pemahaman tentang konsep belajar konstruktivisme memperumit situasi. Fenomena unik pun muncul, seperti guru yang mendatangi rumah siswa untuk memberikan pelajaran privat atau sekolah yang memberikan tugas berlebihan sehingga justru membebani siswa. Semua ini terjadi karena belum dipahaminya konsep dan paradigma pembelajaran yang relevan dalam kondisi darurat seperti pandemi ini.

Dalam teori kurikulum, terdapat konsep *package curriculum*, yang menekankan fleksibilitas dalam pemilihan materi dan aktivitas belajar sesuai dengan minat serta kebutuhan siswa. Dengan pendekatan ini, struktur pembelajaran tidak harus mengikuti kurikulum secara kaku seperti dalam kondisi normal. Hal ini juga berdampak pada sistem evaluasi dan kelulusan yang tidak dapat diberlakukan seperti biasa.

## **Konsep *Automatic Promotion*: Model Evaluasi di Masa Pandemi**

Dalam teori evaluasi pendidikan, terdapat model *automatic promotion*, di mana setiap siswa otomatis naik kelas tanpa ada yang tinggal kelas atau tidak lulus. Evaluasi dilakukan secara *authentic* dan berkelanjutan melalui pemantauan proses belajar sehari-hari. Konsep ini telah lama diterapkan di negara-negara maju seperti Belanda, Australia, dan Finlandia. Penentuan jenjang kelas didasarkan pada usia, bukan hasil ujian parsial seperti yang selama ini diterapkan di Indonesia. Jika ada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, mereka akan mendapatkan remediasi yang disesuaikan dengan konsep *mastery learning*.

Model evaluasi ini menuntut penyesuaian dalam desain kurikulum dan konsep pembelajaran. Dalam kondisi pandemi, ketika siswa belajar dari rumah, sekolah dan guru tidak bisa menerapkan paradigma kurikulum dan pembelajaran seperti biasa. Menumpuk tugas sesuai struktur materi dalam kurikulum bukanlah solusi. Sebaliknya, sekolah, guru, dan orang tua harus menjaga semangat belajar siswa agar tetap menyenangkan dan tidak membebani mereka.

Selama pandemi, model pembelajaran yang lebih tepat adalah pembelajaran mandiri, di mana siswa diberikan kebebasan memilih materi sesuai dengan minat mereka. Guru harus memahami dan menerapkan konsep *package curriculum* dengan baik. Tugas yang diberikan kepada siswa pun sebaiknya berbasis minat dan kebutuhan mereka. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan melalui penilaian portofolio yang lebih relevan dalam kondisi ini. Dengan pendekatan ini, hasil belajar siswa tetap dapat diukur tanpa harus menggunakan metode evaluasi konvensional yang bisa saja tidak efektif dalam situasi pandemi.

## **Paradigma Baru dalam Pembelajaran**

Pembelajaran seharusnya menjadi proses yang menyenangkan, bukan beban yang membuat siswa merasa jenuh atau tertekan. Jika sistem pendidikan tidak menyesuaikan diri, maka semakin

banyak siswa yang kehilangan motivasi belajar. Konsep pendidikan yang telah lama digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara memandang sekolah sebagai taman belajar yang nyaman dan menyenangkan. Perspektif dan pola pikir yang tepat akan menghasilkan metode pembelajaran serta sistem evaluasi yang sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dari sudut pandang futuristik, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bagi sistem pendidikan Indonesia. Selama bertahun-tahun, dunia pendidikan di Indonesia seolah menjadi ajang eksperimen tanpa akhir dengan berbagai perubahan kurikulum yang seringkali membingungkan. Namun, konsep *Merdeka Belajar* yang dicanangkan pemerintah justru menemukan momentumnya dalam situasi ini. Siswa kini memiliki kebebasan untuk belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia.

Di sekitar mereka, terdapat banyak peluang belajar yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman bermakna. Pendidikan bukan sekadar angka-angka di rapor, tetapi proses membangun pemahaman dan keterampilan hidup yang lebih relevan bagi masa depan. Oleh karena itu, perubahan paradigma pendidikan menjadi hal yang mutlak diperlukan agar sistem pembelajaran tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Wallahu a'lam bish-shawab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 31

## **Tantangan Perguruan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di Era Disruptif**

Perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kendala yang harus diatasi, seperti manajemen yang belum optimal, kualitas input mahasiswa, tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan fasilitas, desain kurikulum yang perlu disesuaikan, serta pendanaan yang masih menjadi persoalan. Sementara itu, secara eksternal, dinamika global yang berkembang pesat, khususnya dalam aspek teknologi, mengharuskan perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan cepat.

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih menuntut institusi pendidikan untuk menerapkan sistem berbasis teknologi dalam proses pengelolaan dan pembelajaran. Jika institusi gagal mengikuti perkembangan ini, maka kualitas layanan pendidikan akan menurun dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Perguruan tinggi Islam di Indonesia perlu mengubah paradigma dalam mengelola pendidikan agar lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel. Sistem yang masih kaku dan tertutup harus ditinggalkan, sementara model manajemen modern yang berorientasi pada mutu dan kolaborasi harus mulai diterapkan.

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, emosional, fisik, dan spiritual, PTKI perlu melakukan berbagai perbaikan dalam sistem manajemen, kurikulum, dan metode pembelajaran.

## **Tantangan Manajemen Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0**

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Era ini ditandai dengan peran teknologi digital yang semakin dominan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, muncullah istilah "Pendidikan 4.0" yang merujuk pada konsep integrasi teknologi dalam sistem pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya menghubungkan dunia pendidikan dengan teknologi digital, tetapi juga mengubah cara belajar dari metode tradisional menjadi lebih fleksibel dan berbasis teknologi.

Dalam pendidikan 4.0, proses pembelajaran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kehadiran guru secara fisik, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi pembelajaran digital. Menurut Erry Rahmawan (2019), terdapat lima prinsip utama yang harus dipegang oleh pendidik di era disrupsi, yaitu:

1. Keluar dari zona nyaman (*Push Beyond Comfort Zone*).
2. Bekerja dengan target yang jelas (*Works Toward Well Defined, Specific Goals*).
3. Fokus pada aktivitas yang berdampak (*Focus Intently on Impactful Activities*).
4. Memberikan dan menerima umpan balik berkualitas (*Receive and Respond High Quality Impact*).
5. Membentuk mental model seorang ahli (*Develop Mental Model of Expertise*).

Daniel Bell juga mengidentifikasi beberapa kecenderungan utama dalam dunia pendidikan akibat dampak revolusi industri ini, yaitu:

1. Persaingan bebas dalam dunia pendidikan.
2. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan.
3. Peningkatan penggunaan teknologi canggih.

4. Ketergantungan terhadap teknologi.
5. Munculnya penajahan baru dalam bidang kebudayaan, di mana pendidikan tidak lagi berorientasi pada pengembangan moral dan intelektual, melainkan lebih pada pencarian pekerjaan dan penghasilan.

Pendidikan Islam harus tetap menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Lima tujuan utama pendidikan Islam menurut M. Athiyah al-Abrasyi (1990) adalah:

1. Membentuk akhlak yang mulia.
2. Memberikan bekal kehidupan dunia dan akhirat.
3. Menumbuhkan semangat ilmiah dan rasa ingin tahu.
4. Menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan profesional.
5. Mempersiapkan mereka dalam mencari rezeki dan menjaga kebermanfaatan dalam masyarakat.

PTKI memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan tuntutan perkembangan zaman dengan nilai-nilai Islam. Menurut Deming, seorang pakar manajemen, sekitar 80% permasalahan mutu pendidikan lebih banyak disebabkan oleh faktor manajemen, sementara 20% lainnya berasal dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem manajemen pendidikan tinggi Islam perlu menerapkan prinsip-prinsip modern, seperti kepuasan pelanggan, penghormatan terhadap setiap individu, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan mutu yang berkelanjutan.

## **Penutup**

Perguruan tinggi Islam yang berbasis pesantren memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan. Namun, agar tetap relevan, diperlukan inovasi yang berkelanjutan agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang sesuai dengan tuntutan zaman. Prinsip "mempertahankan tradisi lama yang

baik dan mengambil hal baru yang lebih baik" harus diterapkan agar pendidikan Islam tetap relevan dalam era digital ini.

Jika tidak dilakukan perbaikan, maka dikhawatirkan akan terjadi kondisi seperti yang digambarkan oleh Kevin Carey dalam bukunya *The End of College* (2015) dan Neil Postman dalam *The End of Education* (2005), di mana lembaga pendidikan kehilangan relevansinya akibat sistem yang usang dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus beradaptasi dengan dinamika modern tanpa kehilangan esensinya sebagai sumber pengajaran nilai-nilai moral dan spiritual.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 32

**Mengintip Jantung Universitas di  
Nederland**

Ungkapan "*A Library is the heart of a university*" kerap kali kita dengar sebagai penegasan akan peran penting perpustakaan dalam kehidupan akademik suatu perguruan tinggi. Keberadaan perpustakaan dengan koleksi buku dan literatur yang kaya seharusnya mampu menjadi pusat kehidupan intelektual bagi dosen dan mahasiswa.

Saya merasa sangat beruntung bisa berkunjung ke perpustakaan dua universitas terkemuka di Belanda, yaitu TU Delft dan Universitas Leiden. Saat berada di sana, atmosfer akademik terasa begitu kuat, seolah berada di pusat denyut kehidupan universitas. Suasana yang nyaman, koleksi buku yang melimpah, serta sistem manajemen perpustakaan yang modern dan terintegrasi menjadikan tempat ini sebagai surga bagi pencari ilmu. Semua perpustakaan di universitas ini terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional Belanda (*Koninklijke Bibliotheek*) melalui sistem katalog Online NCC (*de Nederlandse Centrale Catalogus*) dan GGC (*het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem*), yang memungkinkan pencarian literatur secara luas dan efisien.

Perpustakaan Universitas Leiden, yang berdiri sejak tahun 1575 di kota Leiden, merupakan salah satu pusat literatur paling berpengaruh di Eropa. Koleksinya sangat mengesankan, mencakup sekitar 5,2 juta volume buku, 1 juta e-book, 20.000 serial aktif, 40.000 e-jurnal, 60.000 manuskrip Barat dan Timur, 500.000 arsip, 100.000 peta, 100.000 cetakan, 12.000 gambar, serta 300.000 foto. Bahkan, perpustakaan ini memiliki koleksi terbesar di dunia mengenai Indonesia dan Karibia. Keunikan lainnya, Perpustakaan Universitas Leiden adalah satu-satunya lembaga warisan di Belanda yang memiliki dua

dokumen yang terdaftar dalam program Memori Dunia UNESCO.

Sementara itu, Perpustakaan TU Delft tidak kalah menakjubkan dengan koleksi literatur sains modern yang sangat kaya. Dirancang oleh firma arsitektur Mecanoo dan rampung pada tahun 1997, perpustakaan ini tampak begitu megah, menyerupai pusat perbelanjaan besar yang menawarkan ilmu pengetahuan dalam setiap sudutnya.

Selama kunjungan yang singkat namun sangat berharga ini, saya merasa seolah mendapatkan suntikan semangat baru dalam dunia akademik. Hal ini sangat kontras dengan kondisi sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi di tanah air, yang masih memiliki keterbatasan dalam koleksi, fasilitas, serta kenyamanan untuk para pengunjung. Tidak mengherankan jika suasana di perpustakaan kita sering terasa kurang hidup, dengan jam operasional yang cenderung terbatas. Sementara itu, perpustakaan di kampus-kampus Belanda buka hingga pukul 00.00 waktu setempat, menjadikannya tempat yang ideal bagi pencinta ilmu untuk menggali wawasan tanpa batasan waktu.

Akhir kata, saya hanya bisa berharap bahwa perguruan tinggi kita lebih memperhatikan dan mengembangkan perpustakaannya, karena di sanalah jantung akademik berdenyut. Semoga suatu hari nanti, kita bisa memiliki perpustakaan yang benar-benar menjadi pusat keilmuan yang hidup dan menginspirasi. Wallahu a'lam.

## 33

**Sepenggal Catatan dari Negeri Belanda**

Sambil mengenang kembali cerita para guru di sekolah dasar tentang negeri Belanda puluhan tahun lalu, setiap langkah saya menuju Amsterdam terasa begitu berkesan. Saya tidak ingin melewatkan satu pun pemandangan yang bisa dinikmati. Kincir angin yang berputar perlahan, hamparan rumput hijau dengan ternak-ternak gemuk, serta rumah-rumah penduduk yang tertata rapi di sepanjang perjalanan menuju Den Haag membuat suasana hati begitu nyaman. Jalur kereta listrik yang beroperasi tepat waktu dan banyaknya warga yang menggunakan sepeda untuk beraktivitas menambah kesan keteraturan di negeri ini. Perjalanan satu jam pun terasa begitu cepat berlalu di tengah kekaguman terhadap tata kelola negara yang dulunya dikenal sebagai penjajah dalam buku-buku sejarah Indonesia.

Kini, saya dapat melihat langsung bagaimana kehidupan mereka, menginjakkan kaki di tanah mereka, dan mencoba memahami perasaan bangga sekaligus resah yang mereka miliki sebagai bangsa yang lebih dahulu maju dibanding Indonesia yang baru merdeka 77 tahun lalu. Sebagai seorang pengajar, saya semakin tertarik ketika melihat sekelompok siswa sekolah dasar dengan guru mereka berjalan mengunjungi pusat perbelanjaan, museum, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Rasa penasaran muncul, sebab pemandangan seperti ini jarang terlihat di Indonesia.

Mungkin alasannya adalah karena kondisi jalan di Indonesia kurang aman bagi anak-anak, guru merasa terbebani dengan kurikulum yang padat sehingga enggan mengajak murid keluar, atau kekhawatiran akan tambahan biaya yang harus ditanggung orang tua. Namun, di Belanda, pendidikan dasar justru menitikberatkan pada pembelajaran berbasis

pengalaman. Sejak dini, anak-anak dilatih untuk memahami lingkungan sosial mereka, menaati peraturan lalu lintas, serta memanfaatkan fasilitas umum dengan baik. Mereka tampak ceria, penuh semangat, dan menikmati setiap aktivitas sekolah. Kurikulum mereka lebih fokus pada pengembangan sikap dan karakter dibandingkan dengan penekanan materi akademik yang berlebihan.

## **Mengenal Kehidupan Remaja Belanda**

Saat mengamati kehidupan remaja di Belanda, saya menyadari betapa besar peran negara dalam membentuk kemandirian mereka. Undang-undang memberikan kebebasan kepada anak berusia 17 tahun untuk hidup mandiri. Orang tua yang mencoba membatasi kebebasan anak di usia ini justru bisa dianggap melanggar hak mereka. Pola asuh semacam ini efektif dalam membangun pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Remaja Belanda menyadari bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dewasa sejak dini.

Namun, ada aspek lain yang patut menjadi perhatian, yaitu kebebasan dalam pergaulan dan perilaku sosial yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat timur. Sebagian besar masyarakat Belanda tidak terlalu religius. Beberapa di antara mereka mengunjungi gereja hanya untuk menikmati musik dan lagu-lagu rohani. Saat hari Minggu, saya melihat bahwa kebanyakan jemaat gereja adalah orang-orang lanjut usia.

## **Tradisi Belajar di Perguruan Tinggi**

Selama di Belanda, saya berkesempatan mengikuti kuliah singkat di *Delft University of Technology* (TU Delft), salah satu universitas terbaik di dunia. Kampus ini memiliki desain terbuka dengan akses transportasi umum yang memudahkan mahasiswa. Tidak ada konsep "one gate system" seperti di beberapa kampus di Indonesia. Semua terasa aman, tertib, dan nyaman. Fasilitas kampus tersedia dengan kualitas terbaik, dan para dosen yang mengajar memiliki kompetensi luar biasa. Perkuliahan berlangsung tepat waktu, interaktif, dan penuh

antusiasme. Tidak ada suasana bosan seperti yang sering saya temui di kelas-kelas di Indonesia.

Saat pulang kuliah, saya menerima email dari dosen yang mengirimkan materi tambahan dan meminta mahasiswa memberikan tanggapan akademik. Ini adalah bentuk tanggung jawab akademik yang jarang saya temui di kampus-kampus Indonesia. Di Belanda, sistem transportasi yang terjadwal dengan baik membuat perjalanan pulang terasa lancar tanpa hambatan. Semua layanan publik berorientasi pada kenyamanan warga.

Melihat keteraturan di negeri ini, saya menyadari pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya. Pajak yang tinggi—sekitar 30%—digunakan secara optimal untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai warga negara, mereka juga patuh terhadap aturan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Konsep ini mengingatkan saya pada nilai-nilai kebersihan dan ketertiban yang sering diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, tetapi sayangnya masih sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Refleksi**

Dua pekan di Belanda memberikan banyak pelajaran berharga mengenai perbedaan budaya antara dunia Barat dan Timur. Ada banyak aspek kehidupan yang bisa dijadikan contoh untuk membangun karakter bangsa tanpa harus kehilangan akar budaya dan nilai-nilai religius. Indonesia memang masih muda sebagai negara merdeka, tetapi selalu ada harapan untuk terus belajar dan berkembang menjadi bangsa yang lebih beradab dan modern tanpa harus mengorbankan identitasnya.

Wallahu a'lam.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 34

### Pilkada dan Pendidikan Politik Nilai

Para ilmuwan politik sering mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk politik (*homo politicus*). Hal ini mencerminkan bagaimana setiap individu memiliki kepentingan dan keinginan sosial yang kemudian diwujudkan dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang benar-benar terlepas dari politik. Ketika seseorang merancang strategi dan menentukan langkah-langkah demi mencapai suatu tujuan, saat itulah praktik politik berlangsung. Dalam bahasa Arab, politik diterjemahkan sebagai *siyasah*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai siasat, yang juga dapat berarti strategi atau bahkan taktik tertentu.

Pesta demokrasi rakyat umumnya merujuk pada pemilihan umum, di mana warga negara yang memenuhi syarat berhak menentukan pemimpin untuk periode tertentu dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bukan sekadar ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga menjadi momentum pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam berbagai literatur, pendidikan politik—atau dalam bahasa Inggris disebut *political socialization*—didefinisikan sebagai upaya sadar untuk membentuk pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai politik yang ideal. Pendidikan politik juga dimaknai sebagai proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bernegara.

Ketika dikaitkan dengan Pilkada, pendidikan politik menjadi sebuah mekanisme yang terstruktur untuk mengedukasi masyarakat mengenai visi, misi, dan gagasan yang ditawarkan oleh para kontestan, termasuk partai politik yang mengusung mereka. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat memahami peran, fungsi, serta hak dan

kewajibannya sebagai warga negara yang berdaulat. Pendidikan politik berbasis nilai dalam konteks Pilkada mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, memahami hak-hak politik mereka, serta menghargai perbedaan dengan sikap toleran dan menjunjung tinggi etika politik.

### **Kontestasi Politik yang Mendidik Nilai**

Pilkada selalu menjadi ajang yang menarik perhatian publik, memicu antusiasme, dan terkadang memunculkan euforia politik yang meluas hingga ke pelosok negeri. Setiap suara menjadi sangat berharga dan diperebutkan dalam kontestasi ini. Berbagai isu, janji kampanye, program kerja, hingga retorika politik kerap mewarnai ruang publik. Dengan perkembangan teknologi, perbincangan seputar Pilkada semakin intens melalui berbagai platform digital. Media sosial menjadi wadah penyebaran informasi—baik yang bersifat edukatif maupun sekadar propaganda—hingga tak jarang berita bohong (hoaks) juga ikut beredar.

Di tingkat masyarakat, fenomena menarik muncul ketika orang-orang yang sebelumnya tidak aktif dalam diskusi politik tiba-tiba bertransformasi menjadi juru kampanye dadakan. Mereka dengan penuh semangat menyampaikan informasi mengenai kandidat yang mereka dukung, terkadang dengan cara yang unik, termasuk melalui percakapan di warung kopi, pos ronda, dan forum-forum informal lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, sekadar berbagi rokok di lingkungan tempat berkumpul bisa menjadi alat diplomasi politik yang efektif di tengah kontestasi Pilkada.

Dalam momen-momen ini, rekam jejak para kandidat menjadi bahan perbincangan utama. Masyarakat akan mencari informasi mengenai latar belakang, pengalaman, dan prestasi para calon pemimpin. Namun, di sisi lain, aib dan kesalahan masa lalu kandidat juga sering kali menjadi bahan eksploitasi dalam persaingan politik. Peran media dalam menyajikan informasi yang akurat dan kredibel menjadi sangat penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat. Sayangnya, tidak jarang muncul media-media instan yang hanya hadir

selama periode Pilkada dan menghilang begitu pemilihan selesai.

Di tengah hiruk-pikuk Pilkada, keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik harus dilihat sebagai bentuk kepedulian yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya. Namun, tantangan bagi para kandidat adalah bagaimana mereka dapat mengarahkan energi dan kreativitas masyarakat ini untuk menghasilkan solusi konkret bagi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi.

Masyarakat tentu menginginkan pemimpin yang kompeten dan mampu menyelesaikan masalah, bukan sekadar figur yang memiliki popularitas semata. Walaupun sulit menemukan pemimpin yang sempurna, transparansi dan kejujuran tetap menjadi nilai utama yang diharapkan dari setiap calon kepala daerah. Pilkada seharusnya menjadi sarana bagi para kandidat untuk menunjukkan kapasitas mereka secara jujur, bukan sekadar ajang pencitraan.

### **Pemimpin Berkarakter sebagai Produk Pendidikan Politik Nilai**

Dalam khazanah budaya Melayu, terdapat pepatah: *“Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.”* Pepatah ini menegaskan bahwa pemimpin yang adil akan dihormati rakyatnya, sementara pemimpin yang sewenang-wenang akan mendapatkan perlawanan. Konsep keadilan dalam kepemimpinan memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai universal, termasuk dalam perspektif Islam. Pemimpin yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada keadilan.

Dalam Islam, konsep keadilan merujuk pada memberikan hak kepada yang berhak tanpa diskriminasi. Beberapa ayat dalam Al-Qur’an menegaskan prinsip keadilan dalam berbagai aspek, seperti keadilan dalam menetapkan hukum (QS An-Nisa’ 58), keadilan dalam memberikan hak kepada orang lain (QS

An-Nahl 90), hingga keadilan dalam memberikan kesaksian (QS An-Nisa' 135). Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan moralitas tinggi.

Mengingat pentingnya aspek nilai dalam politik, setiap kandidat seharusnya tidak hanya berfokus pada strategi kemenangan, tetapi juga memberikan pendidikan politik yang bermutu kepada masyarakat. Kampanye yang penuh dengan serangan terhadap lawan politik, penyebaran hoaks, serta propaganda yang menyesatkan justru bertentangan dengan prinsip pendidikan politik nilai. Sebaliknya, kampanye yang berbasis data dan disampaikan dengan cara yang beradab akan lebih mencerminkan kualitas kandidat tersebut.

Pada akhirnya, masyarakat yang semakin cerdas dan kritis memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional. Dengan berbagai sumber informasi yang tersedia, pemilih dapat menilai rekam jejak kandidat secara objektif. Namun, yang terpenting dari seluruh proses Pilkada ini adalah memilih pemimpin yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang mengabaikan nilai-nilai etika dalam kepemimpinan akan lebih cepat mengalami kemunduran. Oleh karena itu, hasil Pilkada pada akhirnya akan mencerminkan karakter masyarakat itu sendiri.

Wallahu a'lam bis-shawwab.

## 35

### **Pendidikan Keadaban (Menanggapi Kekerasan dalam Pendidikan Kedinasan)**

Seperti yang sudah banyak diduga, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan di Indonesia seolah menjadi fenomena yang sulit dihilangkan. Kekerasan ini terus berulang sebagai cerminan dari sistem pendidikan yang masih memiliki banyak kelemahan.

Pada dasarnya, kekerasan dalam dunia pendidikan bukanlah sekadar insiden yang terjadi secara sporadis, melainkan sesuatu yang seakan "dilestarikan" oleh sistem dan regulasi pendidikan itu sendiri. Kebijakan pendidikan nasional yang cenderung lebih berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan industri sering kali mengesampingkan nilai-nilai pendidikan karakter yang berfokus pada aspek afektif. Di sisi lain, kurikulum yang lebih menitikberatkan pada akademik dibanding aspek humanistik memperparah keadaan.

Tidak sulit untuk melihat bahwa pendidikan di Indonesia selama ini hanya berfokus pada pengajaran ilmu pengetahuan, hafalan materi, dan rutinitas belajar yang kurang bermakna. Akhirnya, proses belajar mengajar lebih bertumpu pada ujian tulis, sementara aspek sikap dan keterampilan yang seharusnya menjadi bekal hidup justru diabaikan. Setiap tahun, praktik yang merusak esensi pendidikan terus terjadi, seperti kebocoran soal ujian, jual beli kursi sekolah, hingga praktik nepotisme dalam seleksi sekolah unggulan. Maka, wajar jika muncul pertanyaan: di manakah letak pendidikan sejati di negeri ini?

## **Dari Pendidikan yang Menindas ke Pendidikan Berbasis Keadaban**

Para pemikir pendidikan pembebasan seperti Ivan Illich dan Paulo Freire sejak lama telah mengingatkan negara-negara berkembang mengenai bahaya sistem pendidikan yang dijalankan dengan tidak jujur dan hanya menjadi alat politik bagi penguasa. Sistem pendidikan yang tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi praktik pendidikan cenderung menjadi alat penindasan bagi peserta didik. Hal ini tampak dari bagaimana sekolah lebih menekankan persaingan dibanding kebersamaan. Konsep *competitive learning* lebih dominan dibanding *cooperative learning*, sehingga siswa didorong untuk saling mengalahkan daripada bekerja sama.

Pendidikan yang menindas adalah sistem yang memperlakukan siswa sebagai objek, bukan subjek pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan pun sering kali tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam mencari serta mengolah informasi. Pola pendidikan seperti ini banyak ditemukan di sekolah kedinasan yang berorientasi pada pembentukan kedisiplinan. Sayangnya, kedisiplinan yang diterapkan sering kali tidak melibatkan nalar dan kesadaran individu, melainkan sekadar kepatuhan terhadap perintah. Tidak heran jika sekolah-sekolah kedinasan yang menggunakan pendekatan semi-militer sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik dan mental. Pendidikan tidak lagi menyerupai "taman" yang menyenangkan, sebagaimana yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara, melainkan lebih mirip "penjara siswa."

Membangun kedisiplinan memang penting, tetapi pendekatan yang digunakan harus tepat agar tidak berdampak negatif. Thomas Lickona menegaskan bahwa pendidikan karakter, termasuk kedisiplinan, harus berbasis pada kesadaran kognitif yang utuh. Artinya, kedisiplinan harus ditanamkan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan manfaatnya, bukan dengan pemaksaan yang kaku. Oleh karena itu, metode pendidikan di sekolah-sekolah kedinasan

perlu diperbaiki agar lebih berorientasi pada pendidikan yang humanis.

## **Mengubah Paradigma Pendidikan Indonesia**

Salah satu akar permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah metodologi yang digunakan. Proses pembelajaran harus lebih mengedepankan pendekatan konstruktivistik, di mana siswa diajak untuk memahami makna pendidikan secara mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada hafalan teori dan latihan soal untuk ujian, tetapi juga harus mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara menyeluruh.

Pendidikan di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada aspek kognitif, sehingga aspek moralitas dan kesantunan kurang diperhatikan. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang harus diambil:

1. Mengembalikan konsep "Taman Siswa" sebagaimana yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara agar pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan mendidik siswa secara holistik.
2. Menghilangkan praktik-praktik negatif di lingkungan sekolah, seperti perundungan, kekerasan, dan nepotisme dalam seleksi peserta didik maupun tenaga pendidik.
3. Merekrut tenaga pendidik dan pejabat pendidikan berdasarkan kompetensi agar mereka benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.
4. Menjauhkan sistem pendidikan dari kepentingan politik praktis agar kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi alat pencitraan bagi penguasa.
5. Mengembangkan kurikulum yang seimbang antara aspek akademik dan nilai-nilai karakter.
6. Membangun lingkungan sekolah yang kondusif untuk interaksi sosial yang sehat dan mendukung pengembangan sikap positif siswa.

Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah ini dapat diterapkan secara nyata dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang membebaskan bukan hanya tentang memberikan kebebasan belajar, tetapi juga tentang mengembalikan hak-hak peserta didik agar mereka bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri, cerdas, santun, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Dalam tradisi pendidikan Islam, konsep pendidikan berbasis keadaban dikenal dengan istilah *ta'dib*, yaitu proses pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan nilai moral. Konsep ini sejalan dengan pendidikan berbasis *civic values* dalam sistem pendidikan modern, yang bertujuan membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Menanamkan paradigma pendidikan berbasis keadaban sangat relevan dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Sekolah kedinasan, sebagai lembaga pendidikan yang mencetak calon pemimpin bangsa, perlu diarahkan agar lebih menanamkan nilai-nilai keadaban dalam kurikulumnya. Dengan demikian, para lulusannya tidak hanya menjadi birokrat atau pejabat yang disiplin, tetapi juga memiliki karakter luhur yang berkontribusi bagi peradaban yang lebih baik. Pendidikan keadaban bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi dunia pendidikan kita.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

## 36

***Learn From Home: Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19***

Selama satu semester terakhir, dunia pendidikan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak biasa, yakni meninggalkan sistem pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Kebijakan otoritas pendidikan mengharuskan guru dan siswa untuk tidak menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Hal ini juga berlaku bagi perguruan tinggi yang meliburkan mahasiswanya dari kegiatan perkuliahan di kampus. Pandemi COVID-19 telah mengubah secara drastis sistem dan tradisi pendidikan yang sebelumnya telah mapan.

Institusi pendidikan kini harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring (dalam jaringan). Sekolah dan perguruan tinggi mengoordinasikan proses belajar mengajar dari rumah (learn from home). Gedung-gedung sekolah dan kampus yang biasanya menjadi pusat kegiatan akademik kini praktis tidak terpakai selama pandemi berlangsung. Situasi ini membuat masyarakat, terutama insan akademik, merenungkan kembali hakikat keberadaan institusi pendidikan. Kaum intelektual perlu kembali menelaah aspek fundamental dari pendidikan, serta mengingat kembali peran keluarga sebagai pilar utama dalam proses pembelajaran.

Selama ini, sistem pendidikan cenderung mengabaikan pentingnya pendidikan keluarga (at-tarbiyah al-'iyal). Kebijakan sekolah sehari penuh atau full day school secara tidak langsung telah mengurangi peran keluarga dalam mendidik anak-anak. Rumah hanya menjadi tempat istirahat tanpa benar-benar berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak (madrasah al-ula). Kehadiran pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberikan kesadaran bagi

masyarakat untuk kembali mengoptimalkan fungsi rumah sebagai lingkungan belajar utama bagi anak-anak.

### ***Learn from Home: Tantangan dan Efektivitas***

Secara teori, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Sekolah dan institusi pendidikan hanya menjadi perpanjangan tangan keluarga dalam memberikan pendidikan yang lebih sistematis. Dalam sejarah pendidikan, dikenal istilah *schola materna* atau sekolah ibu, yang kemudian berkembang menjadi *almamater*. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi pendidikan keluarga. Setiap keluarga tentu menginginkan anak-anak mereka memiliki kecerdasan intelektual, keterampilan, serta moral yang baik. Untuk itu, sekolah dan perguruan tinggi hadir dengan sistem pendidikan modern guna membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Dalam regulasi pendidikan nasional, tujuan pendidikan mencakup penguatan iman dan takwa, kemandirian, kecerdasan akademik, serta keterampilan. Karena cakupan pendidikan yang begitu luas, proses pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal, tetapi juga melibatkan pendidikan nonformal dan informal. Dalam hal ini, keluarga sebagai lembaga pendidikan informal seharusnya mampu menjalankan perannya secara efektif.

Namun, efektivitas pendidikan berbasis keluarga saat ini benar-benar diuji. Ketika sekolah tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal, maka keluarga harus mengambil alih peran tersebut. Orang tua dituntut untuk mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak mereka, sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh para guru di sekolah. Pembelajaran daring menjadi solusi utama dalam memastikan keberlanjutan pendidikan selama pandemi COVID-19. Sistem ini memiliki keunggulan dalam memberikan akses belajar yang lebih fleksibel serta mempercepat adaptasi terhadap teknologi pendidikan berbasis digital.

Di sisi lain, pembelajaran daring juga menghadirkan tantangan besar, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil yang belum memiliki akses terhadap teknologi dan jaringan internet yang memadai. Keterbatasan infrastruktur digital menyebabkan ketimpangan akses pendidikan, sehingga kebijakan pembelajaran daring ini belum dapat diterapkan secara merata. Selain itu, perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin memperbesar kesenjangan dalam dunia pendidikan.

Keberhasilan pembelajaran daring di lingkungan keluarga sangat bergantung pada kesiapan orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka. Pemahaman orang tua terhadap materi pelajaran serta strategi pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar. Sayangnya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mendukung anak-anak mereka dalam belajar, sehingga dapat menghambat efektivitas pembelajaran berbasis rumah.

Secara praktis, pengalihan peran pendidikan ke lingkungan keluarga memiliki keunggulan tersendiri dalam aspek pembentukan karakter siswa. Interaksi yang lebih intens antara orang tua dan anak memungkinkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan positif yang tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga perkembangan kepribadian anak. Orang tua memiliki kesempatan lebih besar untuk membimbing anak-anak mereka secara langsung dan memastikan bahwa mereka tetap berada dalam lingkungan belajar yang kondusif.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi akademik mereka. Dengan demikian, hubungan antara sekolah dan keluarga dapat semakin erat, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mendidik anak-anak. Pola interaksi ini juga membantu orang tua memahami strategi pendidikan yang lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di rumah.

Diharapkan bahwa setelah pandemi ini berakhir, kesadaran akan pentingnya pendidikan keluarga semakin meningkat. Ketersinambungan pendidikan karakter antara rumah dan sekolah harus tetap terjaga, sehingga menghasilkan generasi yang lebih berintegritas. Tidak ada kejadian yang sia-sia dalam ketentuan Allah SWT. Semoga pandemi COVID-19 membawa hikmah bagi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, serta mengajarkan kita untuk lebih rendah hati dan tidak hanya berbangga dengan pencapaian pendidikan formal semata. Sebaliknya, kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan dan menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk manusia yang lebih berakhlak.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

# **BAGIAN KEDUA**

## **ISU-ISU KEAGAMAAN: NORMATIVITAS DAN REALITAS SOSIAL**

### **1**

#### **Kisah Sulaiman dan Makan Gratis**

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah berkeinginan untuk menanggung seluruh rezeki makhluk yang berada dalam kekuasaannya. Kisah ini tercatat dalam kitab Durrotun Naashihin Fii Al-Wa'izhin Wa Al-Irsyad, karya Syekh 'Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khowbawiy. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang dikaruniai kebijaksanaan, kewibawaan, serta kekuasaan besar yang mencakup manusia, jin, dan berbagai makhluk lainnya. Selain itu, beliau juga memiliki sumber daya yang sangat melimpah.

Dengan kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya, Nabi Sulaiman memutuskan untuk memberikan makanan bagi seluruh makhluk yang ada di wilayah kekuasaannya. Dapur kerajaannya setiap hari menyiapkan makanan dalam jumlah yang luar biasa besar: daging dari 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing dimasak untuk diberikan kepada rakyat serta seluruh anggota kerajaan. Keinginan Nabi Sulaiman ini lahir dari sifat dermawannya yang luar biasa, sehingga ia pun memohon kepada Allah untuk memberinya izin agar dapat menanggung makan seluruh makhluk hidup di dunia. Namun, Allah SWT menjawab dengan pernyataan yang mengejutkan:

“Sungguh, engkau tidak akan mampu.”

Dengan tekad yang kuat, Nabi Sulaiman tetap berusaha mewujudkan niatnya. Ia mengerahkan pasukan jin dan manusia untuk menyampaikan undangan kepada semua makhluk agar datang ke jamuan makan yang telah ia persiapkan. Untuk itu, ia menyediakan tempat yang luasnya setara dengan satu bulan perjalanan.

Ketika makanan telah tersaji, Allah SWT bertanya kepada Nabi Sulaiman:

“Makhluk manakah yang akan engkau beri makan terlebih dahulu?”

Nabi Sulaiman pun menjawab bahwa ia akan memberikan makanan kepada makhluk yang ada di darat dan di laut. Maka, atas izin Allah, seekor ikan besar dari lautan datang sebagai makhluk pertama yang menyantap hidangan tersebut. Namun, betapa terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mendapati bahwa dalam sekejap, ikan tersebut melahap seluruh makanan yang telah disiapkan.

Setelah menghabiskan makanan yang tersedia, ikan itu berkata:

“Wahai Sulaiman, aku masih lapar. Berilah aku makan lagi.”

Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersungkur, bersujud, dan menangis. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlalu percaya diri terhadap kemampuannya. Ia pun memohon ampun kepada Allah SWT atas kesombongan yang sempat muncul di dalam hatinya.

### **Program Makan Bergizi Gratis dan Kesombongan Kekuasaan**

Kisah Nabi Sulaiman ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana niat baik sekalipun harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Sebab, tanpa perencanaan yang komprehensif, suatu kebijakan dapat berujung pada kegagalan.

Di Indonesia, pemerintah saat ini sedang menggulirkan kebijakan besar berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG)

bagi anak-anak sekolah. Program ini merupakan bagian dari janji politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi siswa. Namun, seperti halnya kisah Nabi Sulaiman, kebijakan ini menuntut kesiapan anggaran yang sangat besar.

Berdasarkan data resmi pemerintah, untuk menjalankan program MBG pada tahun 2025, dibutuhkan dana sebesar 171 triliun rupiah, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta siswa. Angka ini mengalami lonjakan drastis dari rencana awal yang hanya menargetkan 17 juta siswa dengan anggaran 71 triliun rupiah.

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian. Presiden bahkan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang mewajibkan setiap kementerian mengurangi anggaran mereka hingga puluhan triliun rupiah guna mendukung program MBG.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Para pakar ekonomi dan kebijakan publik menilai bahwa pemangkasan anggaran kementerian dapat mengganggu kinerja serta program yang sudah dirancang dengan matang sebelumnya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini mencerminkan kurangnya koordinasi dalam perencanaan anggaran nasional.

Dari sudut pandang politik anggaran, pemotongan dana kementerian yang drastis ini dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan, yang tidak mempertimbangkan proses perencanaan internal di setiap kementerian. Jika dibiarkan, kebijakan semacam ini dapat merusak sistem tata kelola keuangan negara dan menurunkan semangat kerja di berbagai lembaga pemerintahan.

### **Realitas dan Tantangan Implementasi Program MBG**

Secara moral, program Makan Bergizi Gratis lahir dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi gizi anak-anak di Indonesia. Niat baik ini tentu patut diapresiasi. Namun, niat baik saja tidak cukup perlu perencanaan yang matang agar

program ini dapat berjalan efektif tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Saat ini, implementasi program MBG masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah:

1. Tidak meratanya distribusi makanan – Banyak sekolah yang belum menerima manfaat dari program ini, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, sekolah-sekolah di perkotaan justru lebih dulu mendapatkan akses.
2. Buruknya kualitas makanan – Di beberapa daerah, menu makanan yang disediakan dianggap kurang layak dan bergizi, sehingga menuai kritik dari para orang tua.
3. Kurangnya kesiapan tim pelaksana – Dalam beberapa kasus, distribusi makanan mengalami keterlambatan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah.
4. Salah sasaran – Banyak siswa dari keluarga mampu yang ikut menikmati program ini, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu justru belum semuanya terjangkau.

Sejumlah ahli menyarankan agar program MBG sebaiknya difokuskan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan secara merata kepada seluruh siswa. Selain itu, sebagian ekonom berpendapat bahwa alih-alih mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk program makan gratis, pemerintah sebaiknya berinvestasi pada penciptaan lapangan kerja yang memungkinkan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan pangan anak-anak mereka secara mandiri.

Di satu sisi, riset menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan anak-anak. Namun, dalam situasi di mana keuangan negara masih terbebani oleh utang, korupsi merajalela, dan kesempatan kerja semakin sulit didapat, program semacam ini dinilai kurang realistis.

Sebagai bangsa, kita perlu lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak terjebak dalam kesombongan kekuasaan. Sebab, seperti dalam kisah Nabi Sulaiman, bahkan seorang raja yang paling kaya dan berkuasa pun akhirnya menyadari keterbatasannya di hadapan Allah SWT.

Wallahu a'lam bish-shawwab.

## 2

## Membaca Gagasan Moderasi Hamka

Salah satu pemikir dan ulama besar Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan dalam wacana keislaman adalah Buya Hamka. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim, tetapi juga sebagai sastrawan dan intelektual yang memiliki wawasan luas mengenai persoalan keumatan, kebangsaan, dan peradaban Islam secara global.

Beberapa waktu lalu, dalam sidang promosi doktor di Pascasarjana UIN Raden Fatah, sebuah disertasi menarik dipresentasikan dengan tema relevansi gagasan pendidikan karakter Buya Hamka terhadap fenomena moralitas di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam disertasi tersebut adalah bagaimana konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Buya Hamka dapat diimplementasikan dalam konteks keindonesiaan saat ini.

Dalam tulisan ini, kita akan menelaah lebih jauh bagaimana pemikiran Hamka mengenai toleransi, ukhuwah Islamiyah, serta moderasi dalam beragama. Selain itu, kita akan melihat bagaimana gagasan-gagasan beliau dibandingkan dengan pemikiran ulama lain, serta relevansinya dalam menjawab tantangan zaman.

### Hamka dan Pendidikan Karakter Islam

Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter Islam dalam membangun masyarakat yang beradab. Dalam berbagai ceramah dan karyanya, ia sering mengangkat tema kejujuran, keberanian, dan semangat juang sebagai karakter utama yang harus dimiliki oleh umat Islam.

Namun, yang menarik adalah bahwa karakter keberanian dan semangat juang yang ditekankan oleh Hamka justru tidak termasuk dalam 18 karakter utama yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional saat ini. Padahal, menurut Hamka, karakter tersebut sangat penting untuk membentuk generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan hidup.

Hamka juga menyoroti pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, konsep toleransi yang ia usung bukanlah toleransi yang bersifat permisif dan menghilangkan prinsip-prinsip Islam, melainkan toleransi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman yang kuat.

### **Moderasi Beragama dalam Perspektif Hamka**

Dalam diskursus kontemporer, moderasi beragama sering dipahami sebagai sikap beragama yang tidak ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme. Kementerian Agama RI mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa.

Namun, bagi Hamka, moderasi beragama tidak bisa dilepaskan dari prinsip ketauhidan dan ketaatan kepada syariat Islam. Dalam pandangan beliau, ada batasan yang jelas antara akomodasi sosial dan kompromi dalam akidah. Salah satu contoh konkret yang sering dibahas dalam pemikiran Hamka adalah hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani.

Bagi Hamka, mengucapkan selamat Natal adalah sesuatu yang haram, karena berkaitan dengan keyakinan teologis umat Nasrani yang berbeda dengan Islam. Pandangan ini sejalan

dengan beberapa ulama seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Khalid Basalamah, dan Abdul Somad, yang menilai bahwa mengucapkan selamat Natal berpotensi mengakui konsep teologis agama lain.

Di sisi lain, ada pula ulama yang berpandangan lebih fleksibel, seperti Yusuf al-Qaradawi, Quraish Shihab, dan Gus Dur, yang berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan sosial tanpa harus mengakui doktrin keimanan mereka.

Dalam konteks ini, Hamka lebih memilih untuk menjaga batasan akidah dengan tegas, namun tetap mendorong umat Islam untuk menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam aspek sosial dan kemanusiaan.

### **Hamka dan Wacana Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Basyariyah**

Dalam dunia Islam, konsep ukhuwah (persaudaraan) terbagi menjadi tiga bentuk utama:

1. Ukhuwah Islamiyah – Persaudaraan sesama Muslim di seluruh dunia.
2. Ukhuwah Wathaniyah – Persaudaraan dalam ikatan kebangsaan.
3. Ukhuwah Basyariyah – Persaudaraan sesama manusia secara umum.

Beberapa ulama Indonesia, seperti KH. Ahmad Shiddiq, menekankan pentingnya ukhuwah wathaniyah sebagai fondasi untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Namun, dalam beberapa hal, Hamka cenderung lebih menekankan ukhuwah Islamiyah dibandingkan ukhuwah wathaniyah.

Hal ini sering kali menyebabkan munculnya persepsi bahwa Hamka kurang mengedepankan wawasan Islam Wasathiyah yang lebih inklusif terhadap realitas kebangsaan Indonesia. Padahal, jika ditelaah lebih jauh, Hamka bukanlah

ulama yang anti terhadap konsep kebangsaan. Justru, beliau adalah seorang tokoh yang sangat mencintai tanah airnya dan berjuang dalam kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan perspektif ini lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman sosial masing-masing ulama. Hamka, yang tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang kuat dalam tradisi Islam, memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan ulama seperti Gus Dur atau Quraish Shihab, yang lebih banyak berinteraksi dengan berbagai latar belakang masyarakat.

### **Relevansi Pemikiran Hamka dalam Konteks Indonesia Saat Ini**

Dalam konteks kekinian, gagasan Hamka tentang moderasi beragama masih sangat relevan untuk diterapkan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan sekularisasi.

Beberapa poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Hamka adalah:

1. Menjaga keseimbangan antara toleransi dan ketegasan akidah

Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi tidak berarti harus mengorbankan prinsip-prinsip tauhid.

2. Pentingnya pendidikan karakter yang kuat

Pendidikan karakter yang berbasis Islam harus mencakup nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan semangat juang, sebagaimana yang ditekankan oleh Hamka.

3. Mengembangkan pemahaman Islam yang berbasis pada keilmuan dan intelektualitas

Islam harus dipahami dengan pendekatan ilmiah yang mendalam, bukan sekadar mengikuti tren atau wacana yang berkembang tanpa kajian yang mendalam.

4. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam konteks global

Umat Islam di Indonesia harus lebih aktif dalam membangun solidaritas dengan komunitas Muslim di dunia, terutama dalam menghadapi berbagai isu yang menimpa umat Islam secara global.

Pemikiran Hamka mengenai moderasi beragama menawarkan perspektif yang menarik dalam memahami hubungan antara Islam dan realitas sosial. Beliau bukanlah sosok yang menolak keberagaman, tetapi menekankan pentingnya menjaga akidah dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan.

Sebagai seorang ulama dan intelektual, Hamka telah meninggalkan warisan pemikiran yang sangat berharga bagi bangsa ini. Gagasan-gagasannya tentang pendidikan karakter, ukhuwah Islamiyah, dan moderasi beragama masih sangat relevan untuk dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan kita saat ini adalah bagaimana menerjemahkan gagasan Hamka ke dalam konteks zaman yang terus berubah, tanpa kehilangan esensi dari ajaran Islam yang beliau perjuangkan.

Wallahu a'lam bish-shawwab.

PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

### 3

## Hati yang Selalu Selesai

Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari dua unsur utama: jasad dan ruh. Jasad adalah aspek fisik yang tampak dan dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan ruh adalah unsur batin yang tidak terlihat tetapi memiliki peran fundamental dalam menggerakkan kehidupan manusia.

Dalam kehidupan modern, manusia banyak berinvestasi untuk merawat jasadnya. Klinik kecantikan, pusat kebugaran, dan berbagai produk kesehatan menjadi industri yang terus berkembang. Namun, bagaimana dengan perawatan hati dan jiwa? Sayangnya, aspek ini sering kali terabaikan. Padahal, hati yang bersih dan jiwa yang tenang adalah kunci utama dalam meraih kebahagiaan sejati.

Para ulama sufi mengajarkan bahwa penyucian hati (tazkiyah al-nafs) adalah jalan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan hakiki. Seorang yang memiliki hati yang selesai adalah mereka yang mampu menerima setiap takdir dengan penuh keikhlasan, tanpa diganggu oleh ketamakan duniawi atau rasa iri terhadap orang lain.

### **Hati sebagai Pusat Kesadaran Manusia**

Dalam ajaran tasawuf, hati memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat kesadaran spiritual manusia. Para ulama sering menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan aspek ruhaniah manusia, seperti qalb (hati), nafs (jiwa), ruh (ruh), dan sirr (rahasia batin).

Syekh Abdul Qadir al-Jilani dalam *Sirr al-Asrar* membagi ruh manusia ke dalam empat tingkatan:

1. Ruh Jasmani – Ruh yang berkaitan dengan kebutuhan fisik manusia, seperti makan, minum, dan tidur.

2. Ruh Ruhani – Ruh yang berkaitan dengan pemahaman intelektual dan kesadaran akan ilmu pengetahuan.
3. Ruh Sulthani – Ruh yang memiliki kekuatan kepemimpinan dan pengaruh dalam kehidupan sosial.
4. Ruh Qudsi – Ruh yang paling suci, yang menghubungkan manusia dengan Allah dan mengarah pada kesempurnaan spiritual.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra'd: 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati tidak dapat diperoleh melalui harta, jabatan, atau kesuksesan duniawi, melainkan hanya dengan zikir dan kedekatan kepada Allah SWT.

### **Ciri-Ciri Hati yang Selesai**

Seorang yang memiliki hati yang selesai akan menunjukkan beberapa karakteristik utama:

#### **1. Mampu Menerima Takdir dengan Lapang Dada**

Tidak semua keinginan manusia akan terwujud. Orang yang memiliki hati yang selesai memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar.

Mereka tidak larut dalam kekecewaan jika harapan mereka tidak tercapai, karena mereka yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik.

#### **2. Bebas dari Rasa Iri dan Dengki**

Hati yang selesai tidak dipenuhi dengan perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain. Sebaliknya, mereka mampu bersyukur atas apa yang dimiliki dan ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kalian saling iri, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Muslim)

### 3. Tidak Berambisi Berlebihan terhadap Dunia

Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Orang yang memiliki hati yang selesai memahami bahwa harta, jabatan, dan popularitas tidak akan dibawa mati.

Mereka tetap bekerja keras, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup mereka.

### 4. Tenang dalam Menghadapi Ujian Hidup

Kehidupan pasti penuh dengan ujian, baik dalam bentuk kesulitan maupun kesenangan. Orang yang memiliki hati yang selesai tidak mudah terguncang oleh ujian, karena mereka menyandarkan seluruh hidupnya kepada Allah.

## **Cara Menyempurnakan Hati**

Memiliki hati yang selesai bukanlah sesuatu yang instan, tetapi membutuhkan latihan dan mujahadah (perjuangan spiritual). Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai ketenangan hati adalah:

#### 1. Memperbanyak Zikir dan Mengingat Allah

Zikir adalah obat bagi hati yang gelisah. Dengan banyak mengingat Allah, hati akan semakin tenang dan terhindar dari kegelisahan duniawi.

Rasulullah SAW bersabda:

“Maukah aku beritahukan kepadamu amal yang paling baik, paling suci di sisi Tuhanmu, dan paling tinggi derajatnya? Itu adalah zikir kepada Allah.” (HR. Al-Baihaqi)

#### 2. Mengendalikan Nafsu dan Emosi

Banyak orang gagal mencapai ketenangan hati karena mereka terlalu dikendalikan oleh hawa nafsu dan emosinya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Bersyukur dalam Segala Keadaan

Sikap syukur akan membuat hati lebih tenang, karena seseorang tidak lagi berfokus pada apa yang tidak dimiliki, tetapi pada apa yang telah diberikan oleh Allah.

Allah SWT berfirman:

“Jika kamu bersyukur, Aku akan menambah nikmat-Ku kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7)

### 4. Menjaga Hubungan Baik dengan Sesama

Hati yang dipenuhi kebencian terhadap orang lain tidak akan pernah mencapai ketenangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga hubungan baik dan menghindari permusuhan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi.” (HR. Muslim)

Hati yang selesai adalah hati yang mampu menerima segala ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan. Orang yang memiliki hati seperti ini tidak akan mudah terguncang oleh ujian, tidak akan iri terhadap kesuksesan orang lain, dan tidak akan terperangkap dalam ambisi duniawi yang berlebihan.

Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan hidup, memiliki hati yang selesai adalah kunci untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah, agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki hati yang tenang dan damai.

Wallahu a'lam bish-shawwab.

## 4

# Al-Quds dan Tali Ruhani Umat Islam Dunia

Al-Quds atau Masjid al-Aqsha di Palestina merupakan situs suci umat Islam yang pernah menjadi kiblat pertama sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekkah. Masjid ini terletak di kompleks Haram al-Sharif di Yerusalem dan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan berbagai nabi. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ath-Thabari, dan al-Qurthubi, al-Aqsha pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa pembangunan awal dilakukan oleh Nabi Adam AS, kemudian diperbaharui oleh Nabi Ibrahim AS dan direnovasi secara besar-besaran oleh Nabi Sulaiman AS. Bangunan ini mengalami kehancuran akibat serangan Babilonia, namun kembali direnovasi oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab RA, serta diperluas pada era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah.

Pasca runtuhnya kekhalifahan Utsmani, kondisi al-Aqsha semakin terancam setelah berdirinya negara Israel pada 1948. Sejak saat itu, konflik dan upaya penguasaan oleh Israel semakin meningkat, sementara umat Islam Palestina terus berada dalam tekanan. Negara-negara Arab dan umat Muslim di seluruh dunia tidak memiliki daya untuk membebaskan al-Aqsha dari kendali Israel, mengingat kuatnya lobi internasional yang mengamankan kepentingan mereka di kawasan tersebut.

### **Al-Quds sebagai Simbol Tali Ruhani Umat Islam Dunia**

Masjid al-Aqsha adalah satu dari tiga masjid utama dalam Islam yang memiliki keutamaan pahala bagi yang beribadah di dalamnya. Rasulullah SAW menyebut bahwa satu kali shalat di al-Aqsha setara dengan 500 kali shalat di masjid lain. Dalam berbagai hadis, al-Aqsha disebut sebagai masjid kedua yang

dibangun di muka bumi, memiliki keutamaan pahala besar, termasuk dalam tiga masjid utama Islam, serta tempat diampuninya dosa bagi yang shalat di dalamnya. Selain itu, al-Aqsha juga menjadi tempat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj sebelum menuju Sidratul Muntaha.

Bagi kalangan sufi, al-Aqsha memiliki makna spiritual yang mendalam, menjadi titik perjalanan menuju kesadaran ilahi. Dalam sejarah, Yerusalem merupakan tempat dakwah para nabi, khususnya bagi Bani Israil. Secara bahasa, "Bani Israil" berasal dari istilah Ibrani "esra eli," yang berarti "berjalan menuju Tuhan" atau "hamba yang diperjalankan Tuhan." Ini mencerminkan konsep ketundukan kepada Allah, yang menjadi inti dari ajaran tauhid dan sufisme.

Pernyataan bahwa shalat adalah mi'raj bagi orang beriman memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dalam Islam, shalat merupakan ibadah utama yang menjadi pembeda antara iman dan kekufuran. Perintah shalat langsung diterima Nabi Muhammad SAW saat Isra' dan Mi'raj, menegaskan hubungan zahir dan batin antara al-Aqsha dan ibadah shalat. Oleh karena itu, al-Aqsha tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga simbol spiritual bagi seluruh umat Islam.

Bagi para sufi, ibadah shalat bukan hanya sekadar ritual fisik, melainkan sarana untuk terus menghubungkan ruhani dengan Allah SWT. Mereka berlatih menjaga hati dan pikiran agar selalu terhubung dengan-Nya dalam segala keadaan, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 190-191. Zikir yang terus-menerus dilakukan merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan koneksi batin seorang hamba dengan Tuhannya.

Syeikh Khalid al-Jundi menegaskan bahwa al-Aqsha adalah pintu langit, kiblat para nabi, dan tempat yang penuh keberkahan. Dengan demikian, isu Palestina dan masjid al-Aqsha bukan sekadar persoalan politik, melainkan juga bagian dari sejarah, keimanan, dan identitas umat Islam. Masjid ini

merupakan simbol tali ruhani yang menghubungkan seluruh Muslim di dunia dengan nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, penderitaan kaum Muslimin di Palestina sejatinya adalah penderitaan umat Islam secara keseluruhan.

Konflik yang terus berlangsung di Gaza menjadi bukti nyata bahwa Israel tidak akan berhenti sebelum berhasil membangun Kuil Sulaiman di atas reruntuhan Masjid al-Aqsha. Namun, jika umat Islam di seluruh dunia memiliki kekuatan dan persatuan, bukan tidak mungkin al-Aqsha akan kembali ke tangan Muslim, bersamaan dengan kemerdekaan Palestina. Semoga umat Islam di seluruh dunia tidak berada pada titik iman yang lemah dan terus berjuang untuk keadilan serta kebebasan al-Aqsha dari penjajahan.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 5 Masjid dan Politisasi Agama

Dalam perspektif sosiologi agama, Emile Durkheim menegaskan bahwa agama tidak hanya berkaitan dengan keyakinan individu, tetapi juga terintegrasi dalam komunitas moral yang dalam Islam diwujudkan melalui masjid. Agama memiliki dimensi sosial yang menghubungkan individu dalam ruang yang lebih luas. Oleh karena itu, masjid idealnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat dalam berbagai aspek sosial, termasuk pendidikan dan dakwah yang menanamkan nilai-nilai toleransi serta penghormatan terhadap perbedaan.

Pesan keagamaan yang disampaikan di masjid seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan tidak berorientasi pada permusuhan atas dasar perbedaan pandangan politik maupun keagamaan. Namun, dalam praktiknya, masjid sering kali menjadi sarana penyampaian kepentingan tertentu, terutama menjelang tahun politik seperti Pemilu 2024. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan politisasi agama yang berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat.

### **Masjid dalam Arus Politisasi Agama**

Politisasi agama merujuk pada penggunaan ajaran, doktrin, simbol, atau retorika keagamaan untuk tujuan politik praktis. Dalam konteks ini, masjid kerap dimanfaatkan sebagai sarana kampanye terselubung oleh kelompok atau individu tertentu guna memperoleh keuntungan politik dan ekonomi.

Secara historis, masjid memiliki fungsi yang beragam, termasuk dalam aspek politik dan sosial. Pada masa Rasulullah SAW, masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga sebagai tempat diskusi berbagai isu strategis. Namun,

karena Rasulullah SAW memiliki integritas moral yang tinggi, fungsi politik masjid kala itu tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Berbeda dengan masa kini, sejak era kekuasaan Dinasti Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah, masjid mulai digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Mimbar khutbah Jumat menjadi sarana propaganda yang tidak jarang berisi pencitraan penguasa dan penghujatan terhadap lawan politik. Bahkan, manipulasi hadis dan teks keagamaan kerap terjadi demi mendukung kepentingan tertentu.

Ketika masjid menjadi wadah politik nilai, maka ia tetap berfungsi sebagai institusi yang membawa kemaslahatan. Namun, jika masjid dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, maka ia hanya akan menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat. Akibatnya, muncul fragmentasi di antara jamaah yang saling bertentangan.

Dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu secara tegas melarang penggunaan tempat ibadah sebagai arena kampanye politik. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas masjid dan mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan masjid sebagai alat politik dapat memperburuk ukhuwah Islamiyah dan menciptakan friksi di antara jamaah yang memiliki pilihan politik berbeda.

Dalam teori Cultural Pluralism: Mosaic Analogy, masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya memiliki hak untuk mengekspresikan identitas mereka secara demokratis. Oleh karena itu, masjid harus menjadi ruang yang inklusif dan tidak boleh dikooptasi oleh satu kelompok tertentu. Masjid harus tetap menjadi tempat yang mempersatukan umat, bukan menjadi alat untuk memperkuat kepentingan politik eksklusif.

## Upaya Menjaga Netralitas Masjid

Agar masjid tetap berfungsi sebagai institusi yang independen dan bebas dari kepentingan politik praktis, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk memastikan bahwa masjid dikelola secara profesional dan inklusif.
2. Menjaga independensi masjid dari kepentingan politik tertentu.
3. Memilih khatib dan penceramah yang memiliki kapasitas keilmuan dan sikap moderat agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah jamaah.
4. Menentukan tema ceramah yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama guna membangun kesadaran kolektif yang inklusif.
5. Meningkatkan aktivitas keagamaan berbasis zikir dan kajian keislaman yang menekankan penguatan moral dan etika sosial.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan masjid guna memastikan bahwa semua aktivitas yang diselenggarakan tetap dalam koridor nilai-nilai universal Islam.
7. Memberikan ruang bagi jamaah untuk menyampaikan kritik dan saran demi peningkatan manajemen masjid yang lebih profesional.
8. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa masjid tetap menjadi sarana ibadah dan edukasi bagi umat.

Dalam negara demokratis seperti Indonesia, di mana masyarakatnya memiliki latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan yang beragam, masjid harus tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh umat Islam. Institusi keagamaan tidak boleh menjadi alat politik yang sempit, melainkan harus

digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 6

**Menjadi Hamba Sejati**

Tidak semua orang merasa nyaman dengan predikat sebagai hamba. Dalam pemahaman umum, istilah “hamba” sering kali dikaitkan dengan posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan “tuan.” Dalam budaya Jawa, kata ‘abdi’ digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengabdikan diri kepada orang lain, serupa dengan konsep servant dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, pegawai negeri disebut sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang berarti mereka bertugas melayani rakyat.

Banyak orang menghindari identitas sebagai hamba karena lebih menginginkan posisi yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Kata “tuan” sering kali diasosiasikan dengan kehormatan dan kepemimpinan, sementara “hamba” dianggap sebagai posisi subordinat. Dalam banyak tradisi, pemegang kekuasaan memiliki berbagai sebutan seperti raja, gusti, atau lord dalam budaya Barat, yang dalam beberapa kitab suci bahkan diterjemahkan sebagai Tuhan.

**Hamba sebagai Kedudukan Tertinggi**

Dalam Al-Qur’an, justru gelar hamba merupakan posisi yang mulia bagi orang-orang beriman. Dalam QS. Al-Fajr: 28-30, Allah berfirman:

*“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.”*

Ayat ini menegaskan bahwa status hamba adalah suatu kehormatan yang membawa seseorang kepada surga. Seorang hamba sejati memiliki jiwa yang bersih dan penuh ketundukan kepada Allah.

Sebaliknya, Allah sangat membenci manusia yang merasa lebih tinggi, lebih hebat, dan enggan tunduk kepada-Nya. Sifat sombong yang dimiliki Iblis, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 34, menjadi sebab kehinaannya. Kesombongan yang diungkapkan dalam kalimat “Aku lebih baik darinya” adalah wujud keangkuhan yang menghalangi seseorang dari memperoleh rahmat Allah.

Dalam hadis, Rasulullah SAW mendefinisikan kesombongan sebagai sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain (HR. Muslim). Sepanjang sejarah, mereka yang memiliki posisi sebagai tuan sering kali terjerumus dalam sikap merendahkan sesama. Sebaliknya, seorang hamba sejati selalu berada dalam kondisi *sami'na wa atha'na*—mendengar dan menaati perintah Allah.

### **Hamba Sejati dalam Perspektif Tasawuf**

Dalam tradisi tasawuf, menjadi hamba adalah kunci menuju pencerahan spiritual dan pembersihan jiwa (*tazkiyah an-nafs*). Kesadaran akan posisi rendah sebagai makhluk Allah akan membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Tuhannya. Siapa yang memahami dirinya sebagai hamba, ia akan mengenal Tuhannya.

Al-Qur'an menegaskan bahwa seorang hamba sejati memiliki ciri-ciri berikut:

1. Suka bersujud dan tidak lalai dalam mengingat Allah (QS. Al-Furqan: 64-65).
2. Tidak berlebihan dalam hidupnya, tetapi gemar berbagi (QS. Al-Furqan: 67-72).
3. Menjaga lisan dan perilaku, tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak melakukan kemaksiatan, dan selalu bertobat jika berbuat salah.
4. Mawas diri dan rendah hati, serta memiliki kepedulian terhadap sesama.

Seorang hamba sejati memiliki keseimbangan antara amal batin dan amal lahir, sedangkan hamba palsu sering kali

hanya berfokus pada pencitraan dan amal yang tidak tulus. Ibadahnya dilakukan bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi. Ini bertentangan dengan prinsip *La ilaha illa Allah*, yang menegaskan bahwa tidak ada yang lebih utama untuk disembah selain Allah.

### **Mencapai Derajat Hamba Sejati**

Menjadi hamba sejati bukanlah hal yang mudah. Ikhlas adalah inti dari penghambaan, dan mencapainya membutuhkan latihan spiritual yang terus-menerus. Pendidikan ruhani (tarbiyah ruhiyah) harus dijalani secara konsisten agar seseorang dapat benar-benar tunduk kepada Allah.

Sayangnya, fenomena sosial saat ini justru memperlihatkan banyak orang yang lebih memilih menjadi “tuan” daripada “hamba.” Pejabat yang seharusnya menjadi abdi negara malah memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, dan menyalahgunakan jabatan. Ketika seorang hamba mulai merasa sebagai tuan, maka sistem akan rusak, dan keadilan akan terpinggirkan.

Di era modern ini, manusia semakin kehilangan ketertarikan untuk menjadi hamba. Padahal, justru inilah kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Semoga kita semua dapat menjadi hamba sejati yang senantiasa berada dalam ridha-Nya.

Wallahu a’lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 7

## **Teologi Keadilan: Membebaskan Masyarakat dari Belenggu Kecurangan**

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran agama dan kehidupan sosial. Dalam Islam, konsep keadilan sangat ditekankan sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang ideal. Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan, bahkan terhadap diri sendiri atau orang-orang terdekat. Rasulullah SAW juga mencontohkan prinsip keadilan dalam kepemimpinannya, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi.

Namun, dalam realitas kehidupan modern, prinsip keadilan sering kali terkikis oleh praktik kecurangan yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari birokrasi, hukum, hingga ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai-nilai teologis yang diajarkan dan praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, konsep Teologi Keadilan perlu dipahami sebagai panduan dalam membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakadilan dan kecurangan.

### **Makna Teologi Keadilan**

Secara etimologis, teologi merupakan kajian tentang ketuhanan dan nilai-nilai ilahi, sedangkan keadilan merujuk pada sikap menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hak dan proporsinya. Dalam Islam, teologi keadilan berkaitan erat dengan konsep tauhid, di mana seseorang yang beriman kepada Allah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupannya.

Teologi keadilan menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan

berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 135 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan meskipun harus berhadapan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki ketakwaan sejati tidak akan terlibat dalam praktik kecurangan atau ketidakadilan.

### **Bentuk Kecurangan dalam Masyarakat**

Berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat mencerminkan lemahnya penerapan teologi keadilan. Beberapa contoh nyata yang dapat ditemukan di berbagai sektor adalah:

1. **Korupsi dan Nepotisme**  
Praktik penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan.
2. **Manipulasi Hukum**  
Hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan sering kali dipermanipulasi oleh mereka yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.
3. **Eksplotasi Ekonomi**  
Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat sering kali disebabkan oleh sistem yang lebih menguntungkan segelintir orang, sementara yang lain harus berjuang keras untuk bertahan hidup.
4. **Diskriminasi Sosial**  
Perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, atau gender masih menjadi permasalahan yang merusak tatanan sosial.
5. **Pemalsuan dalam Pendidikan dan Akademik**  
Praktik jual beli gelar akademik, plagiarisme, serta manipulasi nilai adalah bentuk ketidakjujuran yang berlawanan dengan prinsip keadilan.

## **Solusi Teologi Keadilan dalam Mengatasi Kecurangan**

Untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kecurangan, konsep teologi keadilan harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Menanamkan Kesadaran Spiritual tentang Keadilan  
Pendidikan agama harus menekankan pentingnya nilai keadilan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.
2. Memperkuat Sistem Hukum yang Berbasis Keadilan  
Reformasi hukum harus dilakukan agar tidak ada lagi celah bagi manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.
3. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas  
Institusi pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat harus menjunjung tinggi keterbukaan dalam segala aspek kehidupan.
4. Menguatkan Peran Masyarakat Sipil  
Rakyat harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk kecurangan.
5. Menegakkan Hukuman yang Adil  
Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kecurangan harus diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Dengan menerapkan nilai-nilai teologi keadilan secara nyata, masyarakat dapat bergerak menuju kehidupan yang lebih beradab, di mana kejujuran dan keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan. Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 8

# Membentuk Manusia Spiritual Melalui Perilaku Puasa

Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang diakui oleh hampir semua agama di dunia sebagai sarana latihan spiritual dan pengendalian diri. Dalam Islam, puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Tujuan utama dari puasa adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran spiritual tinggi, sehingga mereka tidak hanya menjalankan ibadah secara ritualistik, tetapi juga menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalani puasa secara benar, seseorang dapat membangun karakter yang lebih sabar, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

### **Puasa sebagai Latihan Spiritual**

Puasa memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa aspek penting dari puasa dalam membangun kesadaran spiritual antara lain:

1. **Pengendalian Diri**  
Dengan menahan diri dari berbagai godaan duniawi, seseorang belajar untuk tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan sesaat.
2. **Kesabaran dan Ketahanan Mental**  
Puasa mengajarkan individu untuk bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan, baik fisik maupun emosional.
3. **Kesadaran Sosial**  
Melalui pengalaman lapar dan haus, seseorang lebih mudah

memahami kondisi orang-orang yang kurang beruntung dan terdorong untuk berbagi.

4. Kebersihan Jiwa

Dengan berpuasa, seseorang membersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan amarah, serta meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan.

### **Puasa dalam Perspektif Multidimensional**

Puasa tidak hanya berfungsi dalam aspek spiritual, tetapi juga memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan:

1. Aspek Fisik

Puasa yang dijalankan dengan benar dapat memberikan manfaat kesehatan, seperti detoksifikasi tubuh dan peningkatan metabolisme.

2. Aspek Psikologis

Puasa membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan membangun ketenangan batin.

3. Aspek Sosial

Dengan berpuasa, seseorang lebih termotivasi untuk meningkatkan empati dan solidaritas terhadap sesama.

4. Aspek Moral

Puasa melatih seseorang untuk berkata dan bertindak dengan lebih bijaksana, menghindari perilaku buruk, serta meningkatkan integritas diri.

### **Implementasi Nilai Puasa dalam Kehidupan Sehari-hari**

Agar nilai-nilai yang diperoleh dari puasa dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya untuk:

1. Menjadikan Puasa sebagai Gaya Hidup

Tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga membiasakan diri dengan puasa sunah dan pengendalian diri dalam keseharian.

2. Menerapkan Sikap Rendah Hati dan Toleransi  
Menghormati orang lain, terutama dalam perbedaan pandangan dan keyakinan, serta tidak mudah tersulut emosi.
3. Mengembangkan Kepedulian Sosial  
Aktif dalam kegiatan amal dan berbagi dengan sesama, baik dalam bentuk materi maupun tenaga.
4. Menjaga Kesucian Hati dan Pikiran  
Menghindari hal-hal yang dapat merusak moral dan spiritualitas, seperti gosip, kebohongan, dan ketidakjujuran.

Puasa bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga sarana efektif untuk membentuk manusia yang lebih baik secara spiritual, sosial, dan moral. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menjadi individu yang lebih berkarakter, berempati, dan memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 9

# Mendidik Perilaku Religius Melalui Budaya

Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya dan keragaman ekspresi kulturalnya. Sebutan Nusantara menggambarkan beragam tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di setiap wilayahnya. Keanekaragaman ini merupakan bagian dari identitas bangsa yang akan terus ada dan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan bukanlah menghapus tradisi, tetapi memberikan makna baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, simbol dan ekspresi budaya tetap dapat bertahan, namun dengan pemaknaan yang lebih aktual.

Dalam teori budaya, terdapat konsep *change and continuity*, yang menyatakan bahwa budaya dapat berubah dan berlanjut selama masih memiliki makna dan relevansi bagi masyarakatnya. Tradisi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman akan ditinggalkan, sementara budaya yang masih memiliki nilai akan terus bertahan. Contohnya, di masyarakat Melayu Palembang, regulasi adat seperti *Oendang-oendang Simboer Tjahadja* telah hilang seiring dengan perubahan sistem sosial. Pergeseran makna budaya ini juga terjadi di berbagai daerah lain, di mana simbol lama sering kali diperbarui dengan pemaknaan yang lebih kontekstual.

### **Memahami Nilai Agama melalui Simbol Budaya**

Dalam perspektif peradaban, simbol budaya merupakan wujud dari nilai-nilai filosofis yang dianut masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh setiap individu, tergantung pada wawasan dan lingkungan sosialnya. Satu peristiwa budaya dapat memiliki berbagai makna tergantung dari sudut pandang yang digunakan.

Sebagai contoh, ajaran agama yang mendorong umatnya untuk berbagi makanan dapat diimplementasikan dalam bentuk tradisi kenduri atau kenduren. Konsep kebersihan dan wewangian dalam Islam dapat diwujudkan dalam kebiasaan membakar dupa atau kemenyan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Namun, simbolisme budaya ini terkadang dianggap bertentangan dengan ajaran agama oleh kelompok tertentu yang lebih menekankan pada formalisme agama.

Tradisi seperti shalawatan, sema'an, yasinan, dan tahlilan adalah contoh bagaimana nilai-nilai agama dapat diajarkan melalui budaya. Proses ini merupakan upaya untuk membumikan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tidak ada yang salah dalam pelestarian budaya, selama substansi dan nilai-nilai inti dalam agama tetap dijaga. Perbedaan antara Islam substantif dan Islam formalisme menjadi relevan dalam memahami cara berbagai kelompok dalam mengadopsi budaya dalam praktik keagamaan.

### **Penyebaran Agama Islam dan Peran Budaya**

Tradisi keagamaan di Indonesia berkembang seiring dengan proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh para ulama. Strategi dakwah yang digunakan pada masa lalu sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang masih menganut sistem kepercayaan lama. Oleh karena itu, metode dakwah yang lebih inklusif dan adaptif lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang konfrontatif. Pendekatan ini berhasil menarik simpati masyarakat, sehingga Islam dapat menyebar dengan cepat ke seluruh Nusantara.

Para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia cenderung memiliki latar belakang sufistik, yang berfokus pada aspek spiritualitas dan kearifan lokal. Konsep ketuhanan dalam ajaran Islam juga dapat ditemukan dalam falsafah Jawa seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari keseimbangan semesta. Keyakinan atau iman adalah aspek yang sangat pribadi dan sulit diaktualisasikan dalam bentuk ritual fisik semata. Oleh karena

itu, kaum sufi lebih berhati-hati dalam menilai perbedaan dalam praktik keagamaan.

Dalam doktrin normatif, sering dikatakan bahwa formalitas dalam ibadah tidak selalu mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Banyak orang yang secara lahiriah tampak beribadah, tetapi sebenarnya tidak memiliki kesadaran spiritual yang mendalam. Para penganut tasawuf lebih menekankan aspek batiniah dan pembersihan jiwa (*tazkiyah an-nafs*), yang tercermin dalam praktik tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi lebih menekankan pada konsep ketuhanan yang mendalam, sementara tasawuf akhlaki lebih berfokus pada pembentukan perilaku yang baik sebagai cerminan dari pemahaman agama yang benar.

### **Moderasi Beragama dan Tantangan Islam Formalistik**

Formalisme agama sering kali menyebabkan seseorang menolak ekspresi budaya tertentu yang dianggap menyimpang dari ajaran agama. Sikap seperti ini dapat menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat yang multikultural. Dalam sejarah, semua agama memiliki kelompok yang berorientasi pada formalisme dan kelompok yang lebih substantif. Oleh karena itu, potensi ekstremisme selalu ada dalam setiap agama.

Di sinilah pentingnya memahami agama secara moderat (*washatiyah*), agar tidak terjebak dalam ekstremisme. Islam yang berkembang di Indonesia sejak awal telah menunjukkan karakter sebagai Islam moderat yang mengedepankan sikap toleransi (*tasamuh*). Pendekatan ini memungkinkan berkembangnya budaya berbasis nilai-nilai Islam yang tetap selaras dengan pluralitas masyarakat. Keberagaman budaya di Indonesia seharusnya tidak menjadi penghalang bagi terciptanya masyarakat yang saling menghargai dan hidup dalam harmoni. Semoga nilai-nilai Islam moderat dapat terus berkembang dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 10

### Guru Ngaji Tikar (Tradisi Pembelajaran al-Qur'an Masyarakat Melayu yang Dilupakan)

Sekitar 45 tahun yang lalu, ketika penulis masih duduk di bangku sekolah dasar di Bangka, yang saat itu masih menjadi bagian dari Sumatera Selatan, masyarakat Melayu masih mempertahankan tradisi belajar membaca al-Qur'an dengan metode yang dipandu oleh seorang guru ngaji tikar. Namun, kini tradisi ini mulai menghilang, hanya menyisakan segelintir guru yang masih menerapkannya. Bahkan, tidak semua kampung memiliki guru ngaji dengan pola ini. Saat ini, pengajaran membaca al-Qur'an lebih bersifat administratif dan banyak dilakukan di masjid-masjid dalam naungan TK-TPA, dengan tenaga pengajar yang umumnya masih muda.

Tradisi ngaji tikar di masyarakat Melayu Bangka memiliki ciri khas karena fokus utamanya adalah mengajarkan cara membaca al-Qur'an. Tradisi ini berbeda dengan *garang* dan *cawisan* di masyarakat Melayu Sumatera Selatan, yang lebih berorientasi pada kajian kitab dan ceramah keagamaan. Ngaji tikar lebih bersifat khusus untuk anak-anak dan remaja, dengan tujuan utama agar mereka mampu membaca al-Qur'an dengan baik. Di masa lalu, seseorang yang tidak bisa membaca al-Qur'an dianggap sebagai aib bagi keluarga Muslim.

Jika ditinjau dari teori pembelajaran modern, tradisi ngaji tikar tidak hanya berorientasi pada hasil pembelajaran langsung (*instructional effect*), tetapi juga memiliki dampak pengiring (*nurturant effect*). Efek utama dari tradisi ini adalah kemampuan membaca al-Qur'an, sedangkan dampak pengiringnya adalah terbentuknya adab dan sikap hormat terhadap kitab suci. Sayangnya, aspek adab dalam

pembelajaran al-Qur'an semakin berkurang dalam metode pengajaran saat ini.

### **Tradisi Ngaji Tikar: Materi dan Prosesnya**

Sebutan ngaji tikar dalam masyarakat Melayu Sumatera Selatan mengacu pada metode pembelajaran membaca al-Qur'an yang berfokus pada dua aspek utama: keindahan bacaan dan ketepatan tajwid. Bacaan yang baik diartikan sebagai bacaan yang memiliki irama indah dan menyentuh hati, sementara bacaan yang benar merujuk pada ketepatan dalam penerapan hukum tajwid.

Secara tradisional, istilah ngaji tikar berasal dari penggunaan tikar purun sebagai alas duduk bagi guru dan murid saat proses pembelajaran berlangsung. Rumah guru ngaji biasanya menjadi tempat belajar, dengan ruang tengah yang difungsikan sebagai lokasi pengajian. Setiap malam, setelah shalat Maghrib, murid-murid datang, menggelar tikar, dan duduk melingkar menghadap guru. Jumlah peserta biasanya berkisar antara lima hingga sepuluh orang dan tetap bertahan hingga mereka menyelesaikan pembelajaran al-Qur'an 30 juz.

Dalam sistem ngaji tikar, murid dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Murid pemula dikenal dengan sebutan murid Alif Ba Ta, yang mempelajari huruf hijaiyyah sebagai dasar membaca al-Qur'an. Kelompok kedua disebut murid ngaji surat kecil, yang menggunakan Juz 'Amma sebagai bahan belajar. Sedangkan kelompok lanjutan disebut murid ngaji surat besar, yang langsung membaca mushaf al-Qur'an secara berurutan hingga tamat.

Metode yang digunakan dalam tradisi ngaji tikar dikenal sebagai metode turutan atau ngaji turutan. Pola ini mengandalkan teknik membaca yang diawali dengan bacaan guru yang kemudian diikuti oleh murid. Proses ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sering kali memakan waktu berbulan-bulan, hingga murid berhasil menyelesaikan bacaan al-Qur'an 30 juz. Setelah tamat, diadakan acara *ngatam qur'an*,

yang merupakan bentuk perayaan atas pencapaian tersebut. Pada acara ini, keluarga murid menggelar kenduri di rumah guru ngaji sebagai bentuk rasa syukur. Setelahnya, murid dianjurkan untuk terus membaca al-Qur'an sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari, sebagaimana yang telah menjadi tradisi masyarakat Melayu sejak lama.

### **Mendidik Adab Melalui Tradisi Ngaji Tikar**

Tujuan utama tradisi ngaji tikar bukan sekadar untuk mengajarkan cara membaca al-Qur'an, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi insan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

*“Sebaik-baik manusia adalah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya” (khairunnas man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu).*

Membaca al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengeja huruf dan merangkai kata, tetapi juga menanamkan sikap hormat terhadap kitab suci. Dalam tradisi ngaji tikar, murid diajarkan untuk berpakaian rapi saat mengaji. Mereka dilarang bercanda atau berbicara sembarangan di perjalanan menuju tempat belajar. Murid laki-laki mengenakan sarung dan kopiah, sedangkan murid perempuan memakai baju kurung dan penutup kepala.

Mushaf al-Qur'an atau kitab turutan yang digunakan oleh murid harus dibawa dengan cara yang sopan, yakni diletakkan di dada dan disedekapkan. Hal ini melambangkan bahwa al-Qur'an harus selalu dekat dengan hati. Selain itu, sebelum dan sesudah membaca al-Qur'an, murid diajarkan untuk mencium mushaf sebagai bentuk penghormatan terhadap wahyu Ilahi. Mereka juga diwajibkan berwudhu sebelum menyentuh al-Qur'an, sebagai simbol bahwa kesucian wahyu hanya dapat dijangkau oleh diri yang suci pula.

Guru ngaji tikar biasanya merupakan individu yang memiliki kefasihan dalam membaca al-Qur'an serta berakhlak baik. Mereka mengajarkan tanpa mengharapkan imbalan materi. Murid yang datang biasanya membawa minyak tanah

untuk penerangan atau hasil kebun sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Kemampuan membaca al-Qur'an yang dimiliki para guru ini diperoleh melalui transmisi keilmuan yang bersanad dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian dari tradisi keilmuan Islam yang otentik.

Dalam budaya Melayu, mencium tangan guru adalah bentuk tabarruk atau pencarian berkah ilmu. Sikap ini mengajarkan murid untuk selalu menghormati ilmu dan orang yang mengajarkannya. Kebiasaan ini juga berperan dalam menanamkan kerendahan hati dan mencegah sifat sombong. Seseorang yang angkuh umumnya sulit untuk menghormati orang lain dan enggan untuk merendahkan diri dalam mencari ilmu.

Semakin langkanya tradisi ngaji tikar di masyarakat Melayu Sumatera Selatan menjadi indikasi mulai hilangnya pendidikan adab terhadap al-Qur'an. Saat ini, pembelajaran membaca al-Qur'an lebih dipandang sebagai proses akademik biasa yang dapat dilakukan dengan berbagai metode modern. Namun, nilai-nilai kesakralan dan penghormatan terhadap kitab suci semakin terkikis dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, jika ingin menjaga dan melestarikan budaya Melayu yang berbasis nilai-nilai Islam, maka tradisi ngaji tikar perlu dihidupkan kembali sebagai bagian dari warisan peradaban Islam di Nusantara.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

## 11

## **Kontekstualisasi Makna Jihad (Respon Terhadap Kebijakan Kurikulum Moderasi)**

Dalam perkembangan kebijakan kurikulum di Indonesia, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi paham radikal melalui pendidikan. Salah satu regulasi yang dikeluarkan adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 Tahun 2019, yang mengarahkan pengajaran agama agar lebih berfokus pada penguatan karakter dan semangat moderasi beragama. Namun, kebijakan ini menimbulkan reaksi dari sebagian kalangan umat Islam karena dinilai terlalu jauh mengintervensi materi agama yang telah dianggap mapan. Dampak dari kebijakan ini mencakup revisi terhadap materi jihad dan khilafah dalam mata pelajaran Fikih serta Sejarah Kebudayaan Islam.

Pada tingkat akar rumput, kebijakan ini memunculkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam terkait konsep jihad. Secara sosiologis, hal ini mendorong masyarakat Islam untuk memahami jihad dalam konteks sosial-politik saat ini serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi para pendidik agama, kebijakan ini menimbulkan tantangan akademik mengingat konsep jihad telah lama menjadi bagian dari literatur Islam.

### **Konsep Jihad: Pemaknaan Tekstual dan Kontekstual**

Secara normatif, ajaran jihad dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 19, QS. At-Tawbah: 20, QS. Al-'Ankabūt: 6, 69, dan QS. Al-Hujurat: 15. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud juga menyebutkan bahwa salah satu amalan terbaik setelah salat tepat waktu dan

berbakti kepada orang tua adalah berjihad di jalan Allah (Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*).

Pemaknaan terhadap jihad terbagi menjadi dua kelompok utama: yang memahaminya secara tekstual dan yang menafsirkannya secara kontekstual. M. Sa'id Ramadhan al-Buthy mengartikan jihad sebagai peperangan terhadap mereka yang menolak pengakuan Allah sebagai Tuhan (al-Buthy, 2001). Definisi ini juga sejalan dengan penjelasan dalam *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* yang menyebut jihad sebagai “perang suci umat Islam melawan pihak yang menentang ajaran Islam” (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 2003). Mazhab Syafi'iyah, yang banyak dianut di Indonesia, juga memahami jihad sebagai usaha memerangi orang kafir untuk meninggikan Islam (Zuhaili, 2011).

Dalam sejarah Islam Nusantara, kitab *Nasīḥah al-Muslimīn wa Tazkirah al-Mu'minīn* karya Syeikh Abdussomad al-Palimbani telah berpengaruh besar dalam membentuk pemahaman jihad sebagai perang melawan penjajah. Kitab ini dipelajari luas sejak abad ke-18 dan menjadi rujukan dalam perlawanan terhadap kolonialisme (Abdullah, 2017). Pemahaman ini juga tercermin dalam *Hikayat Perang Sabil*, yang berisi ajakan jihad fisik melawan musuh Islam.

Namun, sejumlah ulama seperti Syeikh as-Sa'adi (1991), Abu Qasim (2004), Ibn Katsir, al-Qurthubi, dan Zamakhsyari (2012) menolak pembatasan jihad hanya dalam konteks perang. Mereka menegaskan bahwa dalam situasi damai (*darussalam*), jihad lebih relevan jika dipahami sebagai usaha dalam pendidikan, dakwah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Kurikulum Moderasi dan Pengajaran Jihad**

Kekhawatiran pemerintah terhadap meningkatnya paham radikal di institusi pendidikan melahirkan kebijakan kurikulum moderasi. Hal ini diperkuat oleh temuan survei Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Yogyakarta yang menyatakan bahwa 60 persen siswa SMA terpapar paham

radikal melalui organisasi Rohani Islam (Jogja.com, 2020). Riset Setara Institute juga menunjukkan bahwa 10 perguruan tinggi umum di Indonesia terindikasi memiliki mahasiswa yang terpapar paham radikal (Abdi, 2019). Hasil survei LIPI pada tahun 2016 mencatat bahwa 84,8% siswa dan 76,2% guru mendukung penerapan syariat Islam, sementara 5% mahasiswa bahkan menyatakan dukungan terhadap kelompok ISIS (Hadiwilaga & Harija, 2018). Penyebaran radikalisme di sekolah umumnya melalui tiga jalur utama: kurikulum, soal ujian, dan peran guru (Ramadhan, 2019).

Radikalisasi di lingkungan pendidikan sering kali terjadi melalui pemahaman sempit mengenai jihad. Oleh karena itu, kontrol terhadap pengajaran agama Islam menjadi penting agar tidak bertentangan dengan kebijakan moderasi beragama yang dikembangkan pemerintah. Sebagian pihak justru melihat kurikulum moderasi sebagai langkah positif dalam membentuk karakter yang santun, toleran, dan humanis. Namun, revisi terhadap konten jihad dalam pelajaran agama Islam dianggap sebagai tindakan yang kurang bijaksana, karena materi tersebut memiliki dasar literatur keislaman yang kuat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal lebih banyak terjadi melalui media sosial daripada kurikulum sekolah (Wijayanti, 2020). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang terlalu berfokus pada revisi kurikulum dapat menjadi kurang efektif dan kontraproduktif. Idealnya, pendekatan dalam perubahan kurikulum melibatkan para guru dalam pengembangannya, sehingga tidak terjadi keterkejutan akademik dalam implementasi kebijakan tersebut.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 12

## **Paradigma Tauhidik: Cara Pandang Multidisiplin dalam Memahami Islam**

Diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Raden Fatah bersama Profesor M. Amin Abdullah menarik perhatian, khususnya terkait pengembangan epistemologi keilmuan Islam dalam menghadapi tantangan modernitas dan perubahan sosial di era digital. Wacana mengenai pendekatan Islam melalui perspektif sains atau cukup dengan ilmu-ilmu keagamaan tradisional telah menjadi perdebatan yang cukup panjang. Sebagian berpendapat bahwa ilmu-ilmu agama sudah cukup mapan untuk memahami Islam, sementara ilmu sains dianggap kurang relevan dalam konteks ini.

Sejak tahun 1970-an, perdebatan ini mulai mendapatkan titik terang melalui pandangan Prof. Mukti Ali yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Beliau menegaskan bahwa Islam sebagai objek kajian dapat didekati melalui pendekatan agama dan sains sekaligus. Sebagai fenomena sosial dan budaya, Islam dapat dipahami dengan pendekatan ilmiah yang lebih luas. Mukti Ali menekankan bahwa kajian Islam harus menggunakan pendekatan *scientific cum doctrinal*, yang menekankan bahwa pemahaman agama tidak hanya berbasis normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan ilmiah dalam menganalisis fenomena sosial dan budaya.

Wacana mengenai pendekatan multidisipliner dalam memahami Islam semakin relevan ketika melihat respons umat Islam terhadap perubahan sosial yang cepat dan berbagai isu baru dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Cara pandang yang lebih luas dan toleran diperlukan agar umat Islam dapat memahami dinamika kehidupan modern secara lebih bijaksana. Tulisan ini berupaya menjelaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam

memahami Islam agar lebih universal dan tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit.

### **Pendekatan Multidisipliner sebagai Paradigma Tauhidik**

Konsep paradigma tauhidik pertama kali diperkenalkan oleh M. Amin Abdullah sebagai pendekatan integrasi-interkoneksi dalam epistemologi keilmuan Islam. Konsep ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu agama dan ilmu sekuler, sehingga dikotomi keilmuan yang tidak produktif dapat dieliminasi. Dalam model paradigma tauhidik, hubungan antara sains dan agama harus bersifat dialogis, saling melengkapi, serta membentuk sinergi dalam menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif.

Gagasan yang membangun pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sains telah banyak ditentang karena dinilai tidak produktif dalam membangun cara pandang intelektual yang lebih modern. Dikotomi ilmu hanya akan menghambat umat Islam dalam menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, umat Islam cenderung kurang fokus dalam mengeksplorasi bidang sains dan teknologi karena dianggap sebagai ilmu yang sekunder dibandingkan ilmu agama.

PENERBITAN BUKU INDONESIA

Dalam konstruksi epistemologi yang berbasis paradigma tauhidik, semua cabang keilmuan memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam kehidupan. Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi pedoman utama dalam membangun sistem keilmuan, tetapi penerapan nilai-nilai tauhid dalam ilmu pengetahuan juga harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan konsep ini, narasi keilmuan berbasis sains dapat tetap terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Permasalahan sosial-keagamaan yang sering kali menimbulkan konflik dapat diatasi dengan pendekatan holistik dalam membaca fenomena sosial. Sebagai contoh, ketika umat Islam mengalami kebingungan dalam memahami prosedur penyelenggaraan jenazah pasien Covid-19 atau aturan sholat

berjamaah dengan menjaga jarak, persoalan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan perspektif multidisipliner. Tidak cukup hanya mengacu pada fikih ibadah atau fikih jenazah yang telah lama ada, tetapi perlu melibatkan bidang epidemiologi, virologi, serta ilmu kesehatan masyarakat. Dengan demikian, umat Islam dapat lebih bijak dalam menghadapi perubahan yang terjadi akibat perkembangan zaman dan situasi tertentu.

Paradigma tauhidik bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu kerangka besar keilmuan, sehingga berbagai pendekatan dapat saling melengkapi. Dalam konteks ini, ilmu agama dan ilmu sains tidak lagi dipisahkan, tetapi justru dikolaborasikan agar mampu memberikan solusi yang lebih menyeluruh terhadap berbagai tantangan sosial dan kemanusiaan.

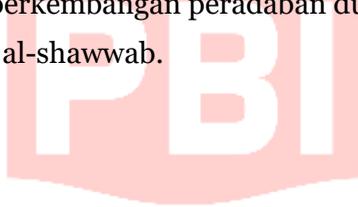
Sebagai gagasan besar, integrasi keilmuan dengan pendekatan multidisipliner perlu dikembangkan melalui desain yang efektif dan implementasi yang sistematis. Para ulama, akademisi, pendidik, serta tokoh masyarakat perlu mendiskusikan konsep ini secara lebih terbuka. Sikap yang inklusif dan *open-minded* menjadi kunci utama dalam memahami pendekatan multidisipliner ini. Selain itu, perspektif dalam melihat fenomena sosial harus bersifat dinamis dan terbuka agar memungkinkan penerimaan terhadap sudut pandang yang berbeda.

Penerapan paradigma tauhidik dalam keilmuan juga dapat membantu mengurangi sikap eksklusif dan arogansi dalam dunia akademik maupun keagamaan. Dengan pendekatan multidisipliner, pemahaman Islam yang kaku dan sempit dapat dikikis sehingga menghasilkan cara pandang yang lebih luas dan toleran. Konsep ini juga mampu melahirkan generasi yang memiliki daya kreativitas tinggi (*creative imagination*) serta mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru yang inovatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut keterbukaan dan adaptasi terhadap perubahan.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban Islam yang ideal. Para futurolog memprediksi bahwa Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam membangun peradaban Islam yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai religius yang mencerahkan. Harapan tersebut dapat terwujud jika umat Islam di Indonesia mulai mengembangkan cara berpikir yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, serta memanfaatkan pendekatan multidisipliner dalam memahami berbagai fenomena sosial dan keagamaan.

Kesadaran untuk mengadopsi paradigma tauhidik dalam berbagai aspek kehidupan perlu ditanamkan sejak dini, baik dalam dunia pendidikan, dakwah, maupun kebijakan sosial. Dengan cara ini, umat Islam dapat lebih siap menghadapi tantangan modern dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan peradaban dunia.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 13

**Efektivitas Puasa Menuju Produktivitas Kemanusiaan**

Sejak dahulu, berbagai tradisi agama telah mengenal puasa sebagai bentuk pengendalian diri dari hal-hal tertentu demi mencapai tujuan spiritual. Dalam Islam, puasa (shaum) menjadi bagian integral dari keberislaman seseorang dan merupakan ibadah wajib. Meninggalkan puasa Ramadhan tanpa alasan syar'i dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itu, puasa tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga menjadi bukti keimanan seorang muslim.

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah mencapai derajat taqwa (QS. Al-Baqarah: 183), yakni kondisi di mana seseorang hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, baik secara lahir maupun batin. Mereka yang mencapai tingkat ketakwaan akan berada dalam kesucian dan mendekat kepada Allah (taqarrub ila Allah). Ini merupakan pencapaian spiritual tertinggi yang menjadi tujuan utama bagi orang-orang beriman.

**Efektivitas Puasa Menuju Produktivitas Kemanusiaan**

Para sufi memandang puasa sebagai bentuk pengendalian diri secara lahir dan batin. Dengan demikian, puasa tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga emosi, psikologi, dan spiritualitas dari pengaruh negatif seperti marah, iri, dengki, sombong, kikir, dan korupsi. Aspek-aspek batiniah ini yang sebenarnya menjadi inti dari puasa dalam membentuk pribadi yang selamat (muslim) dan berkualitas.

Dalam dunia modern, kualitas manusia semakin diukur dari kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) yang berkontribusi besar terhadap kesuksesan individu. Penelitian

oleh The Honda Foundation menunjukkan bahwa 80% keberhasilan seseorang ditentukan oleh kualitas soft skill mereka, sedangkan hard skill hanya menyumbang 20%. Kecerdasan emosional berperan penting dalam membangun jaringan (*networking*), kerja sama tim (*teamwork*), serta produktivitas kerja. Individu yang memiliki karakter jujur, adil, peduli, dan bertanggung jawab akan lebih dihargai dalam dunia profesional, sedangkan mereka yang culas, korup, dan intoleran akan semakin tersingkir.

Dalam konteks ini, puasa menjadi instrumen yang sangat relevan dalam membentuk kepribadian manusia modern. Puasa melatih kesabaran, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, puasa tidak hanya menjadi ibadah pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Sayangnya, kelemahan birokrasi dan pelayanan publik yang sering terjadi di Indonesia lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas soft skill para aparatnya. Oleh karena itu, revolusi mental yang didengungkan pemerintah sejatinya selaras dengan esensi ibadah puasa dalam membentuk manusia yang bertakwa dan berintegritas.

Institusi Ramadhan harus dipahami sebagai sarana pendidikan ruhani (*tarbiyah ruhiyyah*) yang efektif dalam membangun karakter bangsa. Tradisi *tadarrus al-Qur'an* selama Ramadhan, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai membaca teks suci, tetapi juga harus dikembangkan sebagai upaya membangun budaya literasi. Kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis informasi adalah kunci keberhasilan manusia di era globalisasi. Kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas persoalan kebangsaan sering kali berakar dari lemahnya penguasaan informasi dan ketidakmampuan membaca konteks sosial secara menyeluruh.

Selain itu, Ramadhan juga identik dengan peningkatan ibadah shalat, khususnya *qiyam al-lail*. Shalat yang dilakukan secara konsisten mencerminkan pola hidup yang teratur, disiplin, dan penuh dedikasi. Karakter ini sangat diperlukan dalam membangun individu yang produktif dan memiliki etos

kerja yang tinggi. Sayangnya, praktik ibadah sering kali hanya dianggap sebagai ritual tanpa pemaknaan yang mendalam. Tradisi puasa, tadarrus, dan shalat lebih sering dilihat sebagai rutinitas seremonial dibandingkan sebagai sarana revolusi mental yang sesungguhnya.

Semoga Ramadhan tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan. Dengan demikian, Ramadhan bukan hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan produktivitas kemanusiaan dan membangun peradaban yang lebih baik.

Wallahu a'lam.



PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 14

**Hikmah Perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW**

Dalam masyarakat kita, sering kali terjadi kesalahpahaman dalam memahami peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak yang menganggap keduanya sebagai satu peristiwa yang sama, padahal sebenarnya Isra' dan Mi'raj adalah dua kejadian yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai pengertian Isra' dan Mi'raj, sejarahnya, serta hikmah yang dapat dipetik dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ini.

**Definisi Isra' dan Mi'raj**

Isra' dan Mi'raj merupakan dua bagian dari perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Peristiwa ini memiliki arti penting bagi umat Islam karena pada kesempatan ini, Rasulullah SAW menerima perintah untuk menunaikan shalat lima waktu.

Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara itu, Mi'raj adalah perjalanan spiritual beliau dari bumi naik ke langit ketujuh hingga mencapai Sidratul Muntaha untuk menerima perintah langsung dari Allah SWT. Karena kedua peristiwa ini terjadi secara berurutan dalam satu waktu, maka dikenal sebagai Isra' Mi'raj. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Malaikat Jibril dan menunggangi Buraq. Peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni hanya dalam satu malam.

Isra' Mi'raj berlangsung pada periode akhir kenabian di Makkah, tepat sebelum hijrah ke Madinah. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, termasuk al-Maududi, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 620-621 M atau satu tahun sebelum hijrah.

Menurut al-Allamah al-Manshurfuri, kejadian ini berlangsung pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, yang kemudian menjadi tanggal yang populer. Namun, Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri tidak sependapat dengan pernyataan ini karena Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, dua bulan setelah Rajab, dan pada saat itu shalat lima waktu belum diwajibkan. Berdasarkan berbagai sumber, terdapat enam pendapat berbeda mengenai waktu terjadinya Isra' Mi'raj, namun tidak ada yang dapat dipastikan secara akurat.

Isra' Mi'raj terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. Pada peristiwa Isra', Nabi Muhammad SAW 'diperjalankan' oleh Allah SWT dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan dalam peristiwa Mi'raj, beliau diangkat ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di alam semesta. Di sinilah Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan shalat lima waktu. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat berharga bagi umat Islam karena menunjukkan betapa istimewanya ibadah shalat dalam agama Islam.

### **Isra' dan Mi'raj dalam Perspektif Ilmiah**

Peristiwa Isra' Mi'raj merupakan kejadian luar biasa yang pada masanya dianggap tidak masuk akal. Pada waktu itu, belum ada teknologi canggih yang dapat membuktikan kebenarannya secara ilmiah. Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa peristiwa ini hanyalah sebuah mimpi. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai teori ilmiah mulai dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya peristiwa ini.

Isra' adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu dimensi dengan kecepatan luar biasa, yang mendekati kecepatan cahaya sekitar 300.000 km/detik. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha dengan mengendarai Buraq dan ditemani oleh Malaikat Jibril. Menariknya, para malaikat hanya dapat mengantar Rasulullah SAW hingga langit ketujuh karena

mereka merupakan makhluk berdimensi sembilan yang hanya mampu bertahan dalam lingkungan tersebut. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW dapat melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha atas kehendak Allah SWT.

Baik malaikat maupun jin memiliki kemampuan berpindah tempat dalam sekejap, bahkan ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Mereka tidak terikat oleh dimensi tiga seperti manusia, sehingga kecepatan mereka melampaui kecepatan cahaya. Hal ini pula yang memungkinkan Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra' Mi'raj dalam waktu singkat.

Sebelum memulai perjalanan tersebut, hati Rasulullah SAW dibersihkan menggunakan sinar cahaya yang sangat cangih dan dicuci dengan air zam-zam oleh Malaikat Jibril. Hati beliau kemudian diletakkan di wadah emas, yang merupakan logam mulia dengan sifat superkonduktor yang memiliki hambatan sangat rendah. Air zam-zam digunakan karena mengandung energi spiritual yang luar biasa, sebagaimana telah dibuktikan dalam berbagai penelitian ilmiah modern.

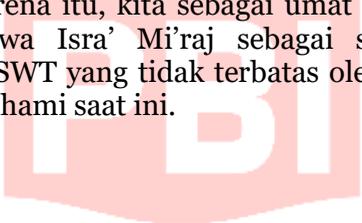
Pada saat perjalanan, tubuh Rasulullah SAW diubah menjadi tubuh cahaya sehingga mampu melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengalami kerusakan. Jika tubuh beliau tetap dalam wujud fisik manusia biasa, maka ikatan antar atom dan molekul dalam tubuhnya akan tercerai berai akibat gaya eksternal yang sangat besar. Perjalanan ini juga dilakukan pada malam hari untuk menghindari interferensi dengan cahaya matahari yang dapat mengganggu tubuh cahaya beliau.

Isra' Mi'raj merupakan perjalanan yang menembus batas dimensi, bukan sekadar perjalanan fisik di angkasa luar. Teori ilmiah seperti annihilasi menunjukkan bahwa materi dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya. Dalam laboratorium nuklir, jika partikel proton direaksikan dengan antiprotom, maka akan menghasilkan dua berkas sinar gamma. Sebaliknya, sinar gamma yang dilewatkan dalam medan inti atom dapat berubah menjadi pasangan partikel. Hal ini membuktikan

bahwa dalam kondisi tertentu, materi dapat berubah menjadi energi dan kembali menjadi materi.

Konsep kesetaraan massa dan energi sebagaimana dirumuskan oleh Einstein juga menunjukkan bahwa materi adalah bentuk energi yang terpadatkan. Alam semesta ini terdiri dari materi dan antimateri yang jika bertemu dalam kondisi tertentu dapat saling menghilangkan dan berubah menjadi cahaya. Peristiwa ini disebut annihilasi dan menjelaskan bagaimana tubuh Rasulullah SAW dapat berubah menjadi cahaya selama perjalanan Isra' Mi'raj.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak aspek dari peristiwa Isra' Mi'raj yang kini dapat dijelaskan secara ilmiah. Jika masih ada yang meragukan kebenaran peristiwa ini, berarti pemikirannya masih tertinggal di masa lalu, sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya meyakini peristiwa Isra' Mi'raj sebagai salah satu bukti kebesaran Allah SWT yang tidak terbatas oleh hukum-hukum alam yang kita pahami saat ini.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 15

# Penguatan Keluarga Sebagai Benteng Radikalisme

Sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam acara *International Symposium Family and Community Strengths* yang berlangsung di Newcastle, Australia, ada berbagai hal menarik yang saya temui. Simposium berskala global ini membahas inovasi serta arah baru dalam memperkuat peran keluarga dalam kehidupan masyarakat dunia. Berbagai isu dan fakta terbaru mengenai dinamika keluarga serta masyarakat dikaji dalam diskusi yang bertujuan menemukan pola serta model penguatan keluarga melalui jaringan yang lebih luas.

Dalam tatanan sosial, keluarga merupakan institusi terkecil yang menjadi titik awal dari segala perubahan. Dunia yang stabil dan makmur terbentuk dari negara-negara yang kuat serta memiliki kebijakan politik yang berpihak pada penguatan keluarga (*strengthening families*) dan kesejahteraan masyarakat (*community-led*).

Saat ini, berbagai permasalahan dalam keluarga semakin meningkat dan menjadi isu penting untuk terus dikaji. Pihak yang paling terdampak dari lemahnya posisi keluarga dalam masyarakat adalah perempuan dan anak-anak. Kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak serta lemahnya posisi tawar mereka dalam kehidupan sosial sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah terhadap kebijakan yang mendukung penguatan keluarga menjadi hal yang sangat relevan, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Keluarga juga memiliki peran utama dalam membentuk sikap dan karakter anak sejak dini. Pengalaman masa kecil yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua sangat berpengaruh

terhadap perkembangan psikologis anak di masa depan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kecenderungan seseorang untuk mengadopsi paham radikal dapat ditelusuri dari pola interaksi dalam keluarga yang kurang harmonis, penuh dengan kekerasan, serta tidak menerapkan prinsip demokrasi dalam komunikasi antaranggota keluarga.

### **Penguatan Keluarga sebagai Pertahanan terhadap Radikalisme**

David R. Mace (1985) menyatakan bahwa tidak ada hal yang lebih membahagiakan bagi manusia selain meningkatnya jumlah keluarga yang kuat. Kekuatan sebuah keluarga terletak pada kualitas hubungan antaranggota yang berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional dan kehidupan yang lebih harmonis. Keluarga yang kuat umumnya dicirikan dengan adanya rasa saling mencintai, kebersamaan yang memuaskan, serta kehidupan yang harmonis. Sebaliknya, keluarga yang gagal ditandai dengan ketidakharmonisan, perceraian, serta kurangnya kebahagiaan dalam hubungan antaranggota keluarga.

Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan institusi utama yang berperan dalam membangun kekuatan masyarakat. Keluarga disebut sebagai *al-madrasah al-ula* (sekolah pertama) bagi anak sebelum mereka berinteraksi dengan dunia luar dalam konteks yang lebih luas. Orang tua memiliki tanggung jawab utama sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Pendidikan afektif yang mencakup penanaman perilaku positif dan pembiasaan nilai-nilai baik menjadi kurikulum utama dalam pendidikan keluarga. Orang tua tidak hanya bertindak sebagai pendidik (educator) tetapi juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Karakter dan perilaku anak-anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dididik dalam lingkungan keluarga.

Penting bagi orang tua untuk memahami seni serta keterampilan dalam mendidik anak (parenting skill). Masyarakat modern semakin menyadari bahwa pola pengasuhan yang baik, serta pendampingan yang intens, sangat

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan emosional anak. Memberikan perhatian yang cukup serta membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga dapat menjadi dasar bagi pendidikan karakter yang berkualitas.

Pendidikan keluarga menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan keluarga. Paham radikalisme dan intoleransi sering kali berakar dari pola komunikasi yang tertutup, kurangnya ruang diskusi, serta pola asuh yang otoriter. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola interaksi seperti ini cenderung memiliki pemikiran tertutup serta kurang kritis karena mereka menerima ajaran agama secara dogmatis tanpa kesempatan untuk berdiskusi atau berpikir lebih terbuka. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga mereka dewasa tanpa adanya pendidikan agama yang lebih fleksibel dan terbuka, maka potensi berkembangnya pemikiran radikal semakin besar.

Prof. Olivier Roy, seorang pakar di bidang terorisme dan 'jihad' dari Prancis, mengungkapkan bahwa individu yang terlibat dalam aksi terorisme, khususnya dari kalangan anak muda yang rentan terhadap propaganda kelompok radikal, umumnya bukan berasal dari individu dengan pemahaman agama yang mendalam. Sebaliknya, banyak dari mereka memiliki latar belakang kehidupan yang kelim, seperti penyalahgunaan narkoba dan gaya hidup bebas. Mereka umumnya tidak mendapatkan pendidikan keluarga yang baik dan kurang memiliki pengalaman dalam membangun hubungan yang sehat dalam keluarga.

Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *al-Tarbiyah al-Awlad Fil Islam* menekankan bahwa peran ayah dan ibu dalam keluarga sangatlah penting dalam menanamkan karakter serta membentuk kelembutan hati pada anak-anak. Orang tua perlu menghindari kebiasaan menyalahkan tanpa memberikan arahan yang jelas. Pendidikan karakter atau akhlak merupakan kurikulum inti dalam pendidikan keluarga. Dengan membiasakan anak-anak untuk bersikap baik, mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki rasa hormat serta peduli terhadap lingkungannya.

Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk memiliki pemikiran yang terbuka (*open-minded*) serta memahami realitas kehidupan secara rasional. Pemahaman agama tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Konsep *al-Maqasid al-Syari'ah* mengajarkan bahwa Islam menjunjung tinggi akal, harta, jiwa, serta agama setiap individu, sehingga tidak ada justifikasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Jika ada pemikiran dan tindakan yang menolak hak dasar manusia, maka hal tersebut bukan berasal dari ajaran Islam yang sejati (*din al-Qayyim*).

Dalam konteks masyarakat Melayu, pembentukan karakter sangat berkaitan dengan konsep “budi”. Pendidikan budi dalam masyarakat Melayu merupakan pilar utama dalam membangun karakter. Konsep ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, dari lahir hingga meninggal dunia. Istilah “tunjuk ajar” menjadi elemen penting dalam tradisi Melayu, yang mencakup nasihat, amanah, petunjuk, serta contoh perilaku yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Individu yang tidak memahami atau tidak mengamalkan tunjuk ajar dianggap sebagai orang yang “kurang ajar” atau tidak berbudi.

Implementasi nilai-nilai budaya Melayu sejatinya telah merepresentasikan prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Oleh karena itu, potensi radikalisme dalam keluarga Melayu sangat kecil karena budaya ini tidak memiliki akar dalam pola kehidupan etnis mereka. Konsep penguatan keluarga berbasis budaya lokal sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Untuk membangun ketahanan keluarga di Indonesia, tidak perlu mengikuti pola Barat secara langsung. Justru, budaya lokal Indonesia memiliki filosofi yang kaya dan bersifat universal, yang menghargai kehidupan serta kemanusiaan. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai budaya dalam keluarga akan membantu meredam potensi radikalisme dan sikap intoleran dalam masyarakat.

Wallahu a'lam bi al-Shawwab.

## 16

## Kontribusi Ulama Sumatera Selatan dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Secara etimologi, kata 'ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu *العلماء*, yang merupakan bentuk jamak dari *عالم* ('alim), yang memiliki arti ilmuwan, peneliti, atau individu yang memahami hakikat ilmu alam maupun ilmu syariat. Dalam Islam, seorang ulama adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ilmu agama dan dapat menganalisis fenomena alam untuk kepentingan dunia dan akhirat. Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa ulama adalah mereka yang memiliki kemampuan menganalisis ciptaan Allah serta takut kepada-Nya agar tidak terjerumus dalam keburukan.

Dalam Al-Qur'an, istilah ulama disebutkan dua kali. Pertama, dalam Q.S. 35:28, yang menggambarkan ulama sebagai mereka yang mampu memahami ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, yaitu segala ciptaan-Nya di alam semesta, dan yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Kedua, dalam Q.S. 26:197, yang menyebut ulama sebagai mereka yang memahami ayat-ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada manusia.

Istilah ulama dalam Al-Qur'an dan hadis selalu dikaitkan dengan ilmu (yang disebutkan sebanyak 854 kali dalam Al-Qur'an) serta dengan sikap istislam (ketundukan) dan khasyasyah (rasa takut kepada Allah). Hubungan ini menunjukkan bahwa ulama adalah individu yang mampu memahami baik ayat-ayat Allah dalam bentuk wahyu maupun tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta, serta memiliki ketakwaan yang tinggi. Dari sini, para ahli merumuskan karakteristik utama seorang ulama, yaitu: pertama, beragama

Islam. Kedua, memiliki pemahaman syariat Islam secara menyeluruh berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Keempat, memiliki rasa takut kepada Allah. Kelima, melaksanakan dakwah dengan menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Keenam, memiliki sifat-sifat utama para nabi, yaitu shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas).

Berdasarkan karakteristik tersebut, Imam Al-Ghazali membagi ulama ke dalam dua kategori. Pertama, ulama akhirat, yaitu mereka yang mendapatkan kemuliaan, tidak tergiur oleh kehidupan duniawi, tidak menjual agama demi kepentingan pribadi, serta mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ulama ini hidup sederhana, tidak mencari kedekatan dengan penguasa atau orang-orang kaya, dan lebih mengutamakan kepentingan umat. Kedua, ulama dunia, atau dikenal sebagai ulama su', yaitu mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak memberikan manfaat. Ulama ini lebih mengutamakan kepentingan dunia, tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, serta hidup dalam kemewahan dan berupaya mendekati penguasa demi keuntungan pribadi.

J. Suyuti Pulungan menjelaskan bahwa ulama akhirat memiliki beberapa tugas utama, yaitu: pertama, mengajarkan dan menyebarkan isi Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diamalkan oleh masyarakat. Kedua, menyelesaikan permasalahan umat dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Ketiga, memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Keempat, memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan umat. Kelima, berperan aktif dalam menangani berbagai persoalan sosial.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ulama adalah kelompok elite dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan politik. Khususnya di Sumatera Selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, para ulama memiliki pengaruh besar dalam menjaga keteraturan sosial serta membentuk pemikiran dan budaya masyarakat. Bahkan, pemikiran dan karya ulama Sumatera Selatan tidak hanya berkembang di

tingkat lokal, tetapi juga mencapai wilayah Asia Tenggara. Para ulama ini berperan dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat dan memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ulama Sumatera Selatan dan Perjuangannya Beberapa ulama dari Sumatera Selatan yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain Sayyid Muhsin Al-Musawa (1904-1935), Ki. KMS. H.M. Yunus al-Hafiz (1900-1971), KHA. Rasyid Siddiq al-Hafiz (1905-1992), KI. KMS. Ismail Umary (1912-1971), Ki. KGS. H.M. Sjadjari (1912-1987), Prof. KH. Zainal Abidin Fikry (1916-1990), serta banyak ulama lainnya. Beberapa dari mereka pernah menimba ilmu di Mekkah sebelum kembali ke tanah air dan merasa kecewa dengan kebijakan kolonial yang merusak nilai-nilai keagamaan dan kehidupan masyarakat.

Para ulama ini melihat bagaimana penjajah memaksa masyarakat untuk melakukan upacara penghormatan kepada penguasa kolonial, memonopoli ekonomi rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam, dan memaksakan kerja paksa. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan. Situasi ini membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan ulama, yang kemudian berupaya membebaskan masyarakat dari penjajahan dalam berbagai aspek.

Kontribusi ulama Sumatera Selatan dalam perjuangan kemerdekaan mencakup berbagai bidang. Pertama, mereka memimpin perjuangan fisik melawan penjajah. Beberapa ulama bahkan menunjukkan karomah mereka, seperti KH. Muhammad Zen Syukri yang, meskipun ditodong pistol oleh tentara Belanda, tetap teguh dan akhirnya membuat tentara tersebut gentar. Kedua, mereka mendirikan lembaga pendidikan untuk mencetak generasi yang berjiwa nasionalis dan religius. Ketiga, mereka membangun masjid dan tempat ibadah sebagai pusat perlawanan serta tempat persembunyian para pejuang. Keempat, mereka aktif dalam dakwah untuk menanamkan semangat jihad di kalangan masyarakat. Kelima,

mereka membentuk dan memimpin organisasi sosial-politik guna mengoordinasikan perjuangan kemerdekaan.

Dalam kategori peran mereka, J. Suyuti Pulungan membagi ulama menjadi tiga kelompok: ulama independen yang bergerak tanpa afiliasi tertentu, ulama yang bekerja sama dengan pemerintah, serta ulama yang tergabung dalam organisasi. Jeroen Peeters lebih lanjut mengklasifikasikan ulama Sumatera Selatan menjadi dua kelompok utama, yaitu kaum tradisional yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) dan kaum modernis yang tergabung dalam Muhammadiyah.

Dari seluruh kontribusi tersebut, masyarakat Sumatera Selatan sepatutnya menghargai peran para ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Ulama seharusnya tidak hanya dihormati dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai panutan dan tempat berkonsultasi mengenai berbagai persoalan.

Ke depan, diharapkan ulama Sumatera Selatan abad XXI dapat meneruskan perjuangan generasi sebelumnya. Ulama harus tetap aktif dalam membangun masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Dengan demikian, Sumatera Selatan dapat terus berkembang dalam harmoni dan kesejahteraan di bawah bimbingan para ulama yang berintegritas dan berkomitmen terhadap kemaslahatan umat.

Wallahu A'lam bi al-shawwab.

## 17

**Menjadi Muslim Indonesia Seutuhnya**

Setiap agama di dunia mengajarkan pentingnya kepatuhan dan ketundukan terhadap kehendak serta ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, inti dari agama yang benar adalah kepasrahan total kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Pencipta seluruh alam semesta. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ketulusan dalam berserah diri kepada Tuhan adalah inti dari suatu agama, sehingga segala bentuk ajaran yang menolak sikap kepasrahan tersebut tidak akan diterima oleh Allah (Q.S. Ali Imran: 85).

Kepasrahan kepada Allah (al-Islam) merupakan sikap batin yang bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh individu itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatannya dan tidak dapat membebankan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Masing-masing individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di hadapan Allah.

Sebagai sistem kehidupan (al-Din), Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, termasuk amal pribadi serta sosial. Islam mencakup tiga aspek utama, yaitu akidah (keimanan), syariat (tata cara ibadah), dan akhlak (hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta). Seorang muslim sebaiknya memahami ketiga aspek ini secara menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan dalam beragama. Jika hanya memahami satu aspek secara parsial, hal ini dapat menyebabkan pemahaman agama yang tidak utuh dan berpotensi menimbulkan disorientasi.

**Islam, Budaya, dan Solusi Kemanusiaan**

Sejak dahulu, ada dua kelompok manusia yang berbeda pandangan mengenai agama. Kelompok pertama meyakini

bahwa agama merupakan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan, sedangkan kelompok kedua menolak agama karena menganggapnya sebagai candu dan ilusi yang memberikan harapan semu. Bahkan, di era modern saat ini muncul kelompok spiritualis yang percaya kepada Tuhan namun menolak aturan dan tata cara agama. Mereka mengusung slogan *Spirituality Yes, Religion No* untuk menegaskan identitas mereka yang menolak sistem keagamaan formal.

Di Indonesia, kedua kelompok ini masih eksis hingga sekarang. Sebagian masyarakat menjalankan praktik keagamaan dengan sangat religius, sementara sebagian lainnya tampak jauh dari tradisi agama. Clifford Geertz dalam *The Religion of Java* (1983) mengklasifikasikan tiga tipologi keberagaman di Indonesia, yaitu Islam Santri (yang menekankan ajaran Islam secara ketat), Islam Priyayi (yang bercampur dengan unsur Hindu), dan Islam Abangan (yang lebih dekat dengan unsur animisme). Tiga tipologi ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia memiliki pemahaman agama yang beragam, dari yang menjalankan Islam secara ketat hingga yang lebih fleksibel dalam mengadopsi unsur budaya lokal.

Dalam perspektif sosiologi agama, sejak dahulu selalu ada kelompok yang menolak ajaran agama sebagai sistem nilai sosial. Mereka melihat agama hanya sebagai urusan pribadi dan tidak terkait dengan peradaban atau modernitas. Namun, seperti yang ditegaskan oleh W. Montgomery Watt, hingga kini hanya agama yang mampu menciptakan ketertiban sosial yang stabil. Agama memiliki sistem nilai yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu fungsi utama agama adalah menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Oleh karena itu, ada hubungan erat antara “iman” dan “aman.” Keimanan seseorang harus tercermin dalam sikap yang mampu menebarkan rasa aman bagi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Seorang muslim sejati tidak hanya menjalankan ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji, tetapi juga menunjukkan akhlak yang

baik dalam interaksi sosialnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saat berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat di Madinah.

Keberagaman di Indonesia memiliki karakteristik unik yang merupakan hasil dari proses akulturasi budaya dan islamisasi yang telah berlangsung lama. Hal ini menciptakan tradisi keislaman khas Indonesia yang menjadi kekayaan budaya yang perlu dijaga. Islam dan keindonesiaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua entitas yang saling menguatkan. Harun Nasution (1996) menegaskan bahwa konsep Pancasila dan negara Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, seorang muslim yang hidup di Indonesia tetap bisa menjadi muslim sejati tanpa harus kehilangan identitas kebangsaannya. Secara ideologis, menjadi warga negara Indonesia berarti membentuk kepribadian yang berketuhanan. Tantangan bagi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana mereka dapat menjalankan ajaran agama secara dewasa dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin kuat semangat keislaman seseorang, seharusnya semakin teguh pula rasa kebangsaannya. Jika hubungan antara agama dan budaya dapat dibangun secara harmonis, maka Islam akan terus memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia tidak boleh terjebak dalam eksklusivisme dan individualisme yang tidak produktif. Sebaliknya, mereka harus berkontribusi dalam pembangunan sosial untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Dengan sikap yang inklusif dan produktif, Islam akan tetap menjadi energi positif yang mampu menjaga harmoni dan keutuhan bangsa.

*Wallahu a'lam bis-shawab.*

18

**Makna Teologis Kebijakan PSBB di Masa Covid-19**

Spiritualitas dan etika merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Spiritualitas mengacu pada dimensi batiniah seseorang, sementara etika berhubungan dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral. Kedua aspek ini membentuk karakter individu yang bertakwa, yang dalam ajaran Islam didefinisikan sebagai pribadi yang memiliki kesadaran religius serta moralitas tinggi dalam interaksi dengan sesama dan alam sekitar. Orang yang memiliki spiritualitas tinggi akan senantiasa mengingat Tuhan (zikr) dan mendekatkan diri kepada-Nya (taqarrub), yang kemudian tercermin dalam tindakan yang damai dan tidak merusak (fasad). Ketakwaan sejati ditandai dengan rasa takut melanggar perintah Tuhan serta dorongan untuk menebar rahmat bagi seluruh makhluk.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Amin Abdullah, spiritualitas tanpa etika akan kehilangan substansi kasih sayang (ar-Rahmah) dan kemampuan untuk memaafkan (al-Maghfirah). Individu yang tidak memiliki kedua nilai tersebut akan menjadi manusia yang hanya mengedepankan identitas keagamaannya tanpa esensi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, momentum Idul Fitri dan tradisi Syawalan dalam masyarakat Muslim harus dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritualitas yang diwujudkan dalam perilaku yang membawa keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain (wasallimu tasliiman).

## **PSBB: Makna Teologis dan Manifestasi Ketakwaan**

Dalam memahami ajaran agama, terdapat tiga kategori utama dalam masyarakat, yaitu kelompok konservatif, modernis, dan moderat. Kelompok konservatif cenderung mempertahankan pemahaman agama secara rigid dan menolak perubahan, kelompok modernis lebih terbuka dalam mengkaji ajaran agama menggunakan ilmu pengetahuan, sedangkan kelompok moderat menggabungkan aspek nilai-nilai Islam yang mapan dengan keterbukaan terhadap interpretasi baru yang lebih relevan dengan situasi kontemporer.

Ketiga kelompok ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi pandemi Covid-19. Kelompok konservatif melihat pandemi sebagai bentuk azab atau hukuman, sehingga respons utama mereka adalah kembali kepada praktik ibadah yang telah menjadi kebiasaan, seperti tetap menjalankan ibadah berjamaah di masjid tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan. Sebaliknya, kelompok modernis dan moderat memandang pandemi sebagai ujian bagi umat manusia yang harus disikapi dengan kedewasaan iman, termasuk dengan memahami prinsip dalam maqasid syari'ah yang mengutamakan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan ibadah dalam kondisi yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain.

### **PENERBITAN BUKU INDONESIA**

Perbedaan cara pandang ini sering kali dipengaruhi oleh tingkat literasi seseorang. Kelompok konservatif yang cenderung mempertahankan pemahaman lama biasanya memiliki akses yang terbatas terhadap informasi baru, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial. Sementara itu, kelompok modernis dan moderat lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memahami fenomena sosial dengan lebih komprehensif.

Pemahaman agama yang baik sangat diperlukan agar seorang Muslim dapat bersikap cerdas dalam menghadapi situasi sosial yang kompleks. Salah satu tujuan utama dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah melakukan “karantina spiritual,” yang bertujuan untuk membangun daya tahan rohani

dan membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan egoisme. Seharusnya, setelah menjalani ibadah ini, umat Islam memiliki tingkat kepekaan sosial yang lebih tinggi dan terdorong untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Islam menekankan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan ciri utama orang yang bertakwa. Oleh karena itu, solusi bagi kesulitan ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga terletak pada kesediaan individu untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

Menjadi Muslim yang berperan sebagai rahmat bagi semesta berarti memahami bahwa keberagaman tidak hanya diwujudkan dalam ibadah pribadi, tetapi juga dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pandemi ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mengaplikasikan ajaran agama secara lebih luas dengan memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya.

### **Kebijakan PSBB dalam Perspektif Teologis**

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai wilayah, termasuk di Palembang, dapat dilihat sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip Islam dalam menghindari bahaya yang lebih besar. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan jiwa, dan dalam situasi pandemi, mengikuti protokol kesehatan merupakan bagian dari upaya tersebut.

Dalam sejarah Islam, terdapat praktik-praktik yang sejalan dengan konsep PSBB, seperti kebiasaan mencuci tangan yang telah menjadi bagian dari wudhu selama lebih dari 14 abad. Selain itu, Nabi Muhammad juga melakukan uzlah (mengasingkan diri) untuk menghindari pengaruh buruk dari lingkungan, yang dalam konteks pandemi dapat dipahami sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan.

Penerapan PSBB bukanlah sekadar aturan administratif, tetapi memiliki makna spiritual yang mendalam. Jika umat Islam dapat memahami kebijakan ini dalam konteks

ketakwaan, maka mereka akan lebih siap untuk beradaptasi dengan situasi yang disebut sebagai tatanan kehidupan baru (*new normal*). Dalam kondisi ini, nilai-nilai agama harus tetap menjadi landasan dalam membangun peradaban yang lebih baik, dengan mengedepankan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Semoga momentum Ramadan dan Idul Fitri dapat menjadi titik balik bagi umat Islam untuk kembali kepada fitrah serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Wallahu A'lam bi al-Shawwab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**

## 19

# Spiritualitas dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Peran ulama, santri, serta nilai-nilai spiritualitas Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah signifikan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat kisah-kisah heroik yang melibatkan para ulama dan pemuka agama. Beberapa di antara mereka bahkan telah diakui sebagai pahlawan nasional, seperti Imam Bonjol, Cik Di Tiro di Padang, Pangeran Diponegoro, KH. Hasyim Asy'ari di Jawa, KH. Syami'un di Banten, KH. Noer Ali di Makassar, serta Syekh Yusuf al-Makasari yang tidak hanya berjuang di Indonesia tetapi juga hingga ke Afrika.

Di Palembang sendiri, dalam syair Perang Palembang (Perang Menteng) tahun 1819, diceritakan bagaimana Kemas Said, seorang ulama, dengan gigih melawan penjajah Belanda hingga gugur sebagai syahid. Selain itu, ada pula sosok Syekh Haji Zen yang turut berkorban dalam pertempuran tersebut.

Semangat anti-kolonialisme juga berakar kuat di kalangan umat Islam di tingkat internasional. Para jamaah haji dari berbagai negara sering kali berdiskusi mengenai pentingnya membebaskan negeri-negeri Muslim dari penjajahan Barat. Pesantren dan majelis taklim menjadi pusat pengajaran nilai-nilai keislaman yang mengajarkan kebencian terhadap kolonialisme serta mendorong perlawanan terhadap bangsa asing. Karena itu, tidak jarang terjadi bentrokan fisik antara para santri dengan tentara Belanda di berbagai daerah. Pada masa itu, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama tetapi juga berfungsi sebagai markas perjuangan, sementara para kiai memainkan peran sebagai pemimpin intelektual dalam perlawanan tersebut.

## **Ulama dan Semangat Perjuangan Kemerdekaan**

Secara umum, ulama adalah mereka yang memiliki ilmu mendalam dan berperan sebagai pemimpin spiritual dalam masyarakat. Tugas mereka tidak hanya membimbing umat dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Ulama dihormati karena dianggap sebagai sosok suci yang dapat membimbing umat menuju pencerahan spiritual dan ampunan Ilahi. Kewibawaan ulama ini berkontribusi besar dalam menggerakkan semangat perjuangan melawan penjajah.

Peristiwa Resolusi Jihad di Surabaya pada tahun 1945 menunjukkan bagaimana seruan jihad dari para ulama mampu membakar semangat perjuangan umat Islam secara luas. Fatwa jihad yang dikeluarkan kala itu menetapkan bahwa melawan penjajah merupakan kewajiban (*fardhu 'ain*), dan siapa pun yang gugur dalam perjuangan ini dianggap sebagai syahid. Sebaliknya, mereka yang membantu penjajah dipandang sebagai pengkhianat yang harus diperangi. Seruan jihad ini mengandalkan kekuatan terminologi keagamaan yang sangat emosional, sehingga diterima tanpa ragu oleh umat Islam.

Para ulama yang menjadi pemimpin perjuangan pada masa itu memiliki integritas tinggi, di mana ilmu dan akhlak mereka berpadu dalam membimbing umat. Keteladanan yang mereka tunjukkan mampu menginspirasi santri dan masyarakat untuk berjuang dengan sepenuh hati. Mereka dipandang sebagai penjaga agama sekaligus pemandu jalan kebenaran. Bahkan, dengan berbagai kisah kesaktian dan kebijaksanaan mereka, ulama semakin dipercaya sebagai tokoh yang harus diikuti tanpa keraguan. Mengikuti ajaran ulama berarti mengikuti jalan yang diridai oleh Tuhan.

## **Kalimat Takbir dalam Perjuangan Kemerdekaan**

Dikisahkan bahwa saat Bung Tomo menyerukan "Allahu Akbar" dalam pertempuran Surabaya, kalimat tersebut berasal dari amanah KH. Hasyim Asy'ari. Takbir bukan sekadar seruan, tetapi sebuah pernyataan keyakinan bahwa hanya Allah yang

Maha Besar, sementara eksistensi lain, termasuk penjajah, hanyalah kecil di hadapan-Nya.

Kalimat takbir membangkitkan keyakinan dan keberanian luar biasa. Mereka yang mengucapkannya merasa dekat dengan Tuhan dan siap mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Dengan keimanan yang kuat, mereka menjadi tidak takut mati, karena keyakinan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. Sikap ini membuat penjajah kewalahan menghadapi semangat juang rakyat Indonesia.

Dalam perspektif teologi pembebasan, agama tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menginspirasi perjuangan melawan penindasan. Tauhid sebagai ajaran inti Islam menekankan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari Allah, sehingga manusia harus membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi mereka menuju Tuhan. Kesadaran tauhid yang kuat menjadikan ulama pejuang memiliki daya juang luar biasa yang sulit ditaklukkan oleh penjajah. Kesadaran ini kemudian diwariskan kepada santri, yang setiap lantunan takbirnya menggema dalam medan pertempuran, menanamkan keteguhan jiwa serta keberanian yang luar biasa. Fenomena ini mirip dengan peristiwa Perang Badar di mana kaum Muslim yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih besar.

### **Merefleksikan Makna Kemerdekaan**

Dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 ini, penting bagi kita untuk merenungkan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar perjuangan bangsa. Kesadaran akan peran agama dalam perjuangan kemerdekaan harus senantiasa terjaga, sehingga tidak ada satu pun anak bangsa yang melupakan akar spiritualitas dalam nafas kebangsaan Indonesia.

Semangat religius yang telah menjadi bagian dari identitas nasional tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu. Sebaliknya, nilai-nilai kebangsaan harus tetap dijaga berdasarkan prinsip Pancasila,

UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini telah dirumuskan oleh para ulama dan tokoh nasional sebagai fondasi kokoh dalam menjaga persatuan bangsa.

Di tengah situasi dunia yang semakin tidak stabil, dengan banyaknya konflik di negara-negara Muslim lainnya, Indonesia masih berdiri teguh dengan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai spiritual Islam yang inklusif dan toleran. Para ulama dan pemimpin bangsa telah memberikan warisan yang berharga dalam menjaga persatuan dan keharmonisan negeri ini. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita harus terus mengukuhkan kekuatan internal bangsa agar tetap sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Semoga dengan bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia, seluruh elemen bangsa semakin dewasa dalam memahami hakikat perjuangan, pembangunan, dan reformasi dalam bingkai moralitas kebangsaan yang tinggi. Jangan biarkan paham-paham yang bertentangan dengan semangat kebangsaan menggerogoti persatuan negeri ini. Hanya dengan kedewasaan berpikir dan sikap yang bijak, kita dapat menjaga nilai-nilai Islam wasathiyah (moderat) yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 20

## Hakikat Idul Fitri: Membangun Silaturahmi dan Rekonsiliasi

Umat Islam di Indonesia memiliki cara unik dalam merayakan Idul Fitri yang berbeda dengan tradisi di negara-negara Muslim lainnya. Istilah "lebaran" yang telah dikenal sejak lama tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga mengandung makna mendalam dalam menyambut Idul Fitri. Kata "lebaran" berasal dari "lebar" yang berarti "setelah" atau "pasca", sehingga merujuk pada hari bahagia setelah menjalani ibadah puasa.

Setelah satu bulan penuh menjalankan puasa Ramadhan, umat Islam merayakan lebaran sebagai penanda telah selesainya kewajiban tersebut. Pada hari ini, berpuasa justru dilarang, dan umat Muslim dianjurkan untuk bergembira, berkumpul bersama keluarga, serta saling mengunjungi dan bermaaf-maafan. Secara syariat, tanggal 1 Syawal memang merupakan hari di mana berpuasa diharamkan. Dalam tradisi Nusantara, perayaan ini sering disertai dengan hidangan khas seperti ketupat, yang memiliki makna simbolis mendalam. Sarung ketupat yang dibuat dari anyaman janur kelapa melambangkan eratnya persaudaraan dan kuatnya ikatan silaturahmi.

### Idul Fitri Sebagai Momentum Rekonsiliasi

Secara etimologis, istilah "Idul Fitri" terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab: "Id" dan "al-Fitri". Kata "Id" berasal dari "aada-ya'uudu", yang berarti kembali. Hari raya disebut "Id" karena selalu kembali dan dirayakan setiap tahun. Ibnul A'rabi menjelaskan bahwa Id adalah momen yang terus berulang dengan kebahagiaan baru setiap tahunnya. Ada pula yang mengaitkan kata "Id" dengan "al-Adah", yang berarti kebiasaan,

mengingat perayaan ini telah menjadi bagian dari adat masyarakat Muslim.

Sementara itu, kata "Fitri" dan "Fitrah" sering disalahartikan sebagai hal yang sama. Dalam Al-Qur'an, fitrah disebut dalam Surah Ar-Rum ayat 30, yang mengacu pada keadaan asal manusia yang suci sejak lahir. Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa fitrah merujuk pada kondisi awal penciptaan manusia dalam keadaan suci tanpa dosa. Di sisi lain, kata "Fitri" berasal dari "afthara-yufthiru", yang berarti berbuka atau tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, Idul Fitri dinamakan demikian karena kaum Muslim tidak lagi menjalankan puasa Ramadhan dan kembali menikmati makanan.

Makna Idul Fitri dapat dilihat dalam dua dimensi: secara lahiriah, kaum Muslim telah menyelesaikan ibadah puasa dan kembali diperbolehkan makan; secara spiritual, mereka telah berhasil menjalankan ibadah dengan penuh keimanan, yang menurut hadis Nabi, akan menghapus dosa-dosa terdahulu. Oleh sebab itu, Idul Fitri menandakan kembalinya umat Muslim pada kesucian setelah memperoleh ampunan.

Pemahaman ini harus tercermin dalam kehidupan sosial, salah satunya dengan tradisi silaturahmi dan saling memaafkan yang telah menjadi kebiasaan di Indonesia. Istilah "halal bi halal" sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan saling mengikhhlaskan kesalahan antar individu maupun kelompok. Lebaran menjadi momen yang tepat untuk meredakan konflik sosial, mengatasi perbedaan, dan memulihkan harmoni dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai perbedaan pandangan dan perselisihan tidak dapat dihindari, yang seringkali menyebabkan polarisasi di antara kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Idul Fitri menjadi sarana efektif untuk menjembatani perbedaan dan membangun kembali persaudaraan. Tradisi silaturahmi yang telah mengakar dalam budaya Nusantara ini menjadi model rekonsiliasi berbasis nilai-nilai agama yang tulus. Idul Fitri

tidak hanya menjadi ajang refleksi personal, tetapi juga kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan bangsa serta memperkuat ukhuwah wathaniyah.

Idul Fitri juga memiliki makna yang lebih mendalam ketika tidak hanya diartikan sebagai penghapusan dosa di hadapan Allah, tetapi juga di antara sesama manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan, interaksi antarmanusia terjadi secara terus-menerus, baik dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Idul Fitri seharusnya menjadi momen untuk mengikis rasa dendam dan permusuhan yang tersisa, serta memperkuat hubungan yang lebih harmonis.

Tradisi halal bi halal yang dilaksanakan dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, tempat kerja, hingga institusi negara, seharusnya dapat menjadi sarana untuk menekan ego pribadi dan membuka hati untuk menerima perbedaan. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang tugasnya adalah saling membantu dan melayani sesama. Sikap keras kepala, merasa paling benar, dan tidak mau mengakui kesalahan adalah hal yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Rekonsiliasi hanya dapat terwujud jika setiap individu bersedia mengakui kekurangan diri sendiri dan menerima pandangan orang lain secara objektif.

### **Halal bi Halal: Prinsip Tertinggi dalam Spiritualitas Kemanusiaan**

Tidak sedikit umat Muslim yang salah memahami konsep spiritualitas. Banyak yang merasa bangga dengan pencapaian ibadahnya secara pribadi, tetapi justru mengabaikan aspek sosial dan kepedulian terhadap sesama. Sikap merasa lebih baik dibandingkan orang lain dapat menyeret seseorang ke dalam sifat ujub, yang dalam sejarah Islam telah menjadi karakteristik Iblis ketika menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam.

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa ibadah seseorang tidak akan bermakna jika ia mengabaikan

kesejahteraan sosial di sekitarnya. Surah Al-Ma'un mengaitkan kesempurnaan shalat dengan kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan sejati harus diwujudkan dalam bentuk amal saleh yang nyata, seperti kepedulian sosial, sikap santun, dan tanggung jawab.

Puasa Ramadhan yang bersifat individual sejatinya harus dihubungkan dengan kewajiban sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, menjelang Idul Fitri, zakat fitrah diwajibkan sebagai bentuk penyucian diri sekaligus kepedulian terhadap sesama. Hal ini menegaskan bahwa seorang Muslim yang mampu berpuasa sebulan penuh juga harus mampu berbuat baik dan berbagi dengan sesama sepanjang tahun.

Nilai-nilai spiritual ini tercermin dalam tradisi halal bi halal yang berkembang di Indonesia. Budaya Islam Nusantara yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal telah melahirkan berbagai tradisi seperti lebaran dan halal bi halal. Identitas ini sebaiknya terus dijaga sebagai modal kultural dan spiritual untuk memperkuat persatuan bangsa.

Keberagaman yang ada di Indonesia adalah anugerah yang harus disyukuri. Oleh karena itu, pemahaman agama yang kaku dan eksklusif harus dihindari agar tidak menimbulkan perpecahan. Lebaran, silaturahmi, dan halal bi halal harus dimanfaatkan sebagai momen untuk memperkuat persatuan dan mengingat kembali bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Semoga Idul Fitri kali ini dapat menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk semakin bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan menjaga kedamaian di negeri ini.

Wallahu a'lam bish-shawab.

## 21

**Ramadhan Bulan Pendidikan Ruhani**

Ibadah puasa (*shaum*) setiap tahunnya hadir sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang beriman, yang dijalankan dengan cara menahan diri di siang hari dari berbagai aktivitas fisik seperti makan, minum, serta hubungan suami istri, maupun hal-hal lain yang dalam hukum fikih dapat membatalkan puasa. Sebelum memasuki bulan Ramadhan, umat Islam sering mengucapkan doa yang mengandung frasa "...wa balighna Ramadhan", yang menunjukkan sikap aktif dalam menyambut bulan suci ini, bukan sekadar menunggu kehadirannya secara pasif. Sikap aktif dalam menyongsong Ramadhan akan berdampak pada bagaimana seseorang menjalankan ibadahnya. Mereka yang menyambut Ramadhan dengan kesungguhan akan merasa bahagia, bersemangat, dan penuh kegembiraan dalam menjalankannya. Sebaliknya, mereka yang hanya pasif cenderung merasakan bulan Ramadhan sebagai beban atau sekadar rutinitas yang harus dijalani. Oleh karena itu, secara spiritual, ibadah puasa Ramadhan diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman (mukmin) saja, bukan bagi mereka yang di luar kategori tersebut.

Pada dasarnya, praktik puasa telah dikenal dalam banyak ajaran agama, meskipun dengan aturan yang berbeda-beda. Kewajiban puasa Ramadhan yang ditetapkan dalam syariat Islam sebagai salah satu rukun Islam sebenarnya merupakan perintah yang juga telah Allah wajibkan kepada umat-umat beriman sebelum masa kenabian Muhammad Saw. Dengan demikian, ibadah puasa Ramadhan bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari syariat terdahulu yang harus diteruskan oleh umat Nabi Muhammad dengan penuh keutamaan dan kemuliaan.

## **Ramadhan sebagai Bulan Tarbiyah Ruhiyah**

Tarbiyah ruhiyyah, atau pendidikan spiritual, merupakan salah satu aspek utama dalam ibadah puasa Ramadhan, selain manfaat lain seperti peningkatan kesehatan jasmani, efisiensi ekonomi, serta stabilitas sosial. Banyak kajian multidisipliner yang mengkaji pengaruh puasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, dari sudut pandang spiritual, puasa menjadi sarana latihan yang mampu membentuk, mengembangkan, serta membangun kualitas spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kajian tasawuf, dikenal konsep emanasi atau pancaran, yang menggambarkan bahwa manusia merupakan mikrokosmos dari alam semesta. Keberadaan ruh dalam diri manusia yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah harus dibina agar dapat mengenal-Nya (ma'rifatullah), sehingga perjalanan kembali kepada-Nya dapat berjalan dengan baik dan selamat.

Kaum sufi sangat menghargai praktik puasa karena ibadah ini menekan keinginan duniawi secara maksimal. Bagi mereka, kesenangan dunia dapat menjadi penghalang dalam mengenal Allah, sementara keterikatan yang berlebihan terhadap duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam hawa nafsu yang berlebihan. Islam sebagai ajaran yang sempurna tidak mengajarkan penolakan total terhadap dunia, tetapi mengajarkan keseimbangan dalam mengelola kehidupan duniawi agar tidak melampaui batas yang ditetapkan syariat. Islam menolak cara-cara yang tidak etis dalam memperoleh harta, seperti praktik kapitalisme sekuler yang menghalalkan segala cara. Sebaliknya, Islam justru mendorong pengelolaan kekayaan dengan cara yang halal, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat, demi kesejahteraan umat.

Ibadah puasa menjadi latihan dalam menahan diri dari keinginan yang berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep menahan diri menjadi nilai utama yang sangat penting dalam ibadah ini. Imam al-Ghazali dalam karya klasiknya menjelaskan tingkatan puasa yang terbagi menjadi tiga, yaitu puasa orang awam, puasa orang khusus (khawas), dan puasa

orang yang lebih khusus lagi (khawas al-khawas). Jika dianalogikan dalam dunia pendidikan, tiga tingkatan ini bisa disamakan dengan level dasar (*beginner*/awam), menengah (*intermediate*/khawas), dan tingkat lanjut (*advance*/khawas al-khawas).

Puasa tingkat awam hanya berfokus pada menahan lapar dan haus. Sedangkan puasa tingkat menengah tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga pandangan, ucapan, serta perilaku dari hal-hal yang tidak produktif. Sementara itu, puasa tingkat lanjut merupakan tingkatan tertinggi, di mana pelakunya mampu melampaui aspek lahiriah dan benar-benar tenggelam dalam dimensi spiritual, dengan kesadaran penuh untuk selalu mengingat Allah. Kehilangan kesadaran dalam berzikir atau lalai dalam mengingat Allah dianggap sebagai suatu hal yang "membatalkan" puasa dalam dimensi spiritual. Inilah tingkatan puasa yang dijalankan oleh para nabi, rasul, serta wali-wali Allah yang mulia.

Semakin bertambah usia seseorang, seharusnya semakin matang pula emosional dan spiritualitasnya. Dengan demikian, kebijaksanaan dan moralitas seharusnya semakin mudah ditemukan dalam masyarakat modern, meskipun dampak globalisasi terkadang membawa pengaruh negatif. Namun, fenomena sosial yang terjadi saat ini, seperti penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dalam ranah politik, menunjukkan adanya ketidakdewasaan spiritual. Hal ini mengundang pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana ibadah puasa yang kita jalankan selama ini benar-benar mendidik rasionalitas dan kedewasaan kita.

### **Puasa sebagai Pendidikan Rasionalitas**

Di samping membentuk spiritualitas, ibadah puasa juga berperan dalam melatih rasionalitas manusia. Dengan memahami hakikat puasa, seseorang dapat lebih bijak dalam menilai fenomena sosial di sekitarnya. Puasa mengajarkan kepatuhan terhadap aturan, sebagaimana terdapat ketentuan kapan harus mulai berpuasa (imsak) dan kapan berbuka (ifthar). Kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bagian dari

pendidikan moral yang mengajarkan kedisiplinan dan konsekuensi dalam menjalani kehidupan. Jika seseorang mengabaikan aturan dalam puasa, maka esensi dari ibadah ini akan hilang.

Orang yang menjalankan puasa juga belajar untuk mengendalikan ucapan dan tidak terlibat dalam perbincangan yang tidak bermanfaat, karena hal tersebut dapat mengurangi nilai ibadahnya. Seluruh organ tubuh seseorang yang berpuasa harus diarahkan untuk kebaikan. Oleh sebab itu, sangat kontradiktif apabila seseorang yang tengah menjalankan ibadah puasa justru menghabiskan waktunya dengan menyebarkan prasangka buruk atau bahkan fitnah yang merusak esensi puasa itu sendiri.

Menjaga diri dari prasangka buruk adalah salah satu tujuan utama dari ibadah puasa. Sayangnya, dalam kehidupan sosial dan politik saat ini, masyarakat sering terpolarisasi menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Konflik berkepanjangan yang terjadi di beberapa negara Muslim, terutama di Timur Tengah, menjadi bukti bagaimana kegagalan dalam menahan diri dapat menghancurkan ukhuwah kebangsaan dan merusak persatuan. Jika ibadah keagamaan hanya dijalankan sebagai rutinitas tanpa pemahaman substansial, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak akan memberikan pengaruh positif bagi kedewasaan spiritual.

Para bijak selalu menekankan pentingnya sikap dewasa dalam kehidupan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena terlalu banyak berbicara dapat berisiko menyakiti orang lain. Oleh karena itu, mengurangi penyebaran informasi provokatif dan menahan diri dari konflik yang tidak perlu adalah bagian dari hikmah ibadah puasa. Semoga Ramadhan kali ini menjadi momentum bagi kita untuk melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu, sehingga dapat mencapai ketakwaan yang menjadi tujuan utama dari perintah puasa (la'allakum tattaqun).

Wallahua'lam bish-shawab.

## 22

## Penguatan Pendidikan Aqidah di Tengah Maraknya Penistaan Terhadap Ulama

Fenomena penghinaan atau pelecehan terhadap ulama saat ini semakin meluas dengan beragam bentuk, pola, serta motif yang berbeda-beda. Beberapa kasus telah teridentifikasi oleh pihak berwenang, bahkan dalam beberapa situasi, penghinaan terhadap ulama justru dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan dengan tokoh agama terkait suatu isu sensitif. Tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan ini mencakup berbagai bentuk seperti cercaan, penghinaan, fitnah, hingga penistaan secara verbal dan non-verbal. Maraknya konten di media sosial yang mengandung unsur pelecehan terhadap ulama semakin menambah keprihatinan.

Dalam tradisi Islam, ulama dipandang sebagai pewaris ajaran nabi (*waratsat al-anbiya'*) yang memiliki otoritas dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat sebagai bagian dari dakwah untuk mengangkat masyarakat dari kebodohan (*jahiliyah*). Sejak dahulu, pengakuan terhadap ulama lahir dari kompetensi keilmuan agama yang luas serta kemampuannya dalam memberikan solusi bagi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Dari perspektif sosiologis, ulama berperan sebagai agen sosial yang menyampaikan informasi penting kepada umat melalui berbagai lembaga serta medium yang dimilikinya.

Dalam dunia pendidikan, ulama merupakan sumber utama dalam penyampaian ajaran Islam kepada peserta didik. Dalam konteks tertentu, mereka bahkan dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan dalam upaya mengenali diri serta mendekatkan diri kepada-Nya. Sebutan seperti mursyid semakin mengukuhkan peran ulama sebagai

pembimbing spiritual umat. Dimensi spiritual dalam ajaran Islam menjadi salah satu aspek penting yang diajarkan dalam pendidikan Islam, yang dalam struktur kurikulum dikenal dengan pengajaran aqidah (*Islamic theology*).

### **Problematika dan Tantangan dalam Penguatan Pendidikan Aqidah**

Selama ini, pengajaran aqidah di masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti majelis taklim, pengajian, ceramah agama, dan forum diskusi yang dipimpin oleh ulama atau tokoh agama. Materi yang dibahas dalam forum tersebut terkadang menyinggung isu-isu sensitif, perbedaan dalam aspek furu'iyah, bahkan ada yang menyimpang dari pokok pembahasan keislaman. Ketidaktepatan konteks dalam penyampaian ceramah sering kali menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijaksanaan ulama sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan psikologis keagamaan di tengah keberagaman pemahaman yang ada di Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengajaran aqidah adalah adanya perbedaan firqah dan aliran teologis dalam masyarakat. Materi aqidah yang semula diajarkan dalam kelompok terbatas kini dapat diakses secara luas melalui media sosial, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, penguatan aqidah sebagai kajian yang membahas ketuhanan harus dilakukan secara sistematis, mendalam, dan komprehensif. Dengan demikian, forum pengajian umum yang memiliki keterbatasan waktu tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aqidah. Masyarakat memerlukan bimbingan intensif dari ulama melalui forum seperti majelis taklim agar pemahaman mereka mengenai aqidah menjadi lebih terarah. Penguatan metode pembelajaran Islam dalam lingkungan majelis taklim menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa ulama dapat memberikan pengajaran dalam kapasitas keilmuannya yang sesuai.

Di Palembang, kasus pelecehan terhadap ulama pernah dialami oleh Allah Yarham Syeikh Muhammad Zen Syukri

(1919-2012) ketika mengajarkan konsep aqidah dari perspektif tasawuf dalam bukunya *Risalah Tawhid*. Beliau bahkan sempat dilaporkan sebagai pengajar aliran sesat. Sejumlah ulama di Palembang memiliki pandangan berbeda dan menilai pemikiran beliau menyimpang dari ajaran tauhid yang umum diajarkan. Kasus ini bahkan sampai pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi. Dalam skala nasional, Syekh Muhammad Zen berdebat dengan sejumlah ulama terkenal seperti Raden Fanani, Sullam Hadi, Farid Ma'ruf, Karim Ma'ruf, dan Buya Hamka. Pada akhirnya, pemikiran beliau dalam *Risalah Tawhid* mendapat pembelaan dari Buya Hamka dan dinyatakan tidak menyimpang berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: K/1152/52/831/62 yang ditandatangani oleh Kiyai Wahid Wahab selaku Menteri Agama RI (Izzah, 2012).

Fenomena tuduhan sesat terhadap ulama dalam mengajarkan aqidah bukanlah hal baru dan telah terjadi sejak lama di berbagai masyarakat Muslim. Hal ini muncul karena khazanah keilmuan dalam bidang aqidah sangat kaya dan beragam sejak awal kemunculan ilmu tauhid. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai berbagai perspektif dalam ilmu aqidah, sehingga mudah terprovokasi terhadap isu-isu teologis tertentu. Oleh karena itu, semangat untuk menggali dan memahami beragam sumber keilmuan harus ditingkatkan agar pemahaman umat terhadap pemikiran teologis menjadi lebih luas dan terbuka.

Dalam konteks ini, diperlukan ulama yang memiliki kapasitas akademik dan intelektual tinggi untuk membimbing umat. Peran organisasi keagamaan sangat penting dalam mencetak ulama yang kompeten, sehingga tidak bergantung pada pemerintah. Tradisi dialog antarulama dalam membahas isu-isu keagamaan menjadi semakin penting di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Masyarakat juga perlu dididik agar dapat menyelesaikan perbedaan pandangan keagamaan dengan pendekatan dialog yang sehat, bukan dengan ujaran

kebencian, penghinaan, atau tuduhan sesat yang justru memperkeruh suasana.

Ulama sejati adalah mereka yang memiliki kematangan akademik serta kedewasaan dalam menghadapi perbedaan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang baik akan lebih selektif dalam menerima figur ulama, sehingga dengan sendirinya akan menolak ulama yang tidak memiliki basis keilmuan yang kuat. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memiliki wawasan keagamaan cenderung lebih rentan terhadap konflik dan provokasi. Oleh karena itu, tantangan utama ulama saat ini adalah membangun akses keilmuan bagi umat melalui metode pengajaran Islam yang efektif, sistematis, serta menyeluruh dalam berbagai bentuk dan institusi yang tersedia.

Wallahu a'lam bish-shawab.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## 23

## **Aqidah Yang Melahirkan Spirit Hubbul Wathan (Refleksi Memperingati Hari Pahlawan)**

Istilah *hubbul wathan* atau cinta tanah air memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Konsep ini mulai dikenal luas di kalangan santri dan umat Islam Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Awalnya, istilah ini sering dikaitkan dengan konsep jihad sebagai wujud komitmen umat Islam dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pusat perlawanan umat Islam yang dipicu oleh semangat jihad bermula di Surabaya, yang ditandai dengan pekikan takbir Bung Tomo pada 10 November 1945.

Latar belakang sejarah peristiwa pertempuran 10 November bermula dari terbunuhnya Jenderal Mallaby, yang menyebabkan Inggris mengirimkan Jenderal Robert Mansergh untuk memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerah sebelum 10 November 1945. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh para pejuang, sehingga memicu pertempuran besar. Tokoh utama di balik perlawanan ini adalah para ulama di bawah pimpinan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang menggerakkan para santri dan pejuang untuk menghadapi serangan pasukan Inggris.

Semangat juang yang membara dalam diri santri dan para pejuang saat itu merupakan dampak dari fatwa jihad yang dikeluarkan para ulama. Fatwa tersebut berhasil menanamkan spirit perjuangan yang berlandaskan spiritualitas yang kuat. Saat ini, meskipun perjuangan melawan penjajahan secara fisik telah usai, berbagai tantangan kebangsaan masih harus dihadapi. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan apakah

semangat jihad dan *hubbul wathan* masih relevan dalam konteks membangun bangsa di era modern.

### **Aqidah, Jihad, dan Cinta Tanah Air**

Aqidah merupakan keyakinan mendasar seseorang terhadap keberadaan Tuhan. Keimanan yang kuat dalam hati seseorang akan melahirkan sikap religius yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Rasa kepedulian sosial seseorang juga merupakan refleksi dari kadar keimanannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah disebut mukmin seseorang yang dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan.”* Hadis ini menegaskan bahwa kepekaan sosial menjadi indikator kuat atau lemahnya keimanan seseorang.

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, semangat jihad juga menjadi cerminan dari kekuatan aqidah seseorang. Seorang Muslim yang memiliki iman lemah cenderung tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur, termasuk hak untuk hidup merdeka. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 15 yang berbunyi: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”* Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan yang kuat mendorong seseorang untuk berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan kebaikan.

Di era modern, jihad tidak lagi dimaknai sebagai perjuangan fisik (*qital*), karena dalam kondisi damai, pertumpahan darah dilarang. Saat ini, jihad lebih relevan dalam bentuk upaya maksimal untuk membangun kesejahteraan umat. Salah satu bentuk jihad yang paling dibutuhkan adalah jihad harta, terutama di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Dalam konteks ini, filantropi Islam menjadi solusi efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Berbagi dengan sesama di masa sulit merupakan wujud dari kesadaran iman

seseorang, sementara sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama mencerminkan lemahnya aqidah.

Jihad dalam konteks saat ini juga mencakup pengembangan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Umat Islam perlu mengarahkan energi perjuangan mereka untuk meningkatkan intelektualitas dan daya saing dalam dunia bisnis. Semua organisasi keislaman perlu bersinergi dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Tantangan terbesar umat Islam saat ini bukan lagi penjajah asing, melainkan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan sosial. Oleh karena itu, jihad di era modern harus diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing.

### **Menjaga Spirit Jihad dalam Konteks Modern**

Saat ini, berbagai kebijakan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial yang menghambat kemajuan umat dapat dianggap sebagai bentuk baru dari kolonialisme. Oleh sebab itu, jihad regulasi menjadi sangat penting untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang merugikan umat Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam perjuangan ini adalah pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan penghalang utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam sejarah Islam, kekalahan kaum Muslim dalam Perang Uhud disebabkan oleh tindakan koruptif para pemanah yang mengabaikan perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan posisi strategis di atas bukit karena tergoda oleh harta rampasan perang. Ketidakpatuhan terhadap perintah Nabi dan keserakahan terhadap harta benda mengakibatkan kekalahan besar bagi pasukan Muslim. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa korupsi dapat melemahkan perjuangan, baik dalam konteks peperangan maupun pembangunan bangsa.

Sejarah juga membuktikan bahwa ketika kepentingan materi menjadi prioritas utama, sikap individualistik dan anti-sosial akan semakin kuat. Sebaliknya, iman yang kokoh dan

ketaatan terhadap sistem yang benar akan menciptakan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, semangat jihad dan *hubbul wathan* di era modern harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan korupsi.

Mencintai tanah air tidak hanya diukur dari seberapa besar seseorang berkorban dalam perang, tetapi juga dari sejauh mana ia berkontribusi untuk menjaga kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, jihad di masa kini harus diwujudkan melalui kerja keras, pengabdian, serta penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, semangat membela negara tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

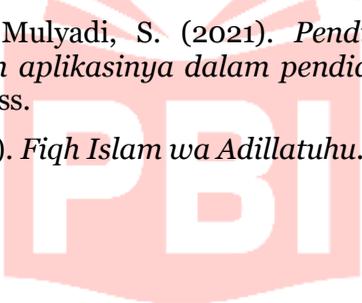


PENERBITAN BUKU INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2017). *Nasihat al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin: Konteks sejarah dan relevansi*. Penerbit Islam Nusantara.
- Abu Qasim, M. (2004). *Jihad: Antara makna tekstual dan kontekstual*. Pustaka Dakwah.
- Al-Khowbawiy, U. bin H. bin A. Asy-Syakir. *Durrotun Naashihin fii Al-Wa'izhin wa Al-Irsyad*.
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: Akar pembaruan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*.
- Cambridge University Press. (2003). *Definition of Jihad*. Cambridge Advanced Learner's Dictionary.
- Carey, K. (2015). *The end of college: Creating the future of learning and the university of everywhere*. Riverhead Books.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. The Macmillan Company.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Hamka. (1982). *Falsafah hidup*. Pustaka Panjimas.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Moderasi beragama dalam pendidikan Islam*. Litbang Kemenag.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Panduan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19*. Kemendikbud.
- Khaldun, I. (1377). *Muqaddimah*.

- Postman, N. (2005). *The end of education: Redefining the value of school*. Vintage.
- Ramadhan, M. S. (2001). *Jihad dalam Islam: Konsep dan implementasi*. Pustaka Islam.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Grasindo.
- UNESCO. (2018). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2019). *Global education monitoring report: Migration, displacement and education – Building bridges, not walls*. UNESCO Publishing.
- Zakiah, D., & Mulyadi, S. (2021). *Pendidikan karakter: Konsep dan aplikasinya dalam pendidikan Islam*. UIN Jakarta Press.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.



PENERBITAN BUKU INDONESIA

## BIODATA PENULIS



**Abdurrahmansyah**

Prof. Dr. Abdurrahmansyah, S.Ag., M.Ag. adalah anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Muhammad Zanzili dan Salminah. Lahir pada tanggal 13 Juli 1973 di Desa Cambai Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendidikan formal ditempuh di SDN No.168 Cambai-Bangka (1980-1986), SMPN Pangkalanbaru-Bangka (1986-1989), Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Ihsan Baturusa-Bangka (1989-1992), Sarjana S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang (1992-1997), Magister S2 Jurusan Pendidikan Islam pada Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta (1998-2001), dan S3 pada Program Doktor Program Studi Pengembangan Kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung (2010-2014). Pada tanggal 22 November 2024 dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) dalam bidang ilmu Pengembangan Kurikulum PAI pada FITK UIN Raden Fatah Palembang.

Sejak 1998 diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Pernah menjabat

sebagai Sekretaris Program Studi Diploma Dua (2001-2005), Sekretaris Program Studi PAI (2006-2008), Kepala Pusat Penjaminan Mutu IAIN Raden Fatah (2009-2010), Anggota Senat IAIN/UIN Raden Fatah (2015-2016; 2023-sekarang), Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah (2016-2020), Ketua Program Studi Magister Studi Islam pada Pascasarjana UIN Raden Fatah (2021–2024). Pernah mengikuti program *short course* dan workshop *academic writing* di Technical University-Delpt (TU-Delpt) Netherland (2016). Melakukan lawatan ilmiah dalam rangka membimbing mahasiswa S3 pada program *colloquium* di beberapa negara yakni Singapura, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam (2016-2020). Menghadiri Global Seminar tentang *Family Studies* di New Castle University-Australia (2018). Penulis juga berkesempatan mengunjungi beberapa negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Jerman, dan Belgia (2016).

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain: *Sintesis Kreatif: Pembaruan Kurikulum Pendidikan Islam Isma'il Raj'I af-Faruqi* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002); *Wacana Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2003); *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam* (co-author, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2005); *Arah Baru Studi Islam di Indonesia* (co-author, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007); *Pengembangan dan Telaah Kurikulum PAI* (Palembang: Grafika Telindo, 2008); *Metodologi Pembelajaran Berbasis Active Learning* (Palembang: Grafika Telindo, 2009); *Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia* (co-author, Bandung-UPI Press, 2011); *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Islam Melayu* (Palembang: Rafah Press, 2016); *Pengembangan Model Pembelajaran PAI untuk Meningkatkan Penguasaan Materi Ajar dan Aksesibilitas Bahan Bacaan pada Mahasiswa FITK UIN Raden Fatah* (Palembang, Rafah Press, 2017); *Persepsi dan Anaysis of Need Kalangan Alumni*

*Program Magister di UIN Raden Fatah* (Palembang: Rafah Press, 2018); *Kurikulum dan Tradisi Belajar pada Sistem Pendidikan Islam Abad ke-20: Studi Terhadap Pengajaran Ulama di Sumatera Selatan* (Palembang, Rafah Press, 2019); *Dinamika Politik Pendidikan Islam: Pengalaman Indonesia* (Palembang: Rafah Press, 2019); *Kurikulum dan Tradisi belajar pada Sistem Pendidikan Islam Abad Ke-20: Studi Terhadap Pengajaran Ulama di Sumatera Selatan* (Palembang: Rafah Press, 2020); *Pengajaran Islam di Kesultanan Palembang Abad Ke-18 dan 19: Studi Terhadap Materi dan Model Pembelajaran* (Palembang: Rafah Press, 2020); *Perbandingan Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer tentang Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Palembang: Grafika Utama, 2021); *Kajian Teoritik dan Implementatif Pengembangan Kurikulum* (Depok: Rajawali Press, 2021); *Implementasi Kurikulum Merdeka Kampus Merdeka (MBKM): Perspektif Perguruan Tinggi* (Palembang, Rafah Press, 2023); *Kurikulum Masjid: Sejarah, Konsep, dan Pengembangannya* (Palembang, Rafah Press, 2024).

Selain itu, penulis aktif terlibat dalam kegiatan ilmiah berupa seminar dan menulis di jurnal dan telah menulis kurang lebih 50 artikel di Harian Sriwijaya Post dan Sumatera Ekspres Palembang. Beberapa seminar internasional yang pernah diikuti antara lain: *International Conference on Teacher Education* UPI-Bandung (Joint of UPI-Bandung and Shizuoka University–Japan, Desember 2013); *Global Educational Supplies and Solutions Exhibition and Conference Indonesia* GESS Indonesia Joint Cooperation to ADI, September 2017); *Global Symposium: Family & Community Strengths* di University of New Castle-Australia, 2018); Presenter at 1<sup>st</sup> Annual Conference on Malay Islamic Studies (AICOMIC) Palembang, 2022).

Saat ini penulis beraktivitas sebagai Dosen/Guru Besar pada Pascasarjana UIN Raden Fatah dan pengajar pada

program S1, S2, dan S3 di UIN Raden Fatah Palembang, serta melakukan kegiatan penelitian bidang pendidikan. Di samping itu, penulis juga aktif sebagai Ketua Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (HIPKIN) Sumatera Selatan dan pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Sumatera Selatan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

[abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id](mailto:abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id)



**PENERBITAN BUKU INDONESIA**